



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
NOMOR 87 TAHUN 2018**

TENTANG

**PELAKSANA PENELITIAN ANGGARAN BOPTN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA TAHUN 2018**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

- Menimbang** : a. bahwa Komite Penilaian dan / atau Reviewer proposal memberikan rekomendasi kepada Penyelenggara berupa hasil penilaian yang terdiri atas: hasil kelayakan secara substansi; perkiraan tingkat kesiapan teknologi; perkiraan kelayakan biaya penelitian dan biaya output tambahan; dan kesesuaian dengan kebijakan yang berlaku dan hasil rapat Penyelenggara penelitian tanggal 18 Mei 2018, maka perlu menunjuk, menugaskan dan menetapkan Pelaksana Penelitian Anggaran BOPTN Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2018;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Pelaksana Penelitian dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pelaksana Penelitian Anggaran BOPTN Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014, tentang Perubahan IAIN Sumatera Utara menjadi UIN Sumatera Utara;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014, tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sumatera Utara;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, tentang Statuta UIN Sumatera Utara;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016, tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tatacara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standart Biaya Keluaran;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.02/2016, tentang Standar Biaya Pengeluaran Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Menteri Keuangan-86/PMK.02/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Standart Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 76/HMK.05/2009 tentang Penetapan IAIN Sumatera Utara pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

14. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/11604 tanggal 31 Agustus 2016, tentang Pengangkatan Rektor UIN Sumatera Utara;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017, tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951 Tahun 2017, tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017, tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tatacara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017, tentang Pencegahan Plagiarism di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA TENTANG PELAKSANA PENELITIAN ANGGARAN BOPTN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Pelaksana Penelitian Anggaran BOPTN Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2018.

KEDUA : Pelaksanaan Penelitian Anggaran BOPTN Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2018 ini dilaksanakan selama 5 (lima) bulan yaitu mulai bulan Mei s.d. Oktober 2018.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2018.

KEEMPAT : Apabila terjadi kejanggalan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 18 Mei 2018

Rektor,



Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag
NIP. 197012041997031006

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. KPPN Medan II;
4. Dekan Fakultas di lingkungan UIN-SU di Medan;
5. Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara di Medan;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran...

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

NOMOR : 87 TAHUN 2018

TANGGAL : 18 MEI 2018

TENTANG

PELAKSANA PENELITIAN ANGGARAN BOPTN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA TAHUN 2018

NO	JUDUL PENELITIAN	NAMA	KLUSTER	DANA
1	Model Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat Produktif (Studi Kasus Baitul Mal Dan Rumah Zakat Di Indonesia)	Saparuddin Siregar M. Ridwan	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	Rp 100.000.000
2	Pemberdayaan Filantropi Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Warga Muhammadiyah Di Indonesia	Prof.Dr.H.Hasyimshah Nasution,M.A Irwan Dr. Hasrat Efendi Samosir, MA	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	Rp 100.000.000
3	Pengajuan Gugatan Pembatalan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Di Indonesia Menurut Hukum Positif Dan Maqashid As-Syari'ah	Zainal Arifin Purba Fatimah	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	Rp 100.000.000
4	Literasi Konsumsi Halal Masyarakat Indonesia (Studi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Prov. Sumatera Utara dan Prov. Aceh Tentang Produk Halal)	Armauli Rangkuti Dr. Dahlia Lubis, M.A.	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	Rp 100.000.000
5	Rekonstruksi Strategi Perang Terhadap Narkoba (Analisis Terhadap Penyamaran Jenis Lewat Modifikasi Tipe Baru)	Zulkarnain Dr. Muhammad Ramadhan, M.A	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	Rp 100.000.000
6	Menyoal Nasionalisme Ulama Ormas Islam Di Indonesia (Studi Dalam Menyikapi Persoalan Kekinian)	Dr. H. Ahmad Zuhri, MA Prof. Dr. H. Syukur Kholil, MA.	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	Rp 100.000.000
7	Ujaran Kebencian (Hate Speech) Untuk Tujuan Menciptakan Permusuhan Di Kalangan Masyarakat Indonesia (Kajian Terhadap Kriminalisasi Dan Realita Hukum Menurut Pakar Hukum Pidana)	Drs. Maradingin, MA Dr. H. M. Jamil, M.A	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	Rp 100.000.000
8	Ancaman Berita Bohong (Hoax) Terhadap Integrasi Bangsa Menurut Pengamat Politik Di Indonesia Tahun 2018	Abu Bakar Adanan Dr. H. Indra Harahap, MA	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	Rp 100.000.000
9	Gerakan Perjuangan Bangkitnya Neo-Komunisme Pasca-Reformasi (Studi Ideologi Dan Gerakan Perjuangan Di Indonesia)	Drs. Ahmad Suhaimi, MA Prof. Dr. Lahmuddin, M.Ed	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	Rp 100.000.000
10	Penataan Ulang Pola Hubungan Mahram Antar Anggota Keluarga Masyarakat Miskin Pantai (Upaya Pencegahan Meluasnya Prilaku Incest Di Indonesia)	Nurchahaya Muhammad Hidayat	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	Rp 100.000.000
11	Penguatan Ketahanan Keluarga Melayu Sumatera Timur Dalam Mengantisipasi Kekerasan Terhadap Anak	Sudianto, MA Akmaluddin Syahputra	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	Rp 100.000.000
12	Review Terhadap Pemaknaan Jihad Menurut Ulama Kontemporer Nusantara (Kajian Terminologis Dan Kaitannya Dengan Perjuangan)	Drs. H. Milhan, MA Sukiati	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	Rp 100.000.000
13	Dampak Media Sosial Terhadap Moralitas Anak Di Indonesia (Studi Terhadap Konten Pornografi Dan Pornoaksi Pada Bigo Live Tahun 2018)	Drs. Supardi, M.Ag Prof. Dr. Amroeni, M.Ag	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	Rp 100.000.000
14	Strategi Pengembangan Industri Halal Di Indonesia (Studi Penerapan Hukum Dan Peta Jalan Industri Halal)	Isnaini Harahap Chuzaimah Batubara	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	Rp 100.000.000
15	Faham Takfiri Menurut Ulama Sunni Indonesia Pasca Kelesuan ISIS di Suriah (Aspek-Aspek Pengkafiran Dan Militansi Perjuangan)	Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, M.A Prof. Dr. H. Pagar, Hsb, M.Ag	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	Rp 100.000.000
16	Peran Ulama Dalam Menciptakan Deradikalisasi Di Indonesia (Kajian Penetrasi Terhadap Gerakan Anti Pemerintah di Indonesia)	Prof. Dr. M. Yasir Nasution Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	Rp 100.000.000
17	Pola Antisipasi Radikalisme Di Indonesia	Prof.Dr.H.Asmuni,M.A Dr. H. Nispul Khoiri, M.Ag	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	Rp 100.000.000

1	2	3	4	5
18	Fungsi Perguruan Tinggi Islam Dalam Mencegah Pemikiran Radikalisme Di Indonesia	Syahrin Harahap Abu Sahrin Anwarsyah Nur	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	Rp 100,000,000
19	Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid Di Indonesia	Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc, MA Hendra Harmain	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	Rp 100,000,000
20	Reorientasi Fikih Keluarga Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Di Indonesia (Studi Tentang Perlindungan Hak Anak)	Fatimah Zuhrah Ardiansyah	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	Rp 100,000,000
21	Peningkatan Mutu Pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Melalui Pendekatan Akreditasi Dan Autcome Assesment	Prof. Dr. Hasan Asari, MA Dr. Hafisah, MA	Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi	Rp 75,000,000
22	Komunikasi Interpersonal Pustakawan Dan Pemustaka Di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Hildayati Raudah Hutasoit Triana Santi	Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi	Rp 75,000,000
23	Pengembangan Desain Pendidikan Karakter Melalui Kurikulum Terintegrasi di UIN-SU Medan	Dr.Mardianto,M.Pd IRWAN S, MA Fauziah Nasution, M.Psi	Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi	Rp 75,000,000
24	Evaluasi Pemanfaatan Learning Management System Dalam Pembelajaran Di PTAIS Se-Sumatera Utara	Asrul Mesiono	Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi	Rp 75,000,000
25	Manajemen Humas Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Dalam Pencitraan Organisasi (Studi Komparatif UIN-SU Dan UIN Jakarta)	Dr. Nurhanifah, MA Tengku Walisyah	Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi	Rp 75,000,000
26	Pengembangan Model Peningkatan Kinerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Dengan Pendekatan Balanced Scorecard	Yusuf Hadijaya Suhairi Dr. Inom Nasution, M.Pd	Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi	Rp 75,000,000
27	Model Penerapan Nilai-Nilai Islami Dalam Pembelajaran Pada Perguruan Tinggi Islam Di Kota Medan	Prof. Dr. H. Haidar Daulay, MA Ihsan Satrya Azhar, MA Dra. Arlina, M.Pd	Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi	Rp 75,000,000
28	Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Pada Prodi PAI Di Perguruan Tinggi Islam Kota Medan	Dr. Neliwati, M.Pd Mahariah, S.Ag Dr. Derliana Marbun, M.Pd	Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi	Rp 75,000,000
29	Mengkreasi Sistem Data Terintegrasi Terinterkoneksi Untuk Data Pilah Gender Di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Penelitian Riset Aksi Partisipatoris)	Rahmi Syahriza Dra. Nashrillah Mg, MA	Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi	Rp 75,000,000
30	Pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Perguruan Tinggi Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal	ARMA ZULHAM	Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi	Rp 75,000,000
31	Respon Keagamaan Terhadap Peran Publik Perempuan: Analisis Pemikiran Tokoh Ormas Islam Di Sumatera Utara	Dr. Siti Halimah, M. Pd Dr. Humaidah Br. Hasibuan, M. Ag	Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan	Rp 65,000,000
32	Pola Komunikasi Masyarakat Dalam Menumbuhkan Kerukunan Di Barus (Studi Terhadap Penganut Islam, Kristen dan Parmalim)	Khatibah Irwansyah	Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan	Rp 65,000,000
33	Nafas Kesadaran: Spirituality In Working, Untuk Terapi Pikiran, Jiwa Dan Hati	M. Iqbal Irfham Adlin Budhiawan, SH., M.Hum	Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan	Rp 65,000,000
34	Peranan Dalihan Na Tolu, Ninik Mamak Dan Kerapatan Adat Nagari Dalam Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama Di Sumatera Barat Dan Sumatera Utara	Sahrul Afrahul Fadhila Daulai	Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan	Rp 65,000,000
35	Studi Kehidupan Sosial, Budaya, Ekonomi Dan Agama Masyarakat Di Kampung Kasih Sayang	Prof. Dr. H. Fachruddin, MA Sulidar	Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan	Rp 65,000,000
36	Epistemologi Sejarah Islam: Pemetaan Kajian Islam Di Sumatera Utara	Zainul Fuad Yusra Dewi Siregar Laila Rohani	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 41,000,000
37	Model Pengembangan Karakter Berbasis Mind Mapping Pada Anak Usia Dini	Dr. Nurmawati, MA Masganti Sit	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 41,000,000
38	Kewajiban Hukum Dan Sosial Ayah Biologis Terhadap Anak Bukan Nasab (Luar Perkawinan) (Melacak Wacana Fiqih Marginal Menuju Fiqih Berwawasan Gender Dan Hak Anak)	Dra. Hj. Tjek Tanti, Lc. MA Dr. Nurasiah, MA	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 41,000,000

1	2	3	4	5
39	Identitas Perempuan Dalam Keluarga Nelayan: Studi Tentang Artikulasi Dan Pola Relasi Gender Dalam Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Asahan	Ismet Sari, MAg Endang Ekowati	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 41,000,000
40	Respons Organisasi-Organisasi Islam Di Sumatera Utara Terhadap Paham Dan Gerakan Radikalisme	Al Rasyidin Hasnah Nasution	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 41,000,000
41	Perkembangan Terkini Studi Hadis Di Indonesia: Peran Lembaga-Lembaga Pendidikan Dalam Pengkajian Hadis	Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid, MA Dr.H.Dedi Masri, Lc.MA	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 41,000,000
42	Undang-Undang Pelindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Pandangan Maqasid Syari'ah Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Studi Kasus Di Sibolga)	Elvira Dewi Ginting Syukri Albani Nasution	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 41,000,000
43	Dinamika Partai Islam Di Wilayah Minoritas Muslim Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Di Sumatera Utara	Dr. Muhammad Iqbal, MAg. Drs. Miswar, MA	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 41,000,000
44	Relasi Antar-Iman Di Tunisia Studi Kritis Tafsir Ibn 'Ashur (W.1973)	Prof Dr.Amiur Nuruddin,MA Drs. Azwani Lubis,MAg Prof.Dr.Ahmad Qorib,MA	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 41,000,000
45	Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum Negeri (PTUN) ; (Universita Sumatera Utara Dan Universitas Negeri Medan)	Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution, MAg Siti Ismahani, M.Hum	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 41,000,000
46	Strategi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Korban Trafficking Sebagai Upaya Penguatan Ekonomi Keluarga Di Kota Medan	Drs. Khairuddin, MPd Dr. Nurhayati, M. Ag	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 41,000,000
47	Peranan Majelis Taklim Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Majelis Taklim Di Kota Medan)	Dr. Syukri, MA Sulaiman Muhammad Amir	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 41,000,000
48	Kiblat Dan Prilaku Sosial Masyarakat Di Sumatera Utara Pasca Gempa Tahun 2004	Drs. Muhammad, MA Muhammad Habibi Siregar	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 41,000,000
49	Doktrin Kelompok Salafi Indonesia Terhadap Pancasila Sebagai Dasar Negara	Drs Hasbullah bin Jafar MA Dr Pangeran MA	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 41,000,000
50	Konflik, Kebijakan Dan Otoritas Di Sumatera Utara	Dr. Syahminan, MAg Prof. Dr. Katimin, MAg	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 41,000,000
51	Pengaruh Penerapan Strategi Kooperatif Dan Konsep Diri Dalam Pembelajaran Sejarah Di Madrasah Aliyah Negeri Kota Medan	Dr. Wahyudin Nur Nasution, MAg. Dr. Asnil Aidah Ritonga, MA	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 41,000,000
52	Sistem Penguatan Peran Keluarga Berbasis Agama Dan Kearifan Lokal Dalam Mengantisipasi Perilaku Inses Keluarga Inti (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Tanjung Tiram)	Misrah Dr.Hasan Sazali.MA	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 41,000,000
53	Mainstreaming Konsep Ramah Anak Dalam Manajemen Penyelenggaraan Masjid Di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara	Dra. Farida, MPd Drs. Rustam, MA.	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 41,000,000
54	Pemeliharaan Makam-Makam Kuno Sebagai Sumber Sejarah Yang Otentik Dalam Pengembangan Wisata Pendidikan Sejarah (Kajian Pada Makam-Makam Kuno Di Martubung	Solihah Titin Sumanti Nunzairina	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 41,000,000
55	Evaluasi Efektivitas Program Iman Dan Taqwa Di Kabupaten Asahan	Dr. Salim, MPd Dr. Indra Jaya, MPd	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 41,000,000
56	Neo-Modernisme Islam Di Indonesia (Telaah Atas Pemikiran Nurcholish Madjid)	Annisaburi Maulana Andi Surya	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 41,000,000
57	Model Pengembangan Andragogik Dalam Menumbuhkan Semangat Berusaha Jama'ah Thariqat Naqshabandiyah Jabal Qubis Sumatera Utara	Dr. Didik Santoso, MPd Sholihatul Hamidah Dauly	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 41,000,000
58	Deradikalisasi Gerakan Teroris Di Sumatera Utara (Studi Terhadap Sistem Pembinaan Mantan Teroris Di Pesantren Al-Hidayah Kecamatan Sunggal Deli Serdang)	Suheri Harahap, M.Si Dr. Zulkarnaen M.Ag	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 41,000,000
59	Menjadi Tuan Di Rumah Spiritual: Identitas Sosial Dan Etnosentrisme Jamaah Suluk Asal Malaysia Pada Tarekat Naqsyabandiyah-Khalidiyah Babussalam (TNKB)	Prof. Dr. H. Muzakkir, MAg Dr. H. Abdullah AS	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 41,000,000
60	Religiusitas, Gender, Dan Intoleransi (Studi Tentang Berkembangnya Radikalisme Di Kalangan Perempuan Di Kota Medan Dan Padang)	Drs.Eldin H.Zainal, MAg Dr.Muhammad Faisal Hamdani,MAg	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 41,000,000

1	2	3	4	5
61	Alumni Dan Stakeholder (Studi Kepuasan Dan Harapan Stakeholder Terhadap Alumni Jurusan KPI Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Di Kota Medan)	Irma Yusriani Simamora, MA Muktarruddin	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 21,000,000
62	Pengembangan Desain Pembelajaran Melalui Kurikulum KKNi Pada Jurusan HES Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan	Tetty Marlina Tarigan Fatimah Zahara, MA	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 21,000,000
63	Strategi Membaca Dan Pemahaman Membaca Mahasiswa Pendidikan Jurusan Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Utami Dewi Maryati Salmiah	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 21,000,000
64	Akseptabilitas Alumni Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah (AS) Pada Ujian Calon Hakim Agama Di Mahkamah Agung RI Tahun 2017	Ibnu Radwan Siddik Turnip Dra. Amal Hayati. M.Hum	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 21,000,000
65	Pengembangan Metode Fuzzy Promethee dalam Seleksi Mahasiswa Berprestasi	Rina Widyasari Hendra Cipta	Penelitian Dasar Pengembangan Program	Rp 21,000,000
66	Studi Analisis Manajemen Pengelolaan Prodi Bimbingan Konseling Islam FITK UIN Sumatera Utara Medan	Dr. Tarmizi, MPd Drs. H.M. Adlin, MAP	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 21,000,000
67	Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Problematika Sepi Peminat	Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc. Sc Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag	Penelitian Dasar Pengembangan Program	Rp 21,000,000
68	Kecenderungan Peminatan Mahasiswa Program Studi Komunikasi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan Tahun 2010-2016	Dr. Anang Anas Azhar, MA Dr. Ahmad Tamrin Sikumbang, MA	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 21,000,000
69	Peran Model Pembelajaran Konflik Intelektual Terhadap Kecerdasan Interpersonal Mahasiswa Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan	Sri Wahyuni, S.Psi., M.Psi Rina Devianty, SS., M.Pd	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 21,000,000
70	Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik Melalui Publikasi Karya Ilmiah Bereputasi Internasional	Abdul Halim Hasugian Mhd. Furqan	Penelitian Dasar Pengembangan Program	Rp 21,000,000
71	Desain Kurikulum Interdisiplin Berbasis KKNi	Armansyah Rakhmat Kurniawan.R	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 21,000,000
72	Kisi – Kisi Kompetensi Profesional Calon Sarjana Pendidikan Matematika FITK UIN Sumatera Utara Medan	Eka Khairani Hasibuan Mara Samin Lubis Siti Maysarah Ella Andhany	Penelitian Dasar Pengembangan Program	Rp 21,000,000
73	Efektivitas Alumni Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Uinsu Medan Dalam Peningkatan Pengamalan Keagamaan Masyarakat Di Kabupaten Langkat	Indira Fatra Deni Salamuddin, MA	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 21,000,000
74	Perbedaan Prestasi Akademik Mahasiswa Antara Kelas Keunggulan Bidang Literasi yang berasal dari Siswa SMAN dan MAN Pada Prodi Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sumatera Utara	Ernita Dauly Tien Rafida	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 21,000,000
75	Pengembangan Media Resin Pada Tumbuhan Kelas Magnoliopsida Sebagai Alternatif dalam Proses Pembelajaran Biologi Di Prodi Biologi Fakultas Sains Dan Teknologi	Rahmadina, M. Pd Efrida Pima Sari Tambunan	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 21,000,000
76	Persepsi User (Pengguna) Terhadap Alumni Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sumatera Utara	Muniruddin Muhammad Husni Ritonga MA	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 21,000,000
77	Analisis Diskriminan Penggunaan Media Sosial Di Kalangan Mahasiswa UINSU	Fibri Rakhmawati Rina Filia Sari	Penelitian Dasar Pengembangan Program	Rp 21,000,000
78	Evaluasi Program Kegiatan Praktikum Fisika Dasar Di Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Sumatera Utara Medan	Ratni Sirait Nur Azizah Lubis	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 21,000,000
79	Pengembangan Model Kurikulum Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Berbasis KKNi Di Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan	Dr. Farida Repelita Waty Kembaren, M.Hum Masiathif Dwi Purnomo	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 21,000,000

1	2	3	4	5
80	Model Magang Mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sumatera Utara	Aqwa Naser Dauly Tuti Angraini	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 21,000,000
81	Tracer Study Kinerja Lulusan Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Berdasarkan Penilaian Stakeholder Tahun 2017	Tri Inda Fadhila Rahma Imsar, M.Si	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 21,000,000
82	Penguatan Konsep Gender Dari Hasil Penelitian Pembagian Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin Masyarakat Nelayan Untuk Pengembangan Prodi PIPS UIN Sumatera Utara Medan	Nur Iza Dora Rora Rizky Wandini Lailatun Nur Kamalia Siregar	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 21,000,000
83	Persepsi Dan Ekspektasi Pemangku Kepentingan Pada Peran Lulusan Studi Agama-Agama Dalam Membangun Kerukunan Antar Umat Beragama Di Kota Medan	Muhammad Jailani Dra. Ely Warnisyah Harahap, M.Ag	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 21,000,000
84	Persepsi Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Terhadap Pemahaman Mata Kuliah Praktikum Pengalaman Lapangan	Prof. Dr. Abdullah, M.Si H. Muaz Tanjung, MA	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 21,000,000
85	Peran Dosen Prodi Siyasaah Fak. Syariah Dan Hukum UIN-SU Medan Terhadap Implementasi Etika Politik Islam Dalam Pilkada Di Indonesia: Analisis Terhadap Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018	Syofiaty Lubis Dr. Syafruddin Syam, MA	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 21,000,000
86	Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Deli Serdang Terhadap Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum UIN-SU	Abd Rahim Aripin Marpaung	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 21,000,000
87	Pengaruh Pelatihan Bencana Dan Keselamatan Kerja Terhadap Persepsi Dan Respon Mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat	Dr. Tri Niswati Utami, S.Pd., M.Kes Meutia Nanda SKM, M.Kes	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 21,000,000
88	Kemampuan Membaca Kitab Kuning (Kutub Al-Turas) Mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Di UIN SU Dalam Mempersiapkan Calon Hakim Agama	Sahmiar Pulungan Sri Sudiarti	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 21,000,000
89	Penyimpangan Prilaku Politik Peserta Pilkada Sumatera Utara Tahun 2018 Ditinjau Dari Etika Politik Islam Menurut Mahasiswa Prodi Pemikiran Politik Islam UIN Sumatera Utara Medan	Muhammad Nuh Siregar, MA Drs. Maraimbang, MA	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 21,000,000
90	Pengembangan Dan Penyelenggaraan Pembelajaran Online Berbasis E-Learning Di Prodi Siyasaah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU	Deasy Yunita Siregar Drs. Ishaq, MA	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 21,000,000
91	Faktor-Faktor Pendorong Mahasiswa Memilih Program Studi Ilmu Perpustakaan Di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Dr. Usiono, Drs., M.A Retno Sayekti	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 21,000,000
92	Integrasi Nilai Islam Dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Di Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Riris Nur Kholidah Rambe Salminawati	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 21,000,000
93	Strategi Pengembangan Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN-SU Medan Dalam Meningkatkan Akreditasi	Muhammad Syahbudi Muhammad Arif	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 21,000,000
94	Implementasi Permainan Tradisional Dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosi Anak Usia Dini Di Raudhatul Athfal Kabupaten Deli Serdang	Ramadan Lubis Dr. Khadijah, M.Ag	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 21,000,000
95	Model Intensi Berwirausaha Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	Cut Metia, M.Psi Elfi Yanti Ritonga, MA Dra. Mutiawati, MA	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 21,000,000
96	Pengembangan Model Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Teori Konstruktivisme Di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Zulheddi Dr. Sahkholid Nasution, S.Ag. M.A.	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 21,000,000
97	Modus Layanan Bimbingan Konseling Islam Sebagai Upaya Pencegahan Bahaya Narkoba	Dr. H.M. Yakub, MA Drs. Abdurrahman, M.Pd	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 21,000,000

1	2	3	4	5
98	Konstelasi Penguatan Toleransi Umat Agama Dalam Komunikasi Pembangunan Agama (Studi Kasus Pemerintahan Kota Tanjungbalai)	Nursapia Harahap Ali Akbar, M. Ag	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 21,000,000
99	Model Pelayanan Bimbingan Dan Konseling Pendekatan Multikultural Dalam Mencegah Paham Radikal Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sumatera utara	Zainun Syawaluddin Nasution	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 21,000,000
100	Survey Hipertensi Dan Pencegahan Komplikasi Di Wilayah Pesisir Kecamatan Percut Sei Tuan	Zuhrina Aidha Azhari Akmal Tarigan	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 21,000,000
101	Kombinasi Model Pembelajaran PBI Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Konsep Mahasiswa Dalam Menghadapi Mea	Suendri Riri Syafitri Lubis, S.Pd, M.Si	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 21,000,000
102	Penelusuran Data Lulusan/Alumni Program Studi Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara	Dra. Sahliah, M.Ag Dr. Watni Marpaung, MA	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 21,000,000
103	Minat Masyarakat Terhadap Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam UIN Sumatera Utara (Studi Tentang Minat Masyarakat Medan Dan Sekitarnya Terhadap Prodi Ilmu Hadis)	Drs. Syukri, M.Ag Drs. Abdul Halim, MA	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 21,000,000
104	Penelusuran Data Lulusan/Alumni Program Studi Aqidah Dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam UIN Sumatera Utara	Harun Al Rasyid Drs. Kamaluddin, MA	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 21,000,000
105	Pengaruh Pembelajaran Berbasis Portofolio Dan Kemampuan Awal Terhadap Hasil Belajar Media Pembelajaran Mahasiswa Prodi PIAUD FITK UIN Sumatera Utara Medan	Rohani, S.Ag., M.Pd Tri Indah Kusumawati, M.Hum	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 21,000,000
106	Kontribusi Disiplin Kerja Dan Pengetahuan Tentang Media Pendidikan Terhadap Efektifitas Mengajar Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN SU Medan	Drs. Isran Rasyid Karo-Karo S, M.Pd Dr. Haidir, M.Pd	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 21,000,000
107	Hubungan Kepribadian Dengan Pola Pengasuhan Ayah Pada Keluarga Minang Dan Batak	Nurhayani	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15,000,000
108	Peran Tokoh Agama Mencegah Disintegrasi Kerukunan Umat Beragama Di Sumatera Utara	Wirman	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15,000,000
109	Efektivitas Bioherbisida Dari Limbah Cair Pulp Kakao (Theobroma Cacao L.) Dalam Pengendalian Berbagai Jenis Gulma Di Kebun Masyarakat Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deliserdang	Syarifah Widya Ulfa	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15,000,000
110	Urgensi Kalibrasi Arah Kiblat Pada Masjid/Mushalla Dalam Upaya Memaksimalkan Perintah Ibadah Salat (Studi Kasus Pada Masjid/Mushalla Di Kabupaten Deli Serdang)	Dhiauddin Tanjung	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15,000,000
111	Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Pada Masyarakat (Studi Kasus : PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan)	Arnida wahyuni lubis	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15,000,000
112	Efek Peltier Dalam Termoelektrik Sebagai Solusi Alternatif Teknologi Pendingin Berbasis Mikrokontroler Atmega328	Muhammad Ikhsan	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15,000,000
113	Penerapan Aplikasi Online Angket Persepsi Mahasiswa Terhadap Kinerja Dosen UIN Sumatera Utara Medan	Yusuf Ramadhan Nasution	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15,000,000
114	Pemahaman Masyarakat Islam Di Kota Medan Terhadap Hadis-Hadis Isbal	Nawir Yuslem	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15,000,000
115	Pemanfaatan Sistem Pengendali Water Level Control Untuk Budidaya Ikan Gurame Pada Kolam Terpal Menggunakan Logika Fuzzy Berbasis Mikrokontroler	Sriani	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15,000,000
116	Group Methode Project Dalam Peningkatan Pengalaman Bermatematika Siswa	Ismail Husein	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15,000,000
117	Penyelesaian Problema Arsitektur Balok Huruf Dengan Metode A* Search	Heri Santoso	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15,000,000
118	Evaluasi Program Maghrib Mengaji Kementerian Agama Ri Di Sumatera Utara	Syaukani Syamsu Nahar	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15,000,000

1	2	3	4	5
119	Pemilihan Hotel Yang Dituju Wisatawan Kota Medan Dengan FMADM Dan Metode SAW	Rima Aprilia	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15,000,000
120	Pemanfaatan Pelepeh Pisang Untuk Menghasilkan Briket Sebagai Energi Baru Dan Ter Barukan	Masthura	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15,000,000
121	Kombinasi Catel Bukopin (Cangkang Telur, Bubuk Kopi Dan Kulit Pisang) Sebagai Campuran Media Tanam Pada Pertumbuhan Solanum Lycopersicum	Khairuna	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15,000,000
122	Peran Sultan Iskandar Muda Dalam Pengembangan Islam Dan Kerajaan- Kerajaan Melayu Di Sumatera Timur	Mailin	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15,000,000
123	Identifikasi Pergerakan Organisasi Islam Di Sumatera Utara Era Kolonial Melalui Surat Kabar Tahun 1915-1942	Achiriah Sorimonang	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15,000,000
124	Pemetaan Iklim Berdasarkan Klasifikasi Oldeman Dalam Upaya Swasembada Pangan Di Kabupaten Langkat	Mulkan Iskandar Nasution Muhammad Nuh	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15,000,000
125	Menguji Keberterimaan Pemikiran Tentang "Monogami Sebagai Syarat Tak Tertulis Saat Pernikahan Berlangsung" Menurut Para Ahli Hukum Islam	Dr. Nur Aisah Simamora, Lc. MA Dra. Husna Sari Siregar, M.Si	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15,000,000
126	Tradisi Adat Jawa Tujuh Bulanan (Tingkeban) Dalam Perspektif Kewahyuan (Studi Sosiologis Kultural Komunitas Suku Jawa Di Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara)	Sugeng Wanto Ahmad Perdana Indra	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15,000,000
127	Pembuatan Membran Keramik Berbasis Zeolit Dan Karbon Aktif Untuk Aplikasi Filter Air	Kartika Manalu Dr. Abdul Halim Daulay, S.T., M.Si.	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15,000,000
128	Konsep Dan Pola Gerakan Gapai SU (Gerakan Anti Penistaan Agama Islam Sumatera Utara)	Faisal Riza Junaidi, M.Si	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15,000,000
129	Kiprah Yayasan Ash-Shilah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, Ekonomi Dan Status Sosial Anak Yatim Di Kota Medan (Studi Analisis Terhadap Pengelolaan Bantuan Ash-Shilah)	Kamalia.M.Hum Ali Akbar	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15,000,000
130	Penentuan Penerimaan Remunerasi Dosen Dengan Rule Based Reasoning	Samsudin	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15,000,000
131	Efek Tunjangan Kinerja Terhadap Etos Kerja Dan Kinerja Pegawai UIN-SU Medan	Dr. Fahrul Rizal, M.Si Faridah	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15,000,000
132	Pemberdayaan Wakaf Uang Pada Organisasi Islam Di Kota Medan	Sri Ramadhani, MM Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, MA	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15,000,000
133	Pola Pemberdayaan Ekonomi Generasi Milenial (Studi Kasus Komunitas Serikat Saudagar)	Neila Susanti Marliyah	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15,000,000
134	Potensi Radikalisme-Terrorisme Dalam Faham Teologi Salafisme (Studi Kasus Terhadap Yayasan Minhaj As-Sunnah Medan Sumatera Utara)	Adenan, MA Husnel Anwar	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15,000,000
135	Pengelolaan Harta Pada Masyarakat Muslim Kota Medan (Studi Kasus Kelas Menengah Muslim Baru Dengan Pendekatan Islamic Wealth Management)	Drs. Sugianto, MA	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15,000,000
136	Peran Industri Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mengatasi Masalah Kesenjangan Dan Distribusi Pendapatan Di Kota Medan	Kamilah	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15,000,000
137	Strategi Komunikasi Dalam Resolusi Konflik Umat Beragama Di Kota Tanjung Balai	Dr. Sahdin Hsb, M.Ag	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15,000,000
138	Tarekat Naqsabandi Jabal Hindi Di Pesantren Nurul Hijrah (Telaah Kritis Atas Kemuktabarohannya)	Uqbatul Khoir Rambe, MA	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15,000,000
139	Konfigurasi Hukum Ekonomi Berdasarkan Hukum Adat (Studi Di Sumatera Utara)	Mustapa Khamal Rokan	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15,000,000
140	Game Sebagai Media Untuk Pelestarian Budaya Bangsa	Mhd. Irwan Padli Nasution	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15,000,000
141	Pengolahan Tandan Kosong Sawit Dan Zeolit Untuk Penjernihan Air	Dr. Sajaratud Dur, M.T.	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15,000,000
142	Keanekaragaman Tumbuhan Paku Di Kawasan Taman Wisata Alam Sicike-Cikeh	Melfa Aisyah Hutasuhut Husnarika Febriani	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15,000,000
143	Pemodelan Dan Implementasi Jasa Layanan Distribusi Paket Online Shope Menggunakan First In First Out (FIFO) Dan Traveling Salesman Problem (TSP)	Ilka Zufria Triase	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15,000,000

1	2	3	4	5
144	Model Struktur Jaringan Dinamis Dalam Penyebaran Penyakit Menular Untuk Pengalokasian Vaksin	Ety Jumiati	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15,000,000
145	Implementasi Data Mining Kelompok Prioritas Penerima Dana Bantuan Bagi Keluarga Miskin Menggunakan Algoritma K-Means".	Ali Ikhwan	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15,000,000
146	Implementasi Pendidikan Berwawasan Lingkungan Hidup Di Min Sei Agul Kota Medan	Abdul Gani Jamora Nasution, M.Pdi	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15,000,000
147	Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Di Propinsi Sumatera Utara	Dr.Sudirman Suparmin, Lc, MA Yusrizal	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15,000,000
148	Analisis Terhadap Masalah Perumusan Pidana Dalam Hukum Pidana	Rajin Sitepu	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15,000,000
149	Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis (Studi Terhadap Pembinaan Mental Keagamaan Dan Keterampilan Di Balai Pungai Sejahtera Binjai)	Irwansyah	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15,000,000
150	Wewenang Majelis Ulama Indonesia Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014	Ali Murthado	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15,000,000
151	Menikah Untuk Diceraiakan (Menyorot Hak-Hak Perempuan Pada Isbat Nikah Untuk Cerai Di Pengadilan Agama Medan Tahun 2015-2017)	Imam Yazid	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	Rp 15,000,000



Prof. Dr. Sajidurrahman, M.Ag
NIP. 197012041997031006

LAPORAN PENELITIAN

Penelitian Terapan dan
Pengembangan Nasional

**Menyoal Nasionalisme Ulama
Ormas Islam Di Indonesia;
(Studi Dalam Menyikapi Persoalan Kekinian)**



PENELITI :

**DR. AHMAD ZUHRI, M.A. (KETUA)
PROF. DR. SYUKUR KHOLIL, MA (ANGGOTA)**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UIN SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

1. a. Judul Penelitian : Menyoal Nasionalisme Ulama Ormas Islam Di Indonesia; (Studi Dalam Menyikapi Persoalan Kekinian)
- b. Kluster : Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional
- c. Bidang Keilmuan :
- b. Kategori : Kelompok
1. Peneliti : Dr. Ahmad Zuhri, MA (Ketua)
2. ID Peneliti : 2005057110203932
Prof. Dr. Syukur Kholil, MA (anggota)
3. ID Peneliti :
4. Unit Kerja : Pascasarjana UIN SU
5. Waktu Penelitian : 5 s/d 6 bulan 2018
6. Lokasi Penelitian : Jakarta dan Sumatera Utara
7. Biaya Penelitian : Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

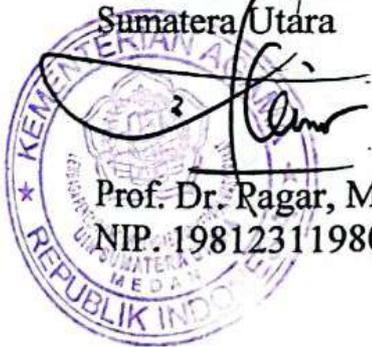
Medan, 26 Oktober 2018

Disahkan oleh Ketua
Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat (LP2M) UIN
Sumatera Utara

Prof. Dr. Ragar, M.Ag
NIP. 1981231198031016

Peneliti
Ketua

Dr. Ahmad Zuhri, MA
NIP. 197105052000031007



A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Ahmad Zuhri', is written over a horizontal line.

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zuhri, MA
Jabatan : Dosen Pascasarjana UIN SU Medan
Unit Kerja : Pascasarjana UIN SU Medan
Alamat : Jl. IAIN No 1 Medan

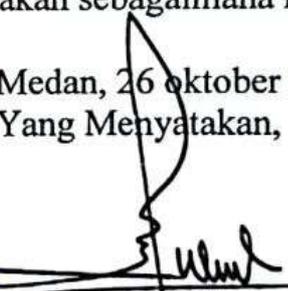
Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Judul penelitian "Menyoal Nasionalisme Ulama Ormas Islam Di Indonesia; (Studi Dalam Menyikapi Persoalan Kekinian)" merupakan karya orisinal saya.
2. Jika di kemudian hari ditemukan fakta bahwa judul, hasil atau bagian dari laporan penelitian saya merupakan karya orang lain dan/atau plagiasi, maka saya akan bertanggung jawab untuk mengembalikan 100% dana hibah penelitian yang telah saya terima, dan siap mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 26 oktober 2018
Yang Menyatakan,




Dr. Ahmad Zuhri, MA
NIP. 197105052000031007

ABSTRAK

**Menyoal Nasionalisme Ulama Ormas Islam Di Indonesia:
Studi Dalam Menyikapi Persoalan Kekinian**

Peneliti :

**Dr. Ahmad Zuhri, MA
Prof. Dr. Syukur, Kholil, MA**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana nasionalisme ulama Ormas Islam Indonesia dalam menyikapi persoalan kekinian, untuk mengetahui bagaimana ulama ormas Islam Indonesia merespon nasionalisme lewat pemahaman keagamaan. Kemudian untuk mengetahui bagaimana latar belakang keberadaan nasionalisme ulama ormas Islam Indonesia dalam menyikapi persoalan kekinian.

Penelitian ini terkategori kepada jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk memberikan informasi secara kualitas, karenanya dalam laporan penelitian akan tersimpul temuan yang bersifat normatif kualitatif.

Secara prinsip, Muhammadiyah dan NU memandang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 adalah Negara Pancasila yang ditegakkan di atas falsafah kebangsaan yang luhur dan sejalan dengan ajaran Islam. Sila Ketuhanan Yang Mahas Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; secara esensi selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Muhammadiyah dan NU akan menjadi garda depan demokratisasi di negeri ini. Muhammadiyah dan NU tidak mempertentangkan antara Islam dan Nasionalisme. Islam ataupun nasionalisme harus saling sinergi untuk keberlangsungan agama, bangsa, dan negara Indonesia. Dengan adanya nasionalisme, umat Islam akan bersatu. Empat pilar nasionalis harus tetap diperkuat, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Muhammadiyah dan NU berpandangan bahwa paham yang menyimpang, seperti radikalisme, liberalisme dan yang sejenis, atau paham yang bertentangan dengan ideologi Nasional Indonesia tidak akan tumbuh subur jika nasionalisme di perkuat dan diperkokoh oleh semua komponen bangsa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penelitian ini ini berjudul: *Menyoal Nasionalisme Ulama Ormas Islam Di Indonesia; Studi Dalam Menyikapi Persoalan Kekinian*. Penelitian ini menjadi berdaya guna, karena mendapat bantuan dana dari BOPTN Kemenag RI tahun 2018 dan motivasi keilmuan dari pelbagai pihak, maka selayaknya peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada BOPTN Kemenag RI Jakarta, LP2M UIN SU dan semua kalangan yang tidak dapat disebutkan namanya di sini yang telah berjasa memberikan kontribusinya kepada peneliti, semoga semua jerih payah dan jasa-jasa semua pihak mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah swt .

Dengan iringan doa kepada Allah swt, semoga sumbangan dan bantuan yang telah diberikan, akan mendapat kebaikan yang berlipat ganda dari Allah swt.

Dalam laporan penelitian ini, peneliti menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, baik materi maupun tata letaknya. Untuk itu maka peneliti mengharapkan masukan yang konstruktif dari pihak manapun, demi kesempurnaannya. Semoga kontribusi yang kecil ini bermanfaat baik kepada peneliti maupun pembaca. Amin.

Medan, 20 Oktober 2018

Peneliti,


Dr.Ahmad Zuhri, MA

Prof.Dr.Syukur Kholil, MA

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	
Surat Pernyataan	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	112
Daftar Gambar	115
Daftar lampiran	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1.
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kontribusi Penelitian	6
E. Penegasan Istilah	7
F. Landasan Teori	11
G. Metode Penelitian	12
H. Personalia	16
I. Biaya Penelitian	17
J. Waktu Penelitian	17
BAB II. PEMAHAMAN TERHADAP NASIONALISME DAN PERSOALAN KEKINIAN	
A. Pengertian Nasionalisme di Negara Indonesia	18
B. Persoalan Kekinian dan Hubungannya Dengan Nasionalisme	27
BAB III. PENGENALAN INFORMAN PENELITIAN ORMAS ISLAM TERBESAR DI INDONESIA, PENGURUS DAN TOKOHNYA	
A. Pendahuluan	37
B. Muhammadiyah	37
C. Nahdhatul Ulama	45
BAB IV TEMUAN PENELITIAN	
A. Pendahuluan	53
B. Latar Belakang Keberadaan Nasionalisme Ulama Ormas Islam Indonesia	57

1. Pandangan Muhammadiyah tentang keberadaan Nasionalisme	57
2. Pandangan Nahdhatul Ulama tentang keberadaan Nasionalisme	64
C. Ulama Ormas Islam Indonesia dalam Merespon Nasionalisme Lewat Pemahaman keagamaan	69
1. Respon Muhammadiyah tentang Pandangan Agama terhadap Nasionalisme	70
2. Respon Nahdhatul Ulama tentang Pandangan Agama terhadap Nasionalisme	77
D. Nasionalisme Ulama Ormas Islam Indonesia dan sikapnya terhadap persoalan Kekinian di Indonesia	85
1. Sikap Muhammadiyah tentang Persoalan Kekinian yang Merusak Nilai-nilai Nasionalisme di Indonesia	86
2. Sikap Nahdhatul Ulama tentang Persoalan Kekinian yang Merusak Nilai-nilai Nasionalisme di Indonesia	91
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	106
B. Saran-Saran	111
DAFTAR REFERENSI	112

Bab 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Jika menelaah perkembangan perjalanan bangsa Indonesia, terutama pada zaman reformasi, maka salah satu peristiwa penting yang perlu diperhatikan adanya pembubaran organisasi masyarakat (ormas) yang dikenal dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada tanggal 19 Juli 2017. Pemerintah RI melalui Kementerian Hukum dan HAM secara resmi mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.¹ Sejalan dengan itu, Menkopolhukam Wiranto mengatakan, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam UU Ormas.

Kendatipun pembubaran HTI sempat menimbulkan pro-kontra dan polemik di tengah masyarakat. Namun, ketegasan Pemerintah untuk membubarkannya ternyata penuh dukungan, misalnya Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan; “Gerakan Pemuda Ansor memberikan apresiasi atas ketegasan sikap pemerintah dalam membubarkan HTI,”² demikian juga Ketua PB IKAPMII Zaini Rahman memuji langkah pemerintah terkait pembubaran HTI. Menurut dia, langkah itu adalah bentuk

¹<http://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah>. didawn load pada Hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2017.

²<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/05/08/gp-ansor-apresiasi-ketegasan-pemerintah-bubarkan-hti>. Didawn load pada hari Rabu tanggal 11 Okt. 2017

ketegasan pemerintah dalam mengantisipasi berkembangnya gerakan-gerakan fundamentalisme Islam.³

Di lain pihak tidak kalah banyak penentang, seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Dewan Penasihat Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Hisar Tambunan ingin menggugat Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dijadikan dasar dalam pembubaran HTI,⁴ demikian juga Yusril Ihza Mahendra, mengatakan Intinya kami tetap melakukan perlawanan dan mohon MK membatalkan seluruh isi Perppu⁵ juga menurut pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Adi Prayitno memberikan komentar miring terhadap sikap pemerintah yang telah membubarkan HTI tersebut.⁶ Ini menggambarkan bahwa bukan hanya kelompok nasionalis yang banyak, tetapi kelompok kontra produktif pun demikian banyak.

Boleh dikatakan bahwa ada pihak tertentu yang menilai pembekuan organisasi itu merupakan sebuah bentuk pengebirian demokrasi dan pelanggaran hukum. Dikatakan demikian karena menyalahi prosedur di mana Pemerintah secara mandiri atau sepihak (tanpa putusan Pengadilan) langsung membubarkan HTI, dan secara substansi Pemerintah telah melawan Pancasila sebagai asas ideologi negara mengakui keberadaan agama di Indonesia ini. Kemudian di lain pihak

³<http://news.metrotvnews.com/politik/nbw11WJK-langkah-pemerintah-bubarkan-hti-diapresiasi>. Didawn load pada hari Rabu tanggal 11 Okt. 2017.

⁴<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/08/09/gugat-perppu-ormas-acta-tegaskan-bukan-pendukung-hti>. Didawn load pada hari Rabu tanggal 11 Okt. 2017.

⁵<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/07/26/yusril-ihza-mahendra-pokohnya-hti-akan-terus-melawan>. Didawn load pada hari Rabu tanggal 11 Okt. 2017

⁶<http://politik.rmol.co/read/2017/05/14/291317/Pemerintah-Harus-Juga-Pikirkan-Efek-Psikologis-Pendukung-HTI>- Didawn load pada hari Rabu tanggal 11 Okt. 2017

menilai bahwa Pemerintah benar bahkan cenderung telah terlambat melakukan hal ini, karena secara jelas dan meyakinkan bahwa HTI ingin menukar ideologi negara, dan menukarnya dengan khilafah.

Telah menjadi suatu ketetapan di wilayah Negara Republik Indonesia bahwa ormas boleh didirikan jika mendukung integrasi bangsa dan memperkuat Pancasila. Hal ini dapat dilihat pada Bab I Pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Organisasi Kemasyarakatan mengatakan; "Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila."⁷ Indonesia telah menjadi kesepakatan bangsa yang lebih besar, karena perwujudan keinginan lintas; ras, suku, bangsa, dan agama tidak boleh dibubarkan oleh kesepakatan yang lebih kecil, misalnya komunitas aliran pada satu kelompok agama tertentu.

M. Mas'ud Said dalam *Kajian Model Internalisasi Ideologi Kebangsaan di Daerah Perbatasan* mengungkapkan tentang adanya kekhawatiran akan tergerusnya ideologi kebangsaan: "Setelah Timor Timur, pada 17 Desember 2002, *International Court of Justice* atau Mahkamah Internasional memenangkan gugatan Malaysia atau Sipadan dan Ligitan. Sejak itu, kedua pulau terluar itu harus lepas dari NKRI Setelah menghadapi dua kasus besar tersebut, Indonesia terus-menerus dihadapkan pada tantangan dan ancaman terhadap yurisdiksi dan *soverignty* NKRI, baik yang dipicu oleh pihak luar (eksternal/negara lain), maupun dari pihak "elemen bangsa" Indonesia yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat. Sampai saat ini,

⁷ Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Indonesia sering terlibat pertentangan dengan Malaysia terkait dengan status Ambalat yang terletak di laut Sulawesi yang kaya dengan minyak mentah. Ambalat hanyalah salah satu wilayah di perbatasan yang berpotensi mengganggu integrasi NKRI, karena menurut Akhmad Solihin⁸, Indonesia masih mempunyai permasalahan sengketa perbatasan yang belum terselesaikan dengan sepuluh Negara tetangga."⁹

Selanjutnya, jika ditelusuri, maka ada banyak persoalan penting kekinian yang terkait dengan Ulama Ormas Islam. selain adanya kekhawatiran akan tercabik-cabiknya integrasi bangsa, juga militansi nasionalisme warga negara. Sebagai contoh; 1). Lahirnya Pendapat dan sikap keagamaan MUI (Fatwa MUI) atas ucapan Ahok di Kepulauan Seribu, yang ditindak lanjuti oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI yang berakhir dengan dicopotnya sebagai Gubernur DKI serta dipenjarakan. 2). Unjuk rasa damai 212 dan yang lainnya. 3) Isu PKI, yang telah bergejolak sampai kepada penyerangan kantor LBH atas kekhawatiran bangkitnya kembali PKI, dan lain-lain. Semua ini mengindikasikan betapa rawannya nasionalisme bangsa Indonesia saat ini.

Fakta secara empiris ternyata ada terjadi, yakni gejolak kerawanan nasionalisme muncul dari tokoh penting Ulama Ormas Islam. Sebagai contoh, di antara mereka adalah; Ustad Habib Riziq, yaitu Imam Besar Front Pembela Islam, Ustad Tengku Zulkarnain Wasekjen Majelis Ulama Indonesia, Bachtiar Nasir Ketua Gerakan Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), Dahnil Anzar Simanjuntak Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah masa amaliah 2012-2017, KH Abdullah Gymnastiar (Aa Gym)

⁸ Sinar Harapan, 10 Mei 2004.

⁹ M Mas'ud Said. 2009. *Kajian Model Internalisasi Ideologi Kebangsaan di Daerah Perbatasan*, 2010, Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas, Malang: UMM, h. 7.

Pimpinan Darut Tauhid, dan Ustadz Arifin Ilham dari Az-Zikra, Rokhmat S. Labib Ketua Umum DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan lain-lain. Mereka adalah orang-orang yang sangat berpengaruh di tengah masyarakat, dan mereka bukan hanya didengar tapi justeru diikuti oleh masyarakat. Karenanya mereka mestinya mengajarkan agama secara damai dan memperkokoh kebangsaan umat.

Salah seorang pengamat politik dan intelektual kampus, Yudie Latif mengatakan, merumuskan jati diri itu harus dilakukan dengan benar. Pada diri manusia terdapat *public self* dan *private self*. Pada dasarnya manusia Indonesia sebagai *public self* memiliki tingkat spiritualitas dan ketahanan emosional yang tinggi, namun terlihat belakangan ini seluruh hal yang bersifat kolektif mulai mengalami dekadensi, termasuk Parpol dan Ormas keagamaan.¹⁰ Bila ini yang menjadi kenyataan, apalagi menjadi semakin parah maka sendi-sendi fundamental bangsa sudah mulai tergerogoti, pada gilirannya bangunan kebangsaan yang berdiri kokoh di atasnya selama ini boleh jadi rubuh.

Peristiwa demi peristiwa kekinian seperti dijelaskan di atas sering muncul dalam bentuk yang ambigu atau abu-abu. Apakah peristiwa itu bagian dari ajaran agama dimana seseorang akan beribadah saat melaksanakannya sehingga akan menjadi orang saleh dengannya, atau termasuk manuver politik yang ingin mengganggu integrasi bangsa dalam berbangsa dan bernegara sehingga telah bersifat provokatif terhadap nasionalisme, bahkan bisa dituduh makar. Kenyataan ini menjadi tanda tanya, karenanya perlu ada ketegasan.

¹⁰ Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/BAPPENAS, 2016. *Laporan Koordinasi Strategis Penyusunan Rencana Aksi Strategi (Stranas) Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa Dalam Rangka Memperkuat Persatuan Dan Kesatuan Bangsa*, h.18.

Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan peran penting Ormas Islam di masa perjuangan dan awal kemerdekaan. Hal ini seperti dikemukakan Miftahuddin, M.Hum, dkk (2012) sebagai berikut:

"Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dua organisasi keagamaan yang terbentuk pada awal abad ke-20, tampak perannya dalam perjuangan usaha mempertahankan kemerdekaan. Baik secara keorganisasian maupun individu tokohnya dapat dilihat andil mereka, baik pada masa pra-kemerdekaan maupun pasca-proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebut saja Tentara Allah (*Hizbullah*) dan kemudian *Sabiliillah* adalah organisasi yang bersifat militer yang di dalamnya NU dan Muhammadiyah banyak berperan."

Kemudian Miftahuddin menjelaskan:

"Tidak ketinggalan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) adalah bagian yang mewarnai sejarah era Kebangkitan Nasional. Yang menarik untuk dikaji adalah, ada sisi-sisi yang perlu ditekankan dan disoroti lebih dalam terkait dengan peran kedua organisasi keagamaan tersebut dalam sejarah Indonesia. Misalnya, terbentuknya badan-badan perjuangan seperti PII, MIAI, Masyumi, Hizbullah, dan Markas Ulama Angkatan Perang Sabil (MUAPS) adalah tidak terlepas dari peran kedua organisasi itu."¹¹

Kita yakin bahwa jika Ulama kedua Ormas Islam ini (NU dan Muhammadiyah) kompak dan tetap memiliki nasionalisme yang tangguh serta komit dengan NKRI, maka Indonesia yang kita cintai ini akan tetap eksis dan berjaya. Ulama kedua ormas ini adalah kelompok besar yang mewarnai

¹¹ Miftahuddin, M. Hum., Dkk., 2012. *Laporan Penelitian Payung: Peran Organisasi Islam: Dari Perjuangan Menuju Kemerdekaan Sampai Masa Perang Kemerdekaan (1936-1949)*, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah FISIP – UNY, h. 5-6.

keberagamaan dan membimbing dan mengawal peta perpolitikan di Indonesia ini. Kebersamaan kedua ulama ormas ini akan membimbing umat bahkan Indonesia secara umum, baik untuk mempertahankannya ataupun untuk dibawa ke arah mana. Karenanya ulama kedua ormas Islam ini yang menjadi pusat perhatian jika ingin memprediksi tentang keberadaan dan perjalanan Indonesia ke depan.

Mencermati keterpengaruhannya ulama kedua ormas ini pada even-even besar belakangan ini mengundang masyarakat untuk mempertanyakan nasionalisme mereka. Hal ini menjadi penting untuk diteliti dalam sebuah penelitian serius karena berkenaan dengan nasib 260.000.000, anak bangsa dan sebagai bangsa terbesar ke-4 di dunia, dan nomor 1 terbanyak penganut Islamnya di dunia. Selain itu, juga mestinya segera jangan sampai terlambat dengan adanya ulah-ulah orang yang tidak bertanggung jawab di mana di duga makar sudah mulai menjadi kenyataan, karena sudah banyak yang dinyatakan tersangka, dan jangan sampai ideologi negara sampai ditukar theokrasi, karena sudah ada ormas yang dibubarkan sebagai kekuatan yang mengancamnya, bahkan jangan sampai Indonesia menjadi negara ateis karena PKI telah menggeliat dengan manuver dan strateginya.

B. Rumusan Masalah

Dalam buku ini karena berdasarkan dari hasil penelitian, maka diperlukan beberapa rumusan masalah untuk ditelaah dan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana latar belakang keberadaan nasionalisme ulama ormas Islam Indonesia?
2. Bagaimana ulama ormas Islam Indonesia merespon nasionalisme lewat pemahaman keagamaan ?
3. Bagaimana nasionalisme ulama Ormas Islam Indonesia dalam menyikapi persoalan kekinian?

Selanjutnya, buku ini ditulis bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana nasionalisme ulama Ormas Islam Indonesia dalam menyikapi persoalan kekinian.
2. Untuk mengetahui bagaimana ulama ormas Islam Indonesia merespon nasionalisme lewat pemahaman keagamaan.
3. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang keberadaan nasionalisme ulama ormas Islam Indonesia dalam menyikapi persoalan kekinian.

Selanjutnya, buku ini diharapkan memberikan sejumlah manfaat yaitu:

1. Sebagai hasil analisa (*analysis result*) mengenai strategi pemecahan masalah ulama Ormas Islam Indonesia dalam menjawab persoalan kekinian.
2. Sebagai referensi aplikatif yang dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan kebangsaan.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami istilah dalam buku ini, maka paling tidak ada 4 (empat) kata yang perlu mendapat penegasan dalam penelitian ini, sebagai berikut;

1. Nasionalisme

Nasionalisme merupakan suatu paham kebangsaan yang dikembangkan dalam rangka mempersatukan semua elemen yang ada pada suatu bangsa. Hal ini didasarkan pada rasa cinta terhadap tanah air, bangsa dan negara serta ideologi dan politik. Nasionalisme juga diartikan sebagai suatu sikap politik dan sosial dari kelompok masyarakat yang mempunyai kesamaan budaya, bahasa, wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Mereka merasakan adanya kesetiaan yang

mendalam terhadap kelompok-kelompok yang lain dalam satu bangsa.¹²

Selanjutnya, Mustari Kurniawati (2016) menjelaskan berkenaan dengan nasionalisme, yakni:

"Nasionalisme merupakan sikap mental dan tingkah laku yang menunjukkan loyalitas atau pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya; memiliki rasa kebangsaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa; dan identik dengan memiliki rasa solidaritas terhadap musibah dan kekurangberuntungan saudara setanah air, sebangsa dan senegara. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nasionalisme Indonesia adalah suatu gerakan kebangsaan yang timbul pada bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat."¹³

Selain itu, Kartodirdjo menguraikan berkenaan dengan unsur-unsur nasionalisme sebagai berikut;

"Unsur-unsur nasionalisme di Indonesia dibagi dalam tiga kategori:1) Unsur kognitif menunjukkan adanya pengetahuan atau pengertian akan suatu situasi atau fenomena tertentu dalam hal ini mengenai pengetahuan akan situasi kolonial pada segala aspeknya. 2) Unsur orientasi nilai atau tujuan menunjukkan keadaan yang dianggap sebagai tujuan atau hal yang berharga adalah terbebas dari kolonialisme atau merdeka. 3) Unsur afektif dari tindakan kelompok menunjukkan situasi dengan pengaruhnya yang menyenangkan atau menyusahkan

¹² Mugiyono, Relasi Nasionalisme dan Islam serta Pengaruhnya terhadap Kebangkitan Dunia Islam Global, *Junal Ilmu Agama*, Vol. 15, No.2, 2014. Palembang: IAIN Raden Fatah.

¹³ Mustari Kurniawati, SIP., MPA, *Nasionalisme*, Materi Diklat Prajabatan Golongan II Lembaga Administrasi Negara, 17-10-2016.

bagi pelaku-pelakunya. Berbagai macam diskriminasi pada masyarakat kolonial melahirkan aspek afektif.¹⁴

Berdasarkan beberapa pandangan di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa yang dimaksud dengan nasionalisme dalam buku ini adalah rasa kebangsaan yang diiringi dengan keyakinan tentang kebenaran berbangsa dengannya, serta keinginan untuk mempertahankannya. Dalam hal ini adalah nasionalisme ulama terhadap Indonesia sebagai suatu negara.

2. Ulama

Seorang peneliti Ahdi Makmur, mengemukakan dalam penelitiannya berjudul *Peranan Ulama dalam Membina Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan* menjelaskan:

"Kata ulama adalah bentuk jamak dari kata *'âlim* kata ini berasal dari bahasa Arab, yang berarti seseorang yang memiliki ilmu. Ulama berarti orang-orang yang berilmu. Di dunia Melayu, digunakan kata-kata seperti *cekgu*, *guru*, *tok guru* dan *tuan guru*. Sebutan ulama di Indonesia juga berbeda-beda, *teungku* (Aceh), *tuanku* atau *buya* (Sumatera Barat), *ajengan* (Jawa Barat), *kyai* (Jawa Tengah dan Jawa Timur), *tuan guru* (Nusa Tenggara Barat). Di Kalimantan Selatan, ulama disebut *guru*, *mu'allim* (informal), dan *tuan guru* untuk sebutan formal.¹⁵

Kemudian Badrudin Subky (1995:45) mendefinisikan ulama adalah sebagai berikut:

¹⁴ Kartodirdjo, Sartono. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Penelitian Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. h. 245.

¹⁵ Miqot, Vol. XXXVI No. 1 Januari-Juni 2012, h.176, lihat juga, M.Khoiril Anwar dan Muhammad Afdillah dalam penelitian berjudul *Peran Ulama di Nusantara dalam Mewujudkan Harmonisasi Umat Beragama* mengutip Azra (Azra, 2002, h. xxvii).

“Ulama adalah hamba Allah yang *kbasyyatullah*, yaitu mengenal Allah secara hakiki. Mereka adalah pewaris nabi, pelita umat dengan ilmu dan bimbingannya. Mereka menjadi pemimpin dan panutan yang uswah hasanah dalam ketakwaan dan istiqomah. Sifat ini menjadi landasan beribadah dan beramal saleh. Mereka bersikap benar dan adil serta tidak takut kepada celaan. Tidak mengikuti hawa nafsu, aktif menegakkan kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Mereka adalah pemersatu umat, teguh memperjuangkan dan meninggikan Islam, berjuang dijalan Allah, serta melanjutkan perjuangan Rasulullah dalam mencapai keridhaan Allah SWT.¹⁶

Dalam pengertian lain, ada juga mengemukakan bahwa "pengertian ulama dalam konteks Indonesia pada umumnya terbatas masih sempit dan tetap dominan. Dengan kata lain, ulama umumnya diidentikkan dengan orang-orang yang ahli dalam bidang agama, lebih khusus lagi fikih. Tetapi, sekali lagi dalam konteks Indonesia, keahlian dalam bidang fikih saja belum cukup bagi seseorang untuk diakui sebagai ulama. Ada beberapa orang di Indonesia yang ahli dalam bidang ini, tetapi belum dipandang masyarakat luas sebagai ulama. Boleh jadi mereka lebih dipandang sebagai intelektual atau lebih populer lagi cendekiawan muslim."¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa dimaksud dengan ulama dalam buku ini adalah warga negara Indonesia yang dijustifikasi sebagai ulama, baik lewat lembaga tempat dia mengabdikan, demikian juga dengan ulama yang ada di tengah masyarakat.

¹⁶Badruddin Subky, 1995. *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman*, Jakarta : Gema Insani Press, h. 45

¹⁷Azra dalam *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* Volume 4 Nomor 1, 2016, h.87.

3. Ormas Islam

Organisasi kemasyarakatan berasal dari dua kata, yakni organisasi dan kemasyarakatan. Organisasi berasal dari bahasa Yunani, yakni Organum yang berarti, alat, bagian, anggota atau badan. Sedangkan yang dimaksud dengan kemasyarakatan hal-hal yang menyangkut masyarakat.

Menurut pandangan Koentjaraningrat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adalah “Masyarakat adalah *kesatuan hidup* manusia yang berinteraksi *menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu* dan yang terikat oleh *suatu* rasa identitas bersama.¹⁸ Kemudian menurut Manullang dengan mengutip James D Mooney menyatakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama¹⁹. Chesters I. Barnard mengartikan organisasi sebagai suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih²⁰.

Kemudian jika ditelusuri, pada Bab I Pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendefinisikan: "Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila."²¹

¹⁸ Koentjaraningrat. 2009. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan. h. 118.

¹⁹ M. Manullang. 2002. *Dasar-dasar Manajemen*. Cetakan 16. Yogyakarta : Gajah Mada University Press, hlm. 59 dikutip dari Mooney, Alan C Reiley. 1974. *The principles of organization*. New York, London: Harper & Brothers.

²⁰ Chesters I. Barnard, 1938. *The functions of the executive*. Cambridge: Harvard University Press.

²¹ Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan ormas Islam dalam buku ini hanya terbatas pada dua, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Karenanya yang dimaksud dengan Ulama Ormas Islam disini seperti yang tertuang pada judul penelitian ini adalah terbatas pada Ulama Ormas Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

4. Permasalahan Kekinian

Adapun yang dimaksud dengan persoalan kekinian dalam buku ini dibatasi pada beberapa aspek saja, yaitu sebagai berikut;

1. Berkenaan dengan masalah penista agama.
2. Paham liberal dan radikal.
3. Kesenjangan sosial-ekonomi.
4. Dinamika global dan trans-nasional.

Landasan Teori

Sebagaimana dipahami bahwa Rasul saw. bersama sahabat telah mempraktekkan hidup rukun dan damai bersama non muslim selama di Medinah, yaitu bersama orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kebersamaan Rasul dengan mereka bukan hanya sekedar berdampingan, tetapi benar-benar berbaur sebagaimana layakanaya komunitas masyarakat pada umumnya. Di sana ada Piagam Madinah sebagai Undang Undang tertinggi yang dipatuhi bersama, Rasul bermuamalah dengan mereka karena Rasul dinyatakan pernah menggadaikan baju besinya kepada Yahudi. Bahkan Rasul menyatakan bahwa kita ini bersaudara, karena kita dilagirkan dari ayah yang satu, yaitu Adam, dan ibu yang satu, yaitu Hawa, dan kita memiliki Tuhan yang satu, yaitu Allah Swt.

Selain ada kebersamaan dalam urusan dunia, maka Islam mengatur umatnya untuk secara sepihak/ istimewa

menjalankan urusan ukhrawinya (aqidah dan ibadah). Meskipun kita bersama tapi urusan akidah, semisal tentang keesaan Allah Swt., dan sifat-sifat lainnya, begitu pula keberadaan Muhammad Saw., dan Rasul-rasul pada umumnya serta sifat-sifatnya, serta rukun iman lainnya harus tetap menghunjam kokoh pada diri kita, karena ini bagian dari ibadah yang secara spesifik dimiliki umat Islam. Demikian pula dengan urusan shalat, puasa, haji dan yang lainnya dari rukun Islam, kita harus tetap mengamalkannya, karena ini juga bagian tersendiri yang khas bagi umat Islam sebagai ibadah yang harus kita kerjakan. Kekhususan ini tidak mempengaruhi kita untuk senantiasa berbaur dengan non muslim pada umumnya. Ada banyak isyarat nas tentang motivasi kita dalam kebersamaan tersebut. Di antaranya; tentang semua manusia sama dalam asal kejadiannya, dan bersaudara, kemuliaan diukur dengan ketakwaan (al-Hujrat ayat 13), Penegasan akidah dan ibadah masing-masing pemeluk agama (Q.S. al-Kafirun ayat 1-5), Penegasan bahwa kita semua adalah bersaudara (Pidato Rasul di atas untanya pada saat Hajjatul Wada`), dan lain sebagainya. Semua ini menjadi petunjuk bahwa kita semua dengan tanpa memperhatikan agama dan kepercayaannya harus saling menghargai dan menghormati, bahkan mengakui eksistensinya.

Kenyataan hidup berbangsa dan beragama seperti ini ternyata dijumpai juga di Indonesia. Kita dapat mencontoh prilaku Rasul dalam berintegrasi dengan non muslim pada komunitas muslim di Madinah, dan kita tidak harus mengorbankan akidah dan ibadah kita dalam pembauran tersebut dengan non muslim. Bahkan kita harus menemukan memperjuangkan peluang-peluang yapenganut agama ng legal, elegan, dan toleran dalam pluralitas untuk kemajuan muslim dalam kebersamaan tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut maka landasan teori yang dibangun di atas penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut;

Jargon yang datang dan sering digaungkan oleh warga Nahdlatul Ulama sebagai berikut;

حب الوطن من الإيمان

Cinta tanah air itu adalah sebagaian dari iman.

Teori eksistensialisme yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib. Teori ini mengandung pengertian bahwa kita setuju dan tidak keberatan dengan adanya pluralitas penganut agama di Indonesia ini, tetapi kita harus pastikan bahwa ajaran Islam itu harus eksis di dalamnya. Tidak perlu adanya simbol-simbol keislaman pada setiap even dan dan perwujudan, kita dapat menerima formalistik yang netral, namun ajaran agama harus aterjamin keberlangsungannya bagi umat Islam Indonesia.

C. Metode Penelitian

Sebagaimana dikatakan di atas, bahwa buku ini adalah berasal dari hasil penelirian, maka penelitian yang dilakukan itu tentu memiliki metode penelitian. Oleh karenanya perlu dijelaskan bagaimana metode yang digunakan dalam buku ini.

Jenis Penelitian

Penelitian ini berkategori kepada jenis penelitian kualitatif. Sebagaimana pada umumnya penelitian sosiologis, maka penelitian ini harus dikelompokkan kepada jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk memberikan informasi secara kualitas, karenanya dalam laporan penelitian akan tersimpul temuan yang bersifat normatif kualitatif. Dalam penyajian paparannya penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Dengan demikian penelitian ini akan mendeskripsikan temuan yang ada secara

gambang dan terukur setingkat paparan atau angka dalam makna kualitas.

Sumber Data

Sumber data penelitian yang digunakan dalam buku ini terdiri dari dua macam, yaitu; sumber data primer dan sumber data sekunder.²² Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh secara langsung dari lapangan, terutama bersumber dari ulama ormas Islam Indonesia, juga dari pihak Kementerian Dalam Negeri, Menkumham, Kerpolisian, BIN dan BNPT, serta dari masyarakat. Sementara data skunder akan diperoleh dari sumber yang bervariasi, terutama literatur yang berkenaan dengan masalah ini. Juga wawancara adalah informasi yang diperoleh dari wawancara. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang mendukung data primer, termasuk data hasil pengamatan observasi dan data hasil dokumentasi.

Untuk itu, jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.²³

Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Indonesia secara umum, akan tetapi dalam rangka efisiensi maka lokasi penelitian ini hanya dibatasi pada dua propinsi, yaitu; DKI dan Sumatera Utara. Dengan tetap mengemban prinsip proporsional maka sampel penelitian ini di tentukan hanya terbatas pada ulama yang ada di DKI karena tampuk

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 129.

²³ Noeng Muhadjir, 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakesarasin, h. 2.

(pimpinan pusat) kedua organisasi Islam ini ada di DKI, dengan prinsip adanya struktur organisasi yang bersifat komando maka dapat dipahami bahwa ulama ormas Islam yang ada di Pimpinan Pusatlah yang menentukan warna organisasinya sampai ke bawah dalam merespon setiap isu-isu yang dihadapi. Sementara penentuan Sumatera Utara adalah dengan pemikiran bahwa Sumatera Utaralah sebagai penyanggah dana dan pelaku penelitian ini.

Dengan tetap menghargai pimpinan ormas Islam, namun masyarakat dan Perguruan Tinggi tetap menjadi lapangan dalam penelitian ini. Untuk personal ulama ormas Islam yang ada di tengah masyarakat maka akan mendatangi langsung ke masyarakat, demikian juga dengan ulama Ormas Islam yang di Perguruan Tinggi tetap diambil informasinya ke Perguruan Tinggi. Dengan demikian lokasi penelitian ini, selain Ormas, juga masyarakat dan Perguruan Tinggi.

Informan Penelitian

Informan penelitian ditentukan adalah pimpinan ormas Islam. Sebagaimana layaknya penelitian sosial, maka penentuan pimpinan ormas Islam sebagai informan dalam penelitian ini dinyatakan tidak mutlak, artinya peneliti akan menemukan data sebanyak-banyaknya sampai ke jajaran kepengurusan lainnya sampai dipahami bahwa data itu telah memadai (jenuh). Penentuan seperti ini dalam rangka menerapkan prinsip pengumpulan data lewat teori *snow ball*, artinya dengan tidak ditentukannya informan secara kaku, tetapi data dikumpul sebanyak-banyaknya sampai ke tingkat jenuh barulah penelitian ini dihentikan.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah:
Ulama Nahdatul Ulama (NU), terdiri dari;

1. Pengurus struktural PBNU
2. Pengurus struktural PWNUSU.

3. Intelektual NU yang ada di Perguruan Tinggi

Ulama Muhammadiyah, terdiri dari;

1. Pengurus struktural di PP Muhammadiyah.
2. Pengurus strukturalo PWM SU
3. Intelektual Muhammadiyah yang ada di Perguruan Tinggi

Pemilihan informan penelitian dipilih berdasarkan pengaruh dan perannya dalam menentukan sikap organisasi terhadap persoalan kekinian, demikian juga di masyarakat, dan Perguruan Tinggi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga bentuk, yaitu;

Observasi, dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan, yaitu berupa kegiatan yang membaaur dengan ulama ormas Islam tersebut, baik secara sadar atau pun tidak, mereka yang dijadikan sebagai informan akan dirangsang untuk memberikan perilaku yang sesungguhnya sehingga respon asli dari informan dalam hal ini bisa ditemukan. Dengan demikian teknik pengumpulan data ini menjadi teknik andalan dalam penelitian ini.

Wawancara. Tehnik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

Dokumen. Teknik studi dokumen adalah pengumpulan dan studi terhadap dokumen resmi, baik dokumen internal maupu eksternal organisasi, demikian juga pribadi ulama ormas Islam tersebut. Menurut Sugiyono²⁴ studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode obsevasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif ini akan semakin tinggi jika melibatkan/ menggunakan studi dokumen ini dalam metode penelitian kualitatifnya

Analisis Data

Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah dapat bersifat induktif. Analisis data dalam bentuk ini tentu akan menelusuri peristiwa-peristiwa tertentu untuk dapat diambil kesimpulan secara umum. Selanjutnya, dimungkinkan juga untuk menggunakan teknis analisis adata deduktif, yaitu dengan berkir sebaliknya untuk mengambil kesimpulan dalam analisis data. Data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan tersebut, selanjutnya dicarikan lagi data tambahan secara berulang-ulang sehingga pesan yang ingin ditemukan diperkirakan telah menjadi kesatuan dan keseragaman pada kesimpulan.²⁵

Jadi, uraian tersebut jelaslah: Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif yang bersifat induktif, dan dimungkinkan juga deduktif.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 4 tahapan analisis data kualitatif, seperti yang dikemukakan Miles dan Huberman, yaitu: a) **Reduksi Data**, yakni proses

²⁴ Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, h .83.

²⁵ Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, h .89.

pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah dari catatan-catatan tertulis yang diperoleh dari lapangan.²⁶ b) **Penyajian data**, yaitu menampilkan kembali data dalam bentuk naratif dan pemodelan yang dirancang secara praktis dan mudah dipahami²⁷ c) **Verifikasi data**, yaitu memeriksa kembali proses pengumpulan data, pemaknaan/penafsiran, keteraturan, pola, penjelasan, konfigurasi alur kausal proporsi data.²⁸ Dan d) **Penarikan kesimpulan**, yakni deskripsi dan uraian mengenai temuan lapangan yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian.

Teknik Validasi Data

Validitas data dalam penelitian ini menggunakan teori *trustworthiness*. Hal ini dilakukan adalah untuk menguji kebenaran dan kejujuran subjek dalam mengungkap realitas sesuai dengan apa yang dialami, dirasakan, atau dibayangkan. Analisis triangulasi menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris (sumber data lain yang tersedia).²⁹ Menurut Lincoln dan Guba,³⁰ S.Nasution³¹, dan Moleong³² bahwa untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu yang meliputi derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).

²⁶ Emzir, 2011. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta :Rajawali Pers, h. 129.

²⁷ Hamid Patilima, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV Alfabeta, h. 101.

²⁸ Emzir, *op.cit*, h. 132

²⁹ Rachmat Kriyantono, 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana. H. 71-72.

³⁰ Lincoln dan Guba.1985. *Naturalistic Inquiry*. California: Beverly Hills. h.300. h. 324.

³¹ S.Nasution, 1988. *Metode Penelitian Naturalistik*, Bandung: Tarsito.h. 105.,

³² Lexy J.Moleong, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.h.

1) Uji kredibilitas (*credibility*) atau validitas internal, yaitu uji kepercayaan data hasil penelitian dengan melakukan, antara lain: (a. Perpanjangan pengamatan (masa observasi) (b. Peningkatan ketekunan dalam penelitian c) Triangulasi, yaitu membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda masa dan metode, d) Mengadakan *member check*.

2) Uji validitas eksternal (*transferability*), yaitu menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.

Bab 2

Pemahaman Terhadap Nasionalisme dan Persoalan Kekinian

A. Pengertian Nasionalisme di Negara Indonesia

Pengertian nasionalisme berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, adalah Nasionalisme didefinisikan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu, yakni semangat kebangsaan.¹ Jika ditelusuri, dapat dikatakan bahwa nasionalisme adalah bentuk pengkultusan kepada suatu bangsa atau tanah air yang diimplementasikan dengan memberikan kecintaan atau kebencian kepada seseorang berdasarkan pengkultusan tersebut. Perwujudan itu bisa dalam bentuk berperang dan mengorbankan hartanya demi membela tanah air kendatipun boleh jadi dalam posisi salah, yang secara otomatis akan menyebabkan lemahnya loyalitas kepada agama yang dianutnya, bahkan menjadi loyalitas tersebut bisa hilang sama sekali”.² Hal ini karena sangat berkaitan dengan keyakinan.

Selanjutnya, nasionalisme dalam arti sempit merupakan suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sikap

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 954. Secara sederhana, nasionalisme dapat diartikan sebagai suatu paham yang menganggap kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus disertakan kepada Negara kebangsaan (nation state) atau sebagai sikap mental dan tingkah laku individu maupun masyarakat yang menunjukkan adanya loyalitas dan pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya.

²Ali Yafi', *Ahammiyatul Jihad* (Yogyakarta:Liberty.1993) h. 411.

seperti ini jelas menrendahkan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Keadaan seperti ini sering disebut *chauvinisme*. Adapun dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain.³ Pengertian inilah yang lebih dapat diterima. Merujuk pandangan Hans Kohn, Nasionalisme secara fundamental lahir dari adanya National Counciousness. Dengan perkataan lain nasionalisme adalah formalisasi atau bentuk dan rasionalisasi dari kesadaran nasional berbangsa dan bernegara sendiri. Kesadaran nasional inilah yang membentuk *nation* dalam makna politik, yaitu negara nasional.⁴ Dengan demikian nasionalisme dapat di artikan dengan sebuah paham yang mewujudkan loyalitas berdasarkan kesatuan tanah air, budaya dan suku.

Menurut Jamaluddin Mohammad, nasionalisme adalah konsep modern yang muncul pada abad ke-17, bersamaan dengan lahirnya konsep bangsa-bangsa, di Barat (Eropa), nasionalisme muncul sebagai wujud perlawanan terhadap feodalisme (kekuasaan absolut yang dimiliki pemuka agama dan bangsawan).⁵

Pada umumnya jika ditelaah lewat teori menyebutkan bahwa nasionalisme dan nilai-nilainya berasal dari Eropa. Sebelum abad ke-17, belum muncul satu negara nasional pun di Eropa. Adapun yang ada pada periode itu adalah kekuasaan

³Secara tegas sebenarnya nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan, dengan demikian masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Arti lain dari Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris *nation*) dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia.

⁴Hans Kohn. *Nasionalisme: Arti dan Sejarah* (Erlangga: Jakarta, 1984), h. 5.

⁵Jamaluddin Mohammad, *Nasionalisme Santri*, dalam : Abdullah Ubaid dan Mohammad Bakir, *Nasionalisme Islam Nusantara* (Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2015), h. 16.

kekaisaran-kekaisaran yang meliputi wilayah yang luas, seperti kekuasaan kekaisaran Romawi Kuno atau Kekaisaran Jerman di bawah pimpinan Karolus Agung. Berdasarkan ini, kekuasaan bergandengan tangan dengan gereja Katolik, sehingga masyarakat menerima dan mentaati penguasa yang mereka anggap sebagai titisan Tuhan di dunia. Oleh karena itu, kesadaran akan suatu wilayah atau *territory* sebagai milik suku atau etnis tertentu belum terbentuk di Eropa sebelum abad ke-17.

Kemudian, pada awal abad ke-17 hadirnya perang besar-besaran selama kurang lebih tiga puluh tahun antara suku bangsa-suku bangsa di Eropa. Sebagai contoh, perang Perancis melawan Spanyol, Prancis melawan Belanda, Swiss melawan Jerman, dan Spanyol melawan Belanda, dan sebagainya. Dalam mengakhiri perang ini suku bangsa yang terlibat dalam perang akhirnya sepakat untuk duduk bersama dalam sebuah perjanjian yang diadakan di kota Westphalia di sebelah barat daya Jerman. Selanjutnya, pada tahun 1648 disepakati Perjanjian Westphalia yang mengatur pembagian teritori dan daerah-daerah kekuasaan negara-negara Eropa yang umumnya masih dipertahankan sampai sekarang. Meskipun demikian, negara-bangsa (*nation-states*) baru lahir pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Munculnya, istilah negara bangsa adalah negara-negara yang lahir karena semangat nasionalisme. Semangat nasionalisme yang pertama muncul di Eropa adalah nasionalisme romantis (*romantic nationalism*) yang kemudian dipercepat oleh munculnya revolusi Prancis dan penaklukan daerah-daerah selama era Napoleon Bonaparte.⁶

⁶Wikipedia(2012).NasionalismeIndonesia.Fromhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nasionalisme_Indonesia&oldid=5869847.27 November 2016. Wujud nasionalisme bisa menonjolkan dirinya sebagai sebagian paham negara atau gerakan bukan negara yang populer berdasarkan pendapat warga negara, etnis, budaya, keagamaan dan ideologi. Kategori tersebut lazimnya berkaitan dan umumnya teori nasionalisme mencampurkan sebagian atau semua elemen tersebut.

Terminologi nasionalisme kewarganegaraan (atau nasionalisme sipil) adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya, "kehendakrakyat"; "perwakilan politik". Teori ini mula-mula dibangun oleh Jean-Jacques Rousseaudan menjadi bahan-bahan tulisan. Antara tulisan yang terkenal adalah buku berjudul *Du Contract Sociale* (atau dalam Bahasa Indonesia "Mengenai Kontrak Sosial"). kemudian nasionalisme Romantik (juga disebut nasionalisme organik, nasionalisme identitas adalah lanjutan dari nasionalisme etnis dimana negara memperoleh kebenaran politik secara semula jadi "organik" hasil dari bangsa atau ras; menurut semangat romantisme. Nasionalisme romantik adalah bergantung kepada perwujudan budaya etnis yang menepati idealisme romantik; kisah tradisi yang telah direka untuk konsep nasionalisme romantik. Misalnya "Grimm Bersaudara" yang dinukilkan oleh Herder merupakan koleksi kisah-kisah yang berkaitan dengan etnis Jerman. Nasionalisme Budaya adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan bukannya "sifat keturunan" seperti warna kulit, ras dan sebagainya. Contoh yang terbaik ialah rakyat Tionghoa yang menganggap negara adalah berdasarkan kepada budaya. Unsur ras telah dibelakangkan di mana golongan Manchu serta ras-ras minoritas lain masih dianggap sebagai rakyat negara Tiongkok. Kesediaan dinasti Qing untuk menggunakan adat istiadat Tionghoa membuktikan keutuhan budaya Tionghoa. Malah banyak rakyat Tawan menganggap diri mereka nasionalis Tiongkok sebab persamaan budaya mereka tetapi menolak RRC karena pemerintahan RRC berpaham komunisme.⁷

Berdasarkan pandangan Prof. Hans Kohn, seorang pakar sejarah terkemuka abad ini, mengatakan bahwa paham

⁷Wikipedia(2012).NasionalismeIndonesia.Fromhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nasionalisme_Indonesia&oldid=5869847 . 27 november 2016.

yang tumbuh dalam masyarakat dan memiliki empat ciri khas yaitu:

1. Kesetiaan tertinggi individu diserahkan kepada Negara kebangsaan.
2. Dengan perasaan yang mendalam akan suatu ikatan yang erat dengan tanah tumpah darahnya.
3. Perasaan yang mendalam dengan tradisi-tradisi setempat, dan,
4. Kesetiaan dengan pemerintah yang resmi.⁸

Selanjutnya, Snyder membedakan empat jenis nasionalisme, yaitu:

1. Nasionalisme revolusioner, (terjadi di Perancis pada akhir abad ke18). Untuk negeri yang dikatakan memiliki nasionalisme revolusioner, ketika elite politik sangat berkeinginan untuk melakukan demokratisasi, tapi lembaga perwakilan yang ada jauh dari memadai untuk mengimbanginya.
2. Nasionalisme kontrarevolusioner, (terjadi di Jerman sebelum Perang Dunia I). Negeri yang bernasionalisme kontrarevolusioner, para elite politiknya menganggap diri selalu benar dan untuk itu lewat lembaga perwakilan yang ada, mereka menyerang pihak yang mereka anggap sebagai musuh atau melawan kepentingan mereka.
3. Nasionalisme sipil, (merujuk pada perkembangan di wilayah Britania dan Amerika hingga sekarang). Suatu negeri dikatakan memiliki nasionalisme sipil ketika ia memiliki lembaga perwakilan yang kuat, dan juga para elite politiknya memiliki kelenturan dalam berdemokrasi.
4. Nasionalisme SARA (diterjemahkan dari kata ethnic nationalism) (terjadi di Yugoslavia atau Rwanda).SARA

⁸ Dede Rosyada, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Prenada Media : Jakarta Timur, 2003) h.32.

di sini merujuk pada akronim zaman Orde Baru, yakni suku, agama, ras, dan antar golongan, yang sering kali justru ditabukan untuk dibicarakan dalam negeri yang sangat plural ini. Dapat dikatakan nasionalisme SARA jika para elite politik negara tersebut tidak menganut paham demokrasi, dan mengekspresikan kepentingannya hanya untuk membela satu kelompok tertentu lewat lembaga-lembaga perwakilan yang ada. Snyder memilah empat jenis nasionalisme tersebut dan Ia membedakannya dari interseksi kuat atau lemahnya lembaga perwakilan politik, dan lentur atau tidak lenturnya kepentingan elite politik terhadap demokrasi.⁹

Adapun nasionalisme Indonesia pada awalnya muncul sebagai jawaban atas kolonialisme. Pengalaman penderitaan bersama sebagai kaum terjajah melahirkan semangat solidaritas sebagai satu komunitas yang mesti bangkit dan hidup menjadi bangsa merdeka. Semangat tersebut oleh para pejuang kemerdekaan dihidupi tidak hanya dalam batas waktu tertentu, tetapi terus-menerus hingga kini dan masa mendatang. Salah satu perwujudan nasionalisme adalah dibentuknya Boedi Oetomo pada tahun 1908, yang menjadi awal kebangkitan nasionalisme bangsa Indonesia oleh kaum cendekiawan.

Selain berdirinya Boedi Oetomo, yang menjadi tonggak perwujudan rasa nasionalisme bangsa Indonesia adalah semangat Sumpah Pemuda 1928. Nasionalisme yang bertekad kuat tanpa memandang perbedaan agama, ras, etnik, atau bahasa.¹⁰

⁹ Deliar Noer, *Nasionalisme*, (Majalah) Gatra, terbit 11 Nopember 1995, h. 76.

¹⁰ Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik-Politik Indonesia* (Jakarta : PT.Gramedia,1978).h. 64.

Terminologi integrasi nasional di Indonesia, dapat dikatakan bahwa persatuan dan kesatuan terasa begitu sangat indah. Dilihat dari ungkapan kata dapat membayangkan kehidupan di dalamnya akan sangat penuh dengan kebahagiaan, ketenangan dan saling bersatu. Inilah yang selalu di dambakan dan diimpikan oleh masyarakat Indonesia sampai saat ini.¹¹ Dalam kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia masa kini, rasa persatuan dan kesatuan Indonesia bisa mulai berkurang, warga lebih mementingkan kepentingan individu dari pada kepentingan bersama. Kebersamaan itu sebenarnya sebagai wujud bahwa warga negara yang benar-benar bersatu.

Sebagai contoh bahwa persatuan dan kesatuan terasa berkurang dapat dilihat di dalam masyarakat. Partai-partai politik yang terdapat di Indonesia sangatlah banyak, partai-partai itu saling berebut untuk mendapatkan posisi yang paling tinggi dengan cara apapun, dari sini dapat memicu suatu konflik dan kegaduhan massa dalam kehidupan masyarakat. Misalnya satu partai melaksanakan kampanye disuatu daerah, kemudian di daerah tersebut pendukung partai ini boleh jadi hanya sepertiga dari masyarakat di daerah itu. Pada saat ada pendukung partai itu melakukan suatu kegiatan yang dipandang oleh masyarakat kurang menyenangkan maka kemungkinan terjadi konflik, adalah hal bisa saja terjadi bahkan mungkin akan menimbulkan korban.

Selain itu, sifat kedaerahan yang berlebihan yang dianut oleh warga sebenarnya juga, bisa jadi penyebab dari tidak terwujudnya rasa persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa. Warga hanya selalu membanggakan daerahnya masing-masing, selalu hanya membela daerahnya apabila ada masalah, namun

Integrasi nasional yang dimaksud disini adalah kesatuan dan persatuan negara. Melihat keadaan dan kondisi dari Indonesia dewasa ini, integrasi nasional tidak bisa diwujudkan dengan mudah atau seperti membalikkan telapak tangan, ini semua disebabkan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri.¹¹

apabila negara dalam masalah warga hanya dapat mengatakan bahwa itu urusan pemerintah. Inilah yang perlu diperbaiki dari sikap dan mental warga bangsa, bahwa urusan negara bukan hanya urusan pemerintah namun juga merupakan tanggung jawab bersama sebagai masyarakat bangsa Indonesia.

Dengan demikian, maka nasionalisme merupakan wujud cinta tanah air yang wujud dari kesamaan pandangan suatu bangsa yang hidup bersama dalam suatu negara. Nasionalisme sepatutnya tidak untuk diartikan sebagai fanatisme terhadap sistem ataupun ideologi dari negara yang dampaknya adalah pandangan kesetaraan antara landasan agama dan ideologi suatu negara, oleh karna itu terdapat beberapa faktor yang dapat melahirkan nasionalisme. Di antara faktor yang melahirkan nasionalisme adalah:

Suku bangsa, daerah, bahasa, dan adat istiadat tidak hanya membentuk tindakan dan perilaku politik tetapi juga melahirkan persepsi bersama tentang masyarakat dan negara yang dicita-citakan. Agama dan kepercayaan, kesamaan agama dan ideologi yang menjadi doktrin kuat dan sakral turut membangun nasionalisme. Kepemimpinan tokoh karismatik yang disegani dan dihormati masyarakat dapat menjadi pemersatu bangsa. Masyarakat dapat mengidentifikasi diri kepada tokoh tersebut, terutama pada masyarakat yang tengah berupaya membebaskan diri dari belenggu penjajahan.

Faktor hisoris, Asali-usul keturunan, nenek moyang dan pengalaman sejarah masa lalu, seperti persamaan dalam penderitaan, tidak hanya melahirkan solidaritas, tetapi juga melahirkan tekad yang sama antar kelompok masyarakat.

Kebhinekaan, kesetiaan warga masyarakat terhadap negara akan melahirkan nasionalisme, yaitu bersatu dalam perbedaan. Pemersatu ini diyakini akan mendatangkan

kehidupan yang lebih manusiawi, tanpa menghilangkan perbedaan ikatan pada substruktur tersebut.

Ekonomi, perkembangan akan melahirkan spesialisasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kelembagaan, dalam pembentukan lembaga seperti birokrasi, angkatan bersenjata dan parpol solidaritas memegang peranan. Birokrasi pemerintahan memberikan sumbangan dalam mempertemukan berbagai kepentingan dikalangan penduduk sehingga tersusun suatu kepentingan nasional, yang tidak membedakan pelayanan masyarakat.¹²

B. Nasionalisme Indonesia Menurut Islam

Dalam ajaran Islam ternyata membolehkan nasionalisme, dengan kata lain di dalam Islam diakui kesatuan agama dan negara. Bukankah telah diketahui bahwa antara kehidupan rohaniah dengan kehidupan jasmaniah di dalam suatu masyarakat merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, hal ini tergambar dalam pengaruh-pengaruh agama dalam kehidupan masyarakat. Bagi kaum muslimin negara bukanlah suatu lembaga atau institusi tersendiri yang menjadi tujuan. Dengan persatuan Agama dengan negara yang dimaksudkan, negara, bukanlah suatu tujuan, tetapi sebuah alat. Urusan keagamaan pada dasarnya adalah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan. Sebab yang menjadi tujuan dalam Islam adalah kesempurnaan berlakunya undang-undang Ilahi, baik yang berkenaan dengan kemanusiaan sendiri (sebagai individu), maupun sebagai anggota dari masyarakat. Baik yang berkenaan dengan kehidupan yang fana ini maupun kehidupan yang berkenaan dengan kehidupan kelak di alam akhirat.

¹²Baca lebih lanjut, Ruslan Abdul Gani. *Sejarah Perkembangan Islam Indonesia* (Jakarta: Pustaka Indonesia, 1982), h. 50-60.

Dalam ajaran Islam yang meliputi semua kaedah-kaedah ibadah, batas-batas (*budud-budud*) *muamalah* dalam masyarakat, adalah telah ditetapkan oleh Islam secara lengkap. Semua aturan-aturan tersebut sudah terhimpun dalam Alquran dan Hadis. Tetapi Alquran dan Hadis itu merupakan doktrin universal yang saat ini termaktub dalam bentuk tertulis, tidak bisa diimplementasikan kecuali umat Islam melakukannya termasuk menjaga supaya peraturan-peraturannya itu dijalankan oleh manusia. Oleh karena itu untuk menjaga agar aturan-aturan dan ketetapan-ketetapan itu dapat berlaku dan berjalan sebagaimana mestinya, perlu ada suatu kekuatan dalam *muamalah* berupa kekuasaan dalam negara, sehingga umat Islam harus memiliki nasionalisme dengan cara memilih pemimpin yang baik.

Suatu negeri yang pemerintahannya tidak mepedulikan keperluan rakyat, membiarkan rakyat bodoh dan dungu, tidak memenuhi keperluan hidup warganya, terutama kebutuhan primer, bahkan pejabatnya atau pemerintahnya menindas rakyat dengan memakai Islam sebagai kedok, juga pejabatnya suka melakukan maksiyat, maka pemerintahan yang semacam itu bukanlah merupakan pemerintahan Islam.

Ajaran Islam tidak tidak membiarkan orang menyerahkan sesuatu urusan kepada orang yang bukan ahlinya. Bahkan Islam mengancam akan datang kerusakan dan bala bencana bila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Berdasarkan ini, maka inti dari nasionalisme dalam Islam adalah hakikat kekuasaan. Dalam Islam kekuasaan politik, bersifat adiduniawi dan adimanusiawi, berasal dari alam gaib atau termasuk mesti merujuk nilai-nilai Illahiyah. Karena orang berkuasa karena diizinkan oleh Allah swt.

Nasionalisme dalam tinjauan sudut Islam, hal ini berdasarkan Aluran, Allah berfirman dalam Alquran surat Mumtahanah ayat 8:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8)

Artinya :

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”

Ayat tersebut di atas memberi ketentuan umum dan prinsip agama Islam dalam menjalin hubungan dengan orang-orang yang bukan Islam dalam satu negara. Kaum muslimin diwajibkan bersikap baik dalam bergaul dengan orang-orang kafir, selama orang-orang kafir itu bersikap dan ingin bergaul baik dengan kaum muslimin.

Jadi ada satu prinsip yang perlu diingat dalam hubungan orang Islam dengan orang-orang kafir yaitu : “Boleh mengadakan hubungan baik, selama pihak yang bukan islam melakukan yang demikian pula. Hal ini hanya dapat dibuktikan dalam sikap dan perbuatan kedua belah pihak. Di Indonesia prinsip ini dapat dilakukan, selama tidak ada pihak agama lain bermaksud memrtadkan Islam atau menghancurkan Islam dan kaum muslimin.

Berdasarkan ayat tersebut juga, dapat disimpulkan bahwa nasionalisme memang menjadi sebuah anjuran dalam Islam karena hal itu juga merupakan bagian dari saling menghormati dan menjaga keadilan hak sesama manusia yang dilahirkan dalam satu wilayah tanah air. Selain itu nasionalisme dapat diartikan sebagai pengabdian secara utuh terhadap tempat atau negara kelahiran yang telah memberikan kehidupan lewat

sumber daya alamnya. Nasionalisme merupakan bagian dari pengabdian terhadap negara dengan cara berjuang secara langsung ketika negara mendapatkan ancaman ataupun pembelaan lewat tutur kata, perbuatan dan sikap. Nasionalisme bukanlah bentuk pengabdian dan penyembahan terhadap ideologi bangsa dan bukan juga bentuk mempersamakan antara ideologi dengan landasan agama (Alquran dan al-Hadis). Nasionalisme menjadi sebuah kewajiban yang mutlak dimiliki setiap manusia dari golongan manapun, untuk menunjukkan rasa syukur atas karunia Tuhan berupa tempat tinggal, tempat lahir dan tempat berteduh yang sama, seperti di Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan nasionalisme adalah denganantisipasi pengaruh negatif globalisasi terhadap nilai nasionalisme. Maka perlu diantisipasi agar nasionalisme terus langgeng. Adapun langkah- langkah untuk mengantisipasi dampak negatif globalisasi terhadap nilai- nilai nasionalisme antara lain yaitu:

Memotivasi dan menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misal semangat mencintai produk dalam negeri. Menanamkan dan mengimplementasikan nilai- nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya.

Menanamkan dan mengamalkan ajaran agama dengan sebaik- baiknya. Mewujudkan supremasi hukum, meaplikasikan dan menegakkan hukum dalam arti sebenar- benarnya dan seadil- adilnya. Selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya bangsa.

Akhirnya, yang dikatakan Nasionalisme Indonesia adalah jiwa bangsa Indonesia yang akan terus melekat selama bangsa Indonesia masih ada. Nasionalisme pada hakekatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap

pihak lain, baik itu orang per-orang, kelompok-kelompok dalam masyarakat, maupun suatu bangsa. Nasionalisme tidak membeda-bedakan baik suku, agama, maupun ras.

C. Persoalan Kekinian dan Hubungannya Dengan Nasionalisme

Selama perjalanan bangsa Indonesia, nasionalisme menunjukkan identitasnya pada derajat integrasi tertentu. Nilai-nilai baru tidak akan menggoncangkan nasionalisme itu sendiri selama pendukungnya yaitu bangsa Indonesia tetap mempunyai sense of belonging, artinya memiliki nilai-nilai baru yang disepakati bersama. Nasionalisme pada hakekatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per-orang, kelompok-kelompok dalam masyarakat, maupun suatu bangsa. Nasionalisme tidak membeda-bedakan baik suku, agama, maupun ras.¹³

Pemberantasan korupsi terhadap para koruptor kelas kakap dan penegakan hukum dan keadilan yang sebenarnya sebagai sarana strategis untuk membangkitkan semangat cinta tanah air dalam diri anak-anak bangsa, tetapi semuanya tampak bohong belaka. Ini membuat generasi sekarang menjadi gamang terhadap bangsa dan negaranya sendiri. Sehingga di berbagai daerah muncul gerakan-gerakan separatis yang ingin memisahkan daerahnya terhadap negara Indonesia. Tidak mengherankan semangat solidaritas dan kebersamaan pun

¹³Mulai mudarnya nasionalisme di Indonesia seperti, kurangnya rasa kebanggaan bagi bangsa selama beberapa tahun belakangan ini, sesungguhnya disulut oleh menguatnya sentimen kedaerahan dan semangat primordialisme pasca krisis, termasuk paham keagamaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Suatu sikap masyarakat yang mungkin sedikit banyak disebabkan oleh kekecewaan sebagian besar anggota dan kelompok masyarakat bahwa kesepakatan bersama (*contract social*) yang mengandung nilai-nilai seperti keadilan dan perikemanusiaan dan musyawarah kerap hanya menjadi retorika kosong.

terasa semakin hilang sejak beberapa dekade terakhir. Boleh jadi, penyebab dari memudarnya rasa nasionalisme ini juga disebabkan oleh karena paradigma tentang bangsa dan nasionalisme yang kita anut, berjalan di tempat. Selain itu, paham keagamaan yang terpengaruh dari luar, terutama paham keagamaan Islam yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia. Ada sebagian warga masyarakat memiliki paham keagamaan yang fanatik, terhadap keyakinannya, yang khususnya boleh jadi dari para alumnus Timur Tengah yang menganggap Islam harus dikembalikan sebagaimana wujudnya pada masa Rasul saw., sehingga nasionalisme tidak diperlukan tetapi apa yang disebut dengan khilafah yang tidak dipengaruhi oleh teritorial suatu negara.

Harapan atau asa nasionalisme dan patriotisme sangatlah penting, baik dikalangan orang dewasa, remaja maupun di kalangan anak-anak. Bahkan rasa nasionalisme dikalangan anak-anak dapat saja memudar karena faktor internal dan juga faktor eksternal.

Adanya persoalan penyebab memudar atau lunturnya nasionalisme dikalangan anak atau kalangan milenial ditinjau dari faktor Internal, di antaranya;

Pemerintahan pada zaman reformasi yang jauh dari harapan para anak, sehingga membuat mereka kecewa pada kinerja pemerintah saat ini. Terkuaknya kasus-kasus korupsi, penggelapan uang negara, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat negara membuat para pemuda enggan utk memerhatikan lagi pemerintahan.

Sikap keluarga dan lingkungan sekitar yang tidak mencerminkan rasa nasionalisme & patriotisme, sehingga para anak meniru sikap tersebut. Para anak merupakan peniru yg baik terhadap lingkungan sekitarnya.

Demokratisasi yg melewati batas etika dan sopan santun dan maraknya unjuk rasa, telah menimbulkan frustrasi di kalangan anak & hilangnya optimisme, sehingga yg ada hanya sifat malas, egois & emosional.

Tertinggalnya Indonesia degan negara-negara lain dalam segala aspek kehidupan, membuat para pemuda tidak bangga lagi menjadi bangsa Indonesia.

Timbulnya etnosentrisme yg menganggap sukunya lebih baik dari suku-suku lainnya, membuat anak lebih mengagungkan daerah atau sukunya daripada persatuan bangsa. Selanjutnya faktor eksternal terjadinya luntarnya nasionalisme adalah :

- a. Cepatnya arus globalisasi yg berimbas pada moral pemuda. Mereka lebih memilih kebudayaan negara lain, dibandingkan dengan kebudayaanya sendiri, sebagai contohnya para pemuda lebih memilih memakai pakaian minim yang mencerminkan budaya barat dibandingkan memakai batik atau baju yang sopan yang mencerminkan budaya bangsa Indonesia.
- b. Para pemuda kini dikuasai oleh narkoba dan minuman keras, sehingga sangat merusak martabat bangsa Indonesia.
- c. Paham liberalisme yang dianut oleh negara-negara barat yang memberikan dampak pada kehidupan bangsa. Anak cenderung meniru paham libelarisme, seperti sikap individualisme yang hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan keadaan sekitar dan sikap acuh tak acuh pada pemerintahan.

Seiring berkembangnya zaman, rasa nasionalisme kian memudar. Hal ini dibuktikan dari berbagai sikap dalam memaknai berbagai hal penting bagi Negara Indonesia.

Contoh sederhana yang menggambarkan betapa kecilnya rasa nasionalisme, diantaranya :

- a. Pada saat upacara bendera, masih banyak rakyat yang tidak memaknai arti dari upacara tersebut. Upacara merupakan wadah untuk menghormati dan menghargai para pahlawan yang telah berjuang keras untuk mengambil kemerdekaan dari tangan para penjajah. Para pemuda seakan sibuk dengan pikirannya sendiri, tanpa mengikuti upacara dengan khidmad.
- b. Pada peringatan hari-hari besar nasional, seperti Sumpah Pemuda, hannya dimaknai sebagai serermonial dan hiburan saja tanpa menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme dalam benak mereka.
- c. Lebih tertariknya masyarakat terhadap produk impor dibandingkan dengan produk buatan dalam negeri, lebih banyak mencampurkan bahasa asing dengan bahasa Indonesia untuk meningkatkan gengsi, dan lain-lain.
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat “hanya” untuk me pasang bendera di depan rumah, kantor atau pertokoan. Dan bagi yang tidak mengibarkannya mereka punya berbagai macam alasan entah benderanya sudah sobek atau tidak punya tiang bendera, malas, cuaca buruk, dan lain-lain. Mereka mampu membeli sepeda motor baru, baju baru tiap tahun yang harganya ratusan bahkan jutaan namun mengapa untuk bendera merah putih yang harganya tidak sampai ratusan saja mereka tidak sanggup?

Semua identitas bangsa Indonesia baik itu bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lain sebagainya hanyalah merupakan simbol, simbol bahwa negara Indonesia masih berdiri tegak dan mampu mensejajarkan dirinya dengan bangsa lain. Bagaimana bias bangga menjadi bangsa ini jika masyarakat malas dan malu memakai atribut

bangsa Indonesia ini. Jika ditinjau dari sudut pandang, gejala ini mulai terlihat sejak era reformasi karena pada masa orde baru, pemasangan bendera adalah sesuatu yang bersifat wajib. Sejak era reformasi, animo masyarakat untuk turut andil dalam memeriahkan Dirgahayu RI juga berkurang.

Pada masa sekarang ini sudah sulit ditemukan perlombaan-perlombaan 17-an. Padahal pada masa orde baru, suasana 17-an telah dirasakan sejak awal Agustus. Perlombaan 17-an merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya dan sudah menjadi budaya baru di negara ini. Melalui kegiatan ini dapat ditanamkan nilai-nilai nasionalisme ke dalam diri generasi muda yang nantinya menjadi penerus bangsa. Contoh, dalam permainan panjat pinang yang paling sulit diraih adalah bendera dan harus melalui usaha keras untuk mendapatkannya. Dari hal kecil tersebut terkandung nilai pembelajaran yang sangat tinggi yaitu untuk merebut kemerdekaan, para pahlawan berjuang mati-matian tanpa mengenal lelah dan tentunya disertai dengan rasa keikhlasan hati. Terakhir, hal yang paling ironis adalah bangsa ini pada kenyataannya kurang menghargai jasa-jasa para pahlawan yang masih hidup hingga sekarang. Mereka yang dahulu telah mengorbankan segalanya untuk kemerdekaan Indonesia justru mendapatkan imbalan berupa kehidupan yang tidak layak disisa umur mereka. Padahal dapat dibayangkan apabila dahulu para pahlawan tidak mau berjuang, pastinya Indonesia masih dalam penjajahan bangsa asing.

Pada dasarnya nasib warga bangsa saat sekarang masih lebih baik dan beruntung daripada para pejuang dulu, warga sekarang hanya meneruskan perjuangan mereka tanpa harus mengorbankan nyawa dan harta. Nasionalisme warga semakin luntur dan akankah punah tergilas modernisasi dan individualis. Masih banyak bentuk nasionalisme lain yang dapat dirasakan semakin memudar. Kurangnya kecintaan bangsa

terhadap produk dalam negeri dan merasa bangga kalau bisa memakai produk luar negeri. Kegilaan bangsa Indonesia berkunjung ke luar negeri padahal negeri sendiri belum tentu dijelajahi. Bangsa Indonesia belum tersadar betul bahwa lambat laun sikap-sikap seperti itu akan semakin menjauhkan kecintaannya kepada negerinya sendiri.

Rasa nasionalisme bangsa pada saat ini hanya muncul bila ada suatu faktor pendorong, seperti kasus pengklaiman beberapa kebudayaan dan pulau-pulau kecil Indonesia, seperti Sipadan, Ligitan, serta Ambalat oleh Malaysia beberapa waktu yang lalu. Namun rasa nasionalisme pun kembali berkurang seiring dengan meredanya konflik tersebut. Pada kasus GAM, jarang dari masyarakat yang bersedia menjadi sukarelawan untuk membantu menumpas pemberontakan GAM, demikian juga OPM di Papua. Tetapi manakala rakyat Irak, Yaman, dan Palestina diserang oleh Amerika Serikat, banyak orang menangis dan mengumpulkan dana serta menjadi relawan untuk membantu rakyat Irak Yaman, dan Palestina. Namun, ketika rakyat Aceh disakiti, disiksa, diperas dan dibunuh oleh GAM, atau rakyat Papua tersakiti oleh OPM tidak terlihat adanya kelompok yang menangis dan berusaha untuk menjadi relawan dalam membantu menyelesaikan masalah Aceh dan Papua. Hal tersebut merupakan cerminan betapa lunturnya rasa nasionalisme yang dimiliki bangsa ini. Berbeda halnya ketika zaman penjajahan. Haruskah Indonesia dijajah kembali supaya rasa nasionalismenya menjadi tumbuh dan berkembang serta bersatu untuk dapat meraih kehormatan dan kemerdekaannya kembali? Tentu hal ini tidak diinginkan, karena dijajah adalah penderitaan.

Begitu juga masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya terlihat betapa lunturnya nilai-nilai luhur bangsa ini yang tercermin baik dalam orasinya, spanduk/poster yang dibentangkan maupun tingkah laku yang tidak santun. Pernah terjadi

pada suatu peristiwa demonstrasi, mereka menginjak injak dan membakar gambar/foto presiden yang nota bene sebagai lambang negara dan harus dihormati oleh seluruh anak bangsa.

Selanjutnya era globalisasi juga membawa pengaruh negatif terhadap nilai-nilai nasionalisme di Indonesia, hal ini antara lain:

1. Hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri (seperti Mc Donald, Coca Cola, Pizza Hut, dll.) membanjiri di Indonesia. Dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri menunjukkan gejala berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat kita terhadap bangsa Indonesia.
2. Masyarakat kita khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia, karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat yang oleh masyarakat dunia dianggap sebagai kiblat.
3. Mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang tajam antara yang kaya dan miskin, karena adanya persaingan bebas dalam globalisasi ekonomi. Hal tersebut dapat menimbulkan pertentangan antara yang kaya dan miskin yang dapat mengganggu kehidupan nasional bangsa.
4. Munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian antarperilaku sesamawarga. Dengan adanya individualism maka orang tidak akan peduli dengan kehidupan bangsa.

D. Persoalan Kekinian yang Merusak Nasionalisme Indonesia

Penduduk Indonesia, mayoritasnya adalah beragama Islam, ini adalah menjadi fakta yang tak terbantahkan. Oleh karenanya, para pengamat baik dalam maupun luar negeri,

memberikan perhatian yang lebih kepada umat Islam, ketika mereka membuat penelitian dalam hal nasionalisme. Salah satu lembaga, yang bernama Isma Institute, memberikan pandangan adanya salah satu paham yang dapat merusak nasionalisme adalah masuknya paham wahabi dari Timur Tengah yang masuk ke Indonesia berubah dengan nama salafi, menurutnya setiap paham karakteristik tertentu.

Karakteristik pemikiran wahabi adalah memiliki sikap yang keras, mudah menuduh bid'ah, kafir, tidak toleran, kaku, pemahaman yang sempit/literal terhadap teks suci. Mereka sangat mengecam kaum muslim yang melakukan *tawasul* (doa dengan perantara), merayakan maulid Nabi, dan tasawuf. Pergolakan ekspansi wahabi tidak hanya sebatas semenanjung Arabia saja, tapi juga merembet ke Nusantara. Di Indonesia tidak hanya tanahnya yang subur, berbagai ideologi pun ikut tumbuh subur, termasuk wahabi. Bentuk keterpengaruhannya itu sudah muncul pada abad ke XIX yaitu dari ulama-ulama nusantara yang belajar di Makkah. Pada masa itu, kota Makkah sudah dikuasai oleh wahabi. Semua ilmu-ilmu keislaman bercorak ala wahabi. Sehingga, menurut Islam Institute, setiap orang yang belajar di sana langsung-tak langsung akan dirasuki oleh **virus wahabi**. Menurut mereka, contoh yang paling menarik adalah perang padri di Sumatra Barat pada tahun 1803 yang terlanjur dianggap sebagai pembaruan Islam minangkabau. Yaitu peperangan antara kaum padri (ulama wahabi) dengan kaum adat. Peperangan ini dilatarbelakangi pulangnya 3 orang ulama yang belajar di Makkah yaitu Haji Miskin dkk (jelas mereka sudah terkontaminasi dengan virus wahabi), bergabung dengan ulama setempat. Mereka melakukan perlawanan terhadap kerajaan Pagaruyung, karena perilaku-prilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam semakin tumbuh di sana seperti perjudian, sabung ayam dll. Tidak hanya sebatas itu, budaya/tradisi minangkabau pun ikut dipermasalahkan, yaitu sistem matrilineal yang sudah lama ada di minangkabau.

Dalam peperangan tersebut, kaum padri berhasil mengalahkan kerajaan pagaruyuang. Tidak bisa dibayangkan kejamnya ulama yang membunuh saudaranya sesama muslim. Hal ini sama dengan kekerasan wahabi ketika menaklukkan makkah, dimana ulama yang tidak mau menganut paham mereka dibunuh dengan ganas dan mengenaskan.

Selanjutnya, hingga saat ini, penyebaran virus wahabi berkembang sangat pesat. Arab Saudi memiliki dana yang besar dalam mendiasporakan ideology wahabi. Seperti melalui beasiswa untuk belajar di sana, media, percetakan dan lembaga pendidikan. Mahasiswa yang telah selesai mengenyam Ilmu di sana, pulang dengan membawa ajaran wahabi. Melalui dakwah mereka mulai mempermasalahkan yang mestinya tidak perlu dipermasalahkan, menebarkan kebencian dan permusuhan pada kelompok yang berbeda dengan ajaran mereka, gemar menuduh umat Islam yang tak sejalan dengan mereka dengan tuduhan kafir, syirik dan ahli bidah. Itulah ucapan yang selalu didengarkan di setiap kesempatan dakwah mereka.

Kemudian, merembaknya virus wahabi di Indonesia, dapat berdampak negative terhadap stabilitas Negara. Di Indonesia mereka tidak memakai nama wahabi, akan tetapi *salafi*. Masyarakat dapat menyaksikan menjamurnya kelompok-kelompok radikal-ekstrem seperti ini. eksistensi mereka diduga akan merusak kebhinekaan bangsa. penulis tidak mengatakan wahabi satu-satunya sebagai perusak stabilitas bangsa, namun boleh dikatakan penyebab salah satu diantaranya.

Ideologi bangsa Indonesia boleh jadi tinggal naman. jikaz sila ketuhanan yang menjadi fondasi bangsa Indonesia telah digorgoti oleh mereka, sehingga setiap orang yang dirasuki virus tersebut akan mengalami misorientasi dari nilai-nilai pancasila. Mereka tidak lagi beradab, mengikis persatuan

bangsa, ketidakmufakatan dalam permusyawaratan dan kesalahan perwakilan. Sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mestinya pemerintah memiliki peran besar untuk melakukan pembinaan atau pencerahan terhadap warganya yang boleh jadi memiliki paham menyimpang atau tidak sesuai dengan ideologi bangsa.

Tantangan ini tidaklah hanya untuk pemerintah, namun seluruh rakyat Indonesia. Merupakan suatu keniscayaan bagi bangsa untuk mendakwahkan Islam yang toleran dan ramah lingkungan. Kemudian melakukan rasionalitas agama dalam upaya mendewasakan spritualitas bangsa. Hal yang esensi dalam pancasila adalah gotong royong yang sekaligus sebagai karakteristik bangsa Indonesia dalam membangun bumi nusantara. Tantangan yang kedua adalah menjaga semangat kebangsaan atau nasionalisme Indonesia.¹⁴

Jadi, nasionalisme dapat menjadi pemersatu bangsa dan juga pemecah suatu bangsa. Nasionalisme dapat menyatukan bangsa apabila seluruh warga negara mencintai bangsanya. Namun dapat menjadi pemecah bangsa apabila ada pihak yang lebih mementingkan etnis, agama atau kelompoknya dibandingkan negara tersebut. Contohnya apabila etnis Jawa lebih mementingkan etnisnya dibandingkan bangsa Indonesia itu sendiri. Nasionalisme juga berperan sebagai ideologi dan identitas. Ideologi berarti sebagai pedoman bagi warga negara agar memiliki nasionalisme. Jika seorang warga negara tidak memiliki sikap nasionalisme maka sama saja ia tidak memiliki identitas dan tidak akan diakui oleh dunia internasional.

Nasionalisme berperan dalam suatu negara karena nasionalisme memperkenalkan identitas negara serta sebagai tali pengikat antara jati diri bangsa dengan warga negaranya.

¹⁴<https://islam-institute.com/virus-wahabi-dan-penggerogotannya-terhadap-asionalismeindonesia>

Dalam memenuhi kepentingannya, negara membutuhkan nasionalisme sebagai landasan. Selain berperan dalam mempertahankan jati diri bangsa, nasionalisme turut memiliki peranan besar dalam globalisasi. Globalisasi dapat menyatukan sebuah bangsa dengan nasionalismenya untuk memperkenalkan jati diri dan identitas bangsa serta memajukan negaranya di kancah dunia, itulah mengapa nasionalisme memiliki peranan penting dalam kancah internasional. Dasar untuk berinteraksi antar negara satu dengan yang lain adalah nasionalisme. Seseorang akan menjunjung dan bangga akan identitas negaranya, dimana seluruh sektor kehidupan baik dalam aspek politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya.

Bangsa dan nasionalisme berfokus pada nilai-nilai kebudayaan bangsa secara menonjol dan termasuk bahasa di dalamnya. Dalam tujuan-tujuan politik, nasionalisme dapat menjadi alasan untuk mencapai kepentingan aktor-aktor politik. Dengan menggunakan alasan nasionalisme, pada umumnya masyarakat awam akan tergerak untuk bersama membantu sang aktor menggapai kepentingannya. Terlepas dari pada efek negatif karena kepentingan tersebut ialah kepentingan pribadi aktor tersebut ataupun efek positif dari kepentingan tersebut.

Nasionalisme dapat menjadi ekspansionis dan mendorong perluasan wilayah negara yang ada. Secara harfiah, nasionalisme memiliki arti sebagai suatu perasaan mencintai bangsa dan negara dari seluruh aspek yang ada. Perasaan cinta negara bukanlah masalah pribadi, melainkan untuk diserahkan kepada pilihan individu: jika individu tidak aktif mencintai negara tempat ia berada dan tinggal, maka ia harus meninggalkannya atas kemauan sendiri atau dibuang dari negara ia berasal.

Nasionalisme bersangkutan dengan politik dan merupakan sikap yang didukung oleh tubuh doktrin-doktrin dalam

suatu negara. Suatu klaim moral yang abstrak menyatakan bahwa setiap anggota bangsa memiliki kewajiban yang kuat untuk mempromosikan budaya, bekerja untuk pemeliharaan, dan menghadiri kemurniannya, menjadi bahasa emosional untuk melakukan suatu tindakan dengan segera. Nasionalisme lebih dari sekedar pola perilaku individu dan kolektif, namun meliputi, mengatakan, memperjuangkan kemerdekaan, dan tindakan sosial dan budaya lainnya seperti kecenderungan untuk berbaur dengan kerabat sendiri ataupun etnis seseorang. Jadi, persoalan adanya paham-paham yang datangnya berasal dari luar Indonesia, bisa dibendung dengan nilai nasionalisme yang ditanamkan sejak anak-anak, lewat bangku sekolah, di rumah tangga dan lingkungannya. Nasionalisme bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kewajiban semua warga dan komponen bangsa Indonesia. Sebab, nasionalisme merupakan identitas bagi setiap individu agar dapat diakui baik dalam negara tersebut ataupun dalam kancah hubungan internasional.

Bab 3

Pengenalan Informan Penelitian Ormas Islam Terbesar di Indonesia, Pengurus dan Tokohnya

A. Pendahuluan

Ormas Islam terbesar di Indonesia yang dimaksudkan di sini adalah yang memiliki anggota terbanyak di Indonesia, serta mewakili mainstream keagamaan Islam di Indonesia, juga memiliki kontribusi kebangsaan Indonesia sejak zaman pra kemerdekaan Indonesia hingga kini. Ormas Islam yang dikimaksud adalah Muhammadiyah yang didirikan tahun 1912 M dan Nahdhatul Ulama didirikan tahun 1926 M. adapun yang menjadi informan dari penelian ini adalah pengurus dan tokoh dari kedua Orfmas tersebut, baik di pusat, yakni di Jakarta maupun di daerah, yakni Sumatera utara.

B. Muhammadiyah

Dalam mengambil data gambaran Ormas Muhamma diyah ini, peneliti mengutip langsung dari website resmi Muhammadiyah dan juga wikipedia.¹ Ditinjau dari bahasa, makna Muhammadiyah; secara etimologi (harfiah), kata “Muhammadiyah” dibentuk dari *isim alam* (nama) Nabi “Muhammad” ditambah dengan akhiran “*ya nisbah*’ menjadi Muhammadiyah dan kemudian disederhanakan menjadi Muhammadiyah yang maknanya pengikut Nabi Muhammad saw yang setia, mencintai, mengidolakan, dan mengamalkan, dan memperjuangkan misi dan ajaran-ajarannya (Islam)

¹<https://id.Muhammadiyah.or.id>.lihatjuga [https://id.wikipedia.org/wiki/ Muhammadiyah](https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammadiyah).

sebagaimana tercantum dalam Alquran dan al-Hadis, serta jejak-jejak perjuangannya dalam berdakwah dan juga dalam membangun peradaban.

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad saw, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad saw. Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur-baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islam bukan sekadar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya.²

Dalam pembentukannya, Muhammadiyah banyak merefleksikan kepada perintah-perintah Alquran, di antaranya surat Ali Imran/3 ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104)

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Ayat tersebut di atas (Q.S.Ali Imran/3:104), menurut para tokoh Muhammadiyah, mengandung isyarat untuk bergeraknya umat dalam menjalankan dakwah Islam secara teorganisasi, umat yang bergerak, yang juga mengandung

² <https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammadiyah>.

penegasan tentang hidup berorganisasi. Maka dalam butir ke-6 Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dinyatakan, *melancarkan amal-usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi*, yang mengandung makna pentingnya organisasi sebagai alat gerakan yang niscaya. Sebagai dampak positif dari organisasi ini, kini telah banyak berdiri rumah sakit, panti asuhan, dan tempat pendidikan di seluruh Indonesia. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Kampung Kauman Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 (8 Dzulhijjah 1330 H).

Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha K.H. Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang menurut anggapannya, banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Kegiatan ini pada awalnya juga memiliki basis dakwah untuk wanita dan kaum muda berupa pengajian Sidratul Muntaha. Selain itu peran dalam pendidikan diwujudkan dalam pendirian sekolah dasar dan sekolah lanjutan, yang dikenal sebagai Hogere School Moehammadijah dan selanjutnya berganti nama menjadi Kweek School Moehammadijah (sekarang dikenal dengan Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta khusus laki-laki, yang bertempat di Jalan S Parman no 68 Patangpuluhan kecamatan Wirobrajan dan Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta khusus Perempuan, di Suronatan Yogyakarta yang keduanya sekarang menjadi Sekolah Kader Muhammadiyah) yang bertempat di Yogyakarta dan dibawah langsung oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Dalam catatan Adaby Darban, ahli sejarah dari UGM kelahiran Kauman, nama "Muhammadiyah" pada mulanya diusulkan oleh kerabat dan sekaligus sahabat Kyai Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Sangidu, seorang Ketib Anom Kraton Yogyakarta dan tokoh pembaruan yang kemudian menjadi penghulu Kraton Yogyakarta, yang kemudian diputuskan Kyai Dahlan setelah melalui salat

istikharah (Darban, 2000: 34).^[2] Pada masa kepemimpinan Kyai Dahlan (1912-1923), pengaruh Muhammadiyah terbatas di karesidenan-karesidenan seperti: Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan, dan Pekajangan, sekitar daerah Pekalongan sekarang. Selain Yogya, cabang-cabang Muhammadiyah berdiri di kota-kota tersebut pada tahun 1922. Pada tahun 1925, Abdul Karim Amrullah membawa Muhammadiyah ke Sumatera Barat dengan membuka cabang di Sungai Batang, Agam. Dalam tempo yang relatif singkat, arus gelombang Muhammadiyah telah menyebar ke seluruh Sumatera Barat, dan dari daerah inilah kemudian Muhammadiyah bergerak ke seluruh Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Pada tahun 1938, Muhammadiyah telah tersebar keseluruh Indonesia.

Faham keagamaan Muhammadiyah

Berkaitan dengan paham agama dalam Muhammadiyah secara garis besar dan pokok-pokoknya ialah sebagai berikut:

Agama

Agama yakni Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. ialah apa yang diturunkan Allah dalam Alquran dan yang disebut dalam Sunnah maqbulah, berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat (Kitab Masalah Lima, Al-Masail Al-Khams tentang al-Din).

Islam

Islam dalam pandangan Muhammadiyah, bahwa Islam adalah agama untuk penyerahan diri semata-mata karena Allah, agama semua Nabi, agama yang sesuai dengan fitrah manusia, agama yang menjadi petunjuk bagi manusia, agama yang mengatur hubungan dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesama, dan agama yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Islam satu-satunya agama yang diridhai Allah dan agama

yang sempurna. Dengan beragama Islam maka setiap muslim memiliki dasar/landasan hidup tauhid kepada Allah, fungsi/peran dalam kehidupan berupa ibadah, menjalankan kekhalifahan, dan bertujuan untuk meraih ridha serta karunia Allah swt. Islam yang mulia dan utama itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan di dunia apabila benar-benar diimani, dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh pemeluknya (orang Islam, umat Islam) secara total atau kaffah dan penuh ketundukan atau penyerahan diri. Dengan pengamalan Islam yang sepenuh hati dan sungguh-sungguh itu, maka terbentuk manusia muslimin yang memiliki sifat-sifat utama: kepribadian muslim, kepribadian mukmin, kepribadian muhsin dalam arti berakhlak mulia, dan kepribadian muttaqin (Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah/PHIWM, bab Pandangan Islam Tentang Kehidupan).

Ibadah

Ibadah ialah bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah SWT dengan cara menjalankan segala perintah-perintahNya dan menjauhi segala larangan-laranganNya serta menjalankan segala yang diizinkanNya. Ibadah dibagi menjadi dua yaitu ; ibadah umum atau ghoiru mahdlah dan ibadah khusus atau mahdlah. Ibadah umum atau ghoiru mahdlah adalah segala perbuatan baik yang diizinkan Alloh Swt dan diniatkan karena Allah Ibadah khusus atau mahdlah ibadah yang tatacara dan aturannya sudah ditentukan oleh Allah dan RasulNya.

Mu'amalah Duniawiyah

Mu'amalah Duniawiyah : Aspek kemasyarakatan yang mengatur pegaulan hidup manusia diatas bumi ini, baik tentang harta benda, perjanjian-perjanjian, ketatanegaraan, hubungan antar negara dan lain sebagainya. Di dalam prinsip-

prinsip Majelis Tarjih poin 14 disebutkan “Dalam hal-hal termasuk Al-Umurud Duniawiyah yang tidak termasuk tugas para nabi, menggunakan akal sangat diperlukan, demi untuk tercapainya kemaslahatan umat.”

Adapun prinsip-prinsip mu’amalah duniawiyah yang terpenting antara lain:

1. Menganut prinsip mubah. Harus dilakukan dengan saling rela artinya tidak ada yang dipaksa. Harus saling menguntungkan. Artinya mu’amalah dilakukan untuk menarik mamfaat dan menolak kemudharatan.

2. Ijtihad

Muhammadiyah (melalui lembaga Majelis atau Lajnah Tarjihnya) dalam soal-soal yang menyangkut ibadah dan mu’amalah bersumber kepada al-Qur’an dan al-Sunnah. Sedangkan ijtihad hanyalah merupakan jalan untuk mengeluarkan hukum dari dua sumber tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Himpunan Putusan Tarjih berikut: Bahwa dasar mutlak untuk berhukum dalam agama Islam adalah Alquran dan al-Hadis.

Bahwa di mana perlu dalam menghadapi soal-soal yang telah terjadi dan sangat dihayatkan untuk diamalkannya, mengenai hal-hal yang tak bersangkutan dengan ibadah mahdhah padahal untuk alasan atasnya tiada terdapat *nash sharih* di dalam al-Qur’an atau al-Sunnah Shahihah, maka dipergunakanlah alasan dengan jalan ijtihad dan istinbath daripada nash-nash yang ada melalui persamaan ‘illat: sebagaimana telah dilakukan oleh ulama-ulama salaf dan khalaf.

Atas dasar keputusan Lajnah Tarjih tersebut, maka sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1969 di Ponorogo (di dalam Matan Keyakinan Muhammadiyah) memberi penjelasan bahwa yang dimaksud dengan al-Qur’an,

ialah kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud dengan al-Sunnah (al-Hadis), ialah penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran al-Qur'an yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang dimaksud dengan ijtihad, ialah menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran agama. Sedangkan apa yang disebut ijma', qiyas, istihsan, istidlal dan masalah mursalah, di mana para imam madzhab telah menjadikannya sebagai sumber hukum, maka terhadap istilah-istilah tersebut Lajnah Tarjih Muhammadiyah tidak memandang sebagai sumber hukum. Namun demikian, Lajnah Tarjih Muhammadiyah menganggapnya sebagai sarana untuk menggali hukum yang sifatnya tidak mengikat. Adapun kriteria al-Sunnah yang digunakan oleh Tarjih Muhammadiyah ialah al-Sunnah yang shahih. Akal fikiran yang digunakan oleh Tarjih Muhammadiyah untuk berijtihad, ialah hasil ijtihad Lajnah Tarjih Muhammadiyah sendiri, bukan hasil ijtihad ulama terdahulu, namun demikian hasil ijtihad ulama terdahulu dijadikan sebagai bahan pengkajian dan penelitian kembali.

Motif Lajnah Tarjih menggunakan Alquran dan al-Sunnah sebagai sumber hukum yang mutlak adalah untuk tegaknya aqidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah dan khurafat. Juga untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah saw. tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Selain itu, juga untuk menegakkan nilai-nilai moral dan untuk terlaksananya mu'amalah duniawiyah, yang dijiwai ajaran agama serta menjadikan semua kegiatan dalam rangka ibadah kepada Allah swt. Sedangkan ijtihad sebagai metode atau cara memahami Alquran dan al-Sunnah adalah untuk mengimbangi

beberapa pendapat yang ta'ashub kepada suatu madzhab yang menyatakan pintu ijtihad sudah tertutup. Muhammadiyah berpendapat pintu ijtihad selalu dan tetap terbuka. Oleh karenanya dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak ada nashnya haruslah berijtihad. Penggunaan kedua sumber dan diperkuat oleh metode ijtihad tersebut, menunjukkan Muhammadiyah tidak menganut sesuatu madzhab dari madzhab-madzhab yang ada.

Adapun struktur organisasi atau persyarikatan Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

Jaringan Kelembagaan Pimpinan Pusat.

Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah awalnya berada di Yogyakarta. Namun pada tahun 1970, komite-komite pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan berpindah ke kantor di ibukota Jakarta. Struktur Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2010-2015 terdiri dari lima orang Penasihat, seorang Ketua Umum yang dibantu dua belas orang Ketua lainnya, seorang Sekretaris Umum dengan dua anggota, seorang Bendahara Umum dengan seorang anggotanya.

Pimpinan Wilayah, setingkat Provinsi, terdapat 33 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
Pimpinan Daerah, setingkat Kabupaten/Kota.
Pimpinan Cabang, setingkat Kecamatan.
Pimpinan Ranting, setingkat Pedesaan/Kelurahan.
Pimpinan Cabang Istimewa, untuk luar negeri.
Pembantu Pimpinan Persyarikatan

Ada 13 Majelis

Majelis Tarjih dan Tajdid.
Majelis Tabligh.

Majelis Pendidikan Tinggi.
Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah.
Majelis Pendidikan Kader.
Majelis Pelayanan Sosial.
Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan.
Majelis Pemberdayaan Masyarakat.
Majelis Pembina Kesehatan Umum.
Majelis Pustaka dan Informasi.
Majelis Lingkungan Hidup.
Majelis Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
Majelis Wakaf dan Kehartabendaan.

Ada 8 Lembaga

Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting.
Lembaga Pembina dan Pengawasan Keuangan.
Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
Lembaga Penanggulangan Bencana.
Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah.
Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik.
Lembaga Seni Budaya dan Olahraga.
Lembaga Hubungan dan Kerja sama International.

Organisasi Otonom.

Muhammadiyah juga memiliki beberapa organisasi otonom, yaitu:

'Aisyiyah (Wanita Muhammadiyah).
Pemuda Muhammadiyah (PM).
Nasyiatul Aisyiyah (Putri Muhammadiyah).
Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM).
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
Hiżbul Wathan (Gerakan kepramukaan).
Tapak Suci Putera Muhammadiyah (Perguruan silat).

Daftar Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang pernah memimpin Muhammadiyah dari awal berdirinya hingga kini:

1. K.H.Ahmad Dahlan : memimpin 1912-1923 M (Yogyakarta Rapat tahun 1).
2. K.H.Ibrahim : memimpin 1923-1932 M (Yogyakarta Rapat Tahun ke-12).
3. K.H.Hisyam : memimpin 1934-1936 M (Rapat tahun ke-23).
4. K.H.Mas Mansur: memimpin 1937-1942 (Rapat tahun ke-26).
5. Ki Bagoes Hadikoesoemo : memimpin 1944-1953 M (Muktamar Daerurat).
6. Buya A.R.Sutan Mansur : memimpin 1953-1959 M Muktamar ke 32).
7. K.H.M.Yunus Anis : memimpin 1959-1962 (Muktamar ke-34).
8. K.H.Ahmad badawi : Memimpin 1962-1968 M (Muktamar ke-35).
9. K.H.Faqih Usman : memimpin 1968-1968(Palembang Muktamar ke-36).
10. K.H.A.R.Fakhrudin: memimpin 1968-1971 dan 1971-1990 (Makasar Muktamar ke 38).
11. K.H.Ahmad Azhar Basyir, MA: memimpin 1990-1995(Yogyakarta Muktamar ke 42).
12. Prof.Dr.H.Amien Rais : memimpin 1995-1998 (Banda Aceh, Muktamar ke-43).
13. Prof.Dr.H.Ahmad Syafii Maarif, MA memimpon 1998-2000 dan 2000-2005 (Jakarta, Muktamar ke44).
14. Prof.Dr.K.H.Din Syamsuddin, MA L memimpin 2005-2010 (Malang, Muktamar ke 45)2010-2015 dan (Yogyakarta, Muktamar ke-46).
15. Dr. Haidar Nashir, memimpin 2015-2020 (Makasar, Muktamar ke-47).

Hal di atas adalah gambaran persyarikatan muhammadiyah, adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berada di Jakarta dan juga di Yogyakarta. Sebab Muhammadiyah memiliki dua kantor Pimpinan Pusat, Jakarta dan Yogyakarta. Kemudian juga, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah yang ada di Sumatera Utara. Selain itu, termasuk informan penelitian ini adalah tokoh-tokoh akademis yang ada di kampus baik di pusat maupun di wilayah.

Berikut ini adalah foto Peneliti dan pembantu peneliti berfoto di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta Pusat.



Keterangan foto: dari kiri ke kanan: Dr. Ahmad Zuhri, MA, Prof.Dr. Syukur Kholil, MA dan Dr. Sulidar, M.Ag. di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta Pusat.

C. Nahdhatul Ulama

Sebagaimana Muhammadiyah, dalam mengambil data gambaran tentang NU, peneloti juga mengutip dari wensite resmi NU.³ Nahdlatul 'Ulama (*Kebangkitan 'Ulama* atau *Kebangkitan Cendekiawan Islam*), disingkat NU, adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia.^[3] Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan "Kebangkitan Nasional". Semangat kebangkitan terus menyebar - setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain. Sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan

Merespon kebangkitan nasional tersebut, *Nahdlatul Wathan* (Kebangkitan Tanah Air) dibentuk pada 1916. Kemudian pada tahun 1918 didirikan *Taswirul Afkar* atau dikenal juga dengan "*Nahdhatul Fikri*" (kebangkitan pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Dari situ kemudian didirikan Nahdlatul Tujjar, (pergerakan kaum saudagar).

Serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya *Nahdlatul Tujjar* itu, maka *Taswirul Afkar*, selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Ulama

Berangkat dari munculnya berbagai macam komite dan organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih menca kup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi dengan berbagai kyai, karena tidak terakomodir kyai dari kalangan tradisional untuk mengikuti konperensi Islam Dunia yang ada di Indonesia dan Timur Tengah akhirnya muncul kesepakatan dari para ulama pesantren untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) di Kota Surabaya. Organisasi ini dipimpin oleh K.H. Hasjim Asy'ari sebagai Rais Akbar.

Ada banyak faktor yang melatar belakangi berdirinya NU. Di antara faktor itu adalah perkembangan dan pembaharuan pemikiran Islam yang menghendaki pelarangan segala bentuk amaliah kaum Sunni. Sebuah pemikiran agar umat Islam kembali pada ajaran Islam "murni", yaitu dengan cara umat islam melepaskan diri dari sistem bermadzhab. Bagi para kiai pesantren, pembaruan pemikiran keagamaan sejatinya tetap merupakan suatu keniscayaan, namun tetap tidak dengan meninggalkan tradisi keilmuan para ulama terdahulu yang masih relevan. Untuk itu, Jam'iyah Nahdlatul Ulama cukup mendesak untuk segera didirikan.

Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka K.H. Hasjim Asy'ari merumuskan kitab Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam khittah NU, yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.

Paham Keagamaan

NU menganut paham Ahlulsunah waljama'ah, merupakan sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrem aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrem naqli (skripturalis). Karena itu sumber hukum Islam bagi NU tidak hanya Alquran, sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu al-Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi/tauhid/ketuhanan.

Kemudian dalam bidang fiqih lebih cenderung mengikuti mazhab: Imam Syafi'i dan mengakui tiga madzhab yang lain: Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hanbali sebagai mana yang tergambar dalam lambang NU berbintang 4 di bawah. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Syaikh Junaid al-Bagdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat.

Gagasan kembali kekhittah pada tahun 1984, merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran ahlulsunah wal jamaah, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun sosial. Serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil kembali membangkitkan gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU.

Basis Pendukung

Dalam menentukan basis pendukung atau warga NU ada beberapa istilah yang perlu diperjelas, yaitu: anggota, pendukung atau simpatisan, serta Muslim tradisional yang sepaham dengan NU. Jika istilah warga disamakan dengan istilah anggota, maka sampai hari ini tidak ada satu dokumen

resmipun yang bisa dirujuk untuk itu. Hal ini karena sampai saat ini tidak ada upaya serius di tubuh NU di tingkat apapun untuk mengelola keanggotaannya.

Apabila dilihat dari segi pendukung atau simpatisan, ada dua cara melihatnya. Dari segi politik, bisa dilihat dari jumlah perolehan suara partai-partai yang berbasis atau diasosiasikan dengan NU, seperti PKBU, PNU, PKU, Partai SUNI, dan sebagian dari PPP. Sedangkan dari segi paham keagamaan maka bisa dilihat dari jumlah orang yang mendukung dan mengikuti paham keagamaan NU. Maka dalam hal ini bisa dirujuk hasil penelitian Saiful Mujani (2002) yaitu berkisar 48% dari Muslim santri Indonesia. Suaidi Asyari^[4] memperkirakan ada sekitar 51 juta dari Muslim santri Indonesia dapat dikatakan pendukung atau pengikut paham keagamaan NU. Jumlah keseluruhan Muslim santri yang disebut sampai 80 juta atau lebih, merupakan mereka yang sama paham keagamaannya dengan paham keagamaan NU. Namun belum tentu mereka ini semuanya warga atau mau disebut berafiliasi dengan NU.

Berdasarkan lokasi dan karakteristiknya, mayoritas pengikut NU terdapat di pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera. Pada perkembangan terakhir terlihat bahwa pengikut NU mempunyai profesi beragam, meskipun sebagian besar di antara mereka adalah rakyat jelata baik di perkotaan maupun di pedesaan. Mereka memiliki kohesifitas yang tinggi, karena secara sosial ekonomi memiliki problem yang sama, serta selain itu juga sama-sama sangat menjiwai ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Pada umumnya mereka memiliki ikatan cukup kuat dengan dunia pesantren yang merupakan pusat pendidikan rakyat dan cagar budaya NU.

Basis pendukung NU ini cenderung mengalami pergese ran. Sejalan dengan pembangunan dan perkembangan industri

alisasi, maka penduduk NU di desa banyak yang bermigrasi ke kota memasuki sektor industri. Maka kalau selama ini basis NU lebih kuat di sektor petani di pedesaan, maka saat di sektor buruh di perkotaan, juga cukup dominan. Demikian juga dengan terbukanya sistem pendidikan, basis intelektual dalam NU juga semakin meluas, sejalan dengan cepatnya mobilitas sosial yang terjadi selama ini. Belakangan ini NU sudah memiliki sejumlah doktor atau magister dalam berbagai bidang ilmu selain dari ilmu ke-Islam-an baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk negara-negara Barat. Namun para doktor dan magister ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh para pengurus NU hampir di setiap kepengurusan NU.

Organisasi

Tujuan

Menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlussunnah waljama'ah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Usaha

Dalam bidang agama, melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan. Di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas. Hal ini terbukti dengan lahirnya Lembaga-lembaga Pendidikan yang bernuansa NU dan sudah tersebar di berbagai daerah khususnya di Pulau Jawa. Di bidang sosial budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai keislaman dan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan, dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat. Hal ini ditandai dengan lahirnya BMT dan Badan Keuangan lain yang

yang telah terbukti membantu masyarakat. Mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas. NU berusaha mengabdikan dan menjadi yang terbaik bagi masyarakat.

Basis Pendukung

Pengurus Besar (tingkat Pusat) berkantor di Jakarta.

Pengurus Wilayah (tingkat Provinsi), terdapat 33 Wilayah.

Pengurus Cabang (tingkat Kabupaten/Kota) atau Pengurus Cabang Istimewa untuk kepengurusan di luar negeri, terdapat 439 Cabang dan 15 Cabang Istimewa.

Pengurus Majelis Wakil Cabang / MWC (tingkat Kecamatan), terdapat 5.450 Majelis Wakil Cabang.

Pengurus Ranting (tingkat Desa / Kelurahan), terdapat 47.125 Ranting.

Untuk Pusat, Wilayah, Cabang, dan Majelis Wakil Cabang, setiap kepengurusan terdiri dari:

1. Mustasyar (Penasihat).
2. Syuriah (Pimpinan tertinggi).
3. Tanfidziah (Pelaksana Harian).

Untuk Ranting, setiap kepengurusan terdiri dari:

1. Syuriah (Pimpinan tertinggi).
2. Tanfidziah (Pelaksana harian).
3. Keanggotaan berbasis di ranting dan di cabang untuk cabang istimewa.

Lembaga

Lembaga adalah perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama, berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan/atau yang memerlukan penanganan khusus. Lembaga ini meliputi:

Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LD-NU) [1]

Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU)
Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI-NU)* (Indonesia) Lembaga Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama
Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LP-NU)
Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPP-NU)
Lembaga Pelayanan Kesehatan Nahdlatul Ulama (LPK-NU)
Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK-NU)
Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM-NU)
Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH-NU)
Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama (LESBUMI-NU)
Lembaga Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZIS-NU)
Lembaga Waqaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWP-NU)
Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU)
Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama (LTM-NU)
Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LK-NU)
Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LF-NU)
Lembaga Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama (LTN-NU)
Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI-NU)

Lajnah

Merupakan pelaksana program Nahdlatul Ulama (NU) yang memerlukan penanganan khusus. Berdasarkan perubahan AD/ART hasil Mukhtamar 33 NU di Jombang, Lajnah Nahdlatul Ulama^[6] digantikan dengan lembaga. Semula ada 3 (tiga) Lajnah yaitu:

Lajnah Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama (LTN-NU) menjadi Lembaga Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama (LTNNU)

Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama (LF-NU) menjadi Lembaga Falakiya Nahdlatul Ulama (LFNU)
Lajnah Pendidikan tinggi (LPT-NU) menjadi Lembaga Pendidikan Nahdlatul Ulama (LPTNU).

Badan Otonom

Badan Otonom adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. Badan Otonom dikelompokkan dalam katagori Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu, dan Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya.

Jenis Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu adalah:

1. Muslimat Nahdlatul Ulama (Muslimat NU).
2. Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama (GP Ansor NU).
3. Fatayat Nahdlatul Ulama (Fatayat NU).
4. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU).
5. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU).
6. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
7. Mahasiswa Ahlith Thoriqoh Al-Mu'tabaroh an-Nahdliyah (MATAN).

Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya:

1. Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdliyah (JATMAN).
2. Jami'iyatul Qurro wal Huffadz Nahdlatul Ulama (JQH NU).
3. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU).
4. Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI).
5. Ikatan Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa (IPSNU Pagar Nusa).

6. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU).
7. Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama.
8. Ikatan Seni Hadroh Indonesia (ISHARI).

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah pengurus NU tingkat pusat dan wilayah, serta para akademisi NU yang berada di kampus-kampus yang berprofesi sebagai dosen di UIN Sumatera Utara. Berikut ini adalah foto Peneliti dan Pembantu Peneliti di kantor PB Nahdhatul Ulama Jakarta Pusat.



Keterangan gambar: dari kiri ke kanan, Prof. Dr. Syukur Kholil, MA, Dr. Sulidar, M.Ag dan Dr. Ahmad Zuhri, MA, di Kantor PB Nahdhatul Ulama, Jakarta Pusat.

Dalam rangka mempertajam hasil penelitian diadakan pula FGD yang mendiskusikan secara serius dengan memanggil nara sumber dan peserta yang kompeten di bidangnya yang berkaitan dengan penelitian ini.



Dari kiri ke kanan, Dr. Ahmad Zuhri, MA, Prof.Dr.Syukur Kholil, MA, Prof.Dr.Ibrahim Gultom, M.Pd.

Bab 4

Temuan Penelitian

A. Pendahuluan

Pembahasan dalam bab temuan penelitian ini, peneliti akan mengemukakan secara runtut dan sistematis. Artinya karena informan penelitian ini hanya ada dua ormas besar yang terlibat, maka dalam bahasan ini juga akan dibagi kepada dua bagian besar dalam membahasnya. Selanjutnya, oleh karena Muhammadiyah adalah Ormas yang terlebih dahulu didirikan, kemudian setelah itu Nahdhatul Ulama, maka dalam pembahasannya pun akan didahulukan pandangan dari Ormas Islam Muhammadiyah, setelah itu Ormas Islam Nahdhatul Ulama.

Dalam temuan penelitian ini tidak saja mewawancarai secara mendalam informan yang berasal dari Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama tentang fokus penelitian ini, namun juga menelusuri karya-karya tulis yang dibuat oleh tokoh-tokoh yang berasal dari kedua Ormas tersebut. Demikian juga hasil produk resmi organisasi dari kedua Ormas ini berkenaan dengan nasionalisme, baik dalam tataran konsep, doktrin, metode penyebaran gagasan yang telah diputuskan organisasi, sampai kepada hambatan serta tantangan terhadap nasionalisme Indonesia yang telah berkembang dan berjalan secara baik selama ini. Jika di Muhammadiyah putusan paling tinggi dan dijunjung tinggi oleh warga persyarikatan Muhammadiyah adalah putusan yang diambil dalam Mukhtamar Nasional, yang diadakan 5 tahun sekali. Kemudian, putusan yang khusus berkenaan dengan keislaman, baik berhubungan dengan aqidah, ibadah dan muamalah putusan yang paling tinggi dan harus dipatuhi oleh seluruh warga Muhammadiyah dari tingkat pusat hingga tingkat ranting adalah apa yang

dibuat oleh Majelis Tarjih dan Tajdid dengan mengadakan Musyawarah Nasional Tarjih, yang diikuti oleh ulama Tarjih Muhammadiyah di seluruh Indonesia, sehingga keputusannya mengikat.

Keputusan yang dihasilkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid adalah mengikat secara organisatoris di lingkungan Muhammadiyah dari tingkat pusat hingga ranting, hanya saja, putusan tarjih itu bukan berarti mazhabnya Muhammadiyah. Putusan Tarjih itu hanya sebagai panduan aqidah, ibadah dan muamalah bagi warga persyarikatan Muhammadiyah. Jika ada sikap perorangan atau individu warga Muhammadiyah melakukan injtihad tersendiri lalu berbeda dengan putusan tarjih, Muhammadiyah tidak memaksanya. Hanya saja tidak boleh mengatasnamakan Muhammadiyah, atau perbedaan itu tidak boleh didakwakan untuk warga persyarikatan muhammadiyah, dia amalkan dirinya sendiri, sebab jika ingin mendakwakan keislaman di Muhammadiyah panduannya harus yang telah diputuskan secara lembaga. Jika putusan diambil secara nasional, atau melalui Musyawarah Nasional Tarjih (Munas Tarjih), maka berlakunya secara nasional. Keputusan diambil di tingkat wilayah, disebut dengan Musyawarah Wilayah Tarjih (Musywil Tarjih), maka berlakunypun hanya tingkat wilayah tersebut, demikian pula putusan di daerah, atau Musyawarah Daerah Tarjih (Musyda Tarjih), maka putusan itu berlaku hanya untuk daerah tersebut, dan inilah putusan tarjih yang paling rendah.

Demikian pula di Nahdhatul Ulama, keputusan yang paling tinggi adalah di Muktamar Nasional Nahdhatul Ulama. Namun mesti dipahami di NU ada Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama atau disingkat Munas Alim Ulama dan Konbes NU adalah dua forum berbeda. Namun keduanya kerap digelar dalam satu waktu penyelenggaraan. Munas Alim Ulama dan Konbes NU

merupakan forum permusyawaratan tertinggi kedua setelah Muktamar. Sebagaimana penyelenggaraan di tahun-tahun sebelumnya, Munas Alim Ulama dan Konbes NU didesain untuk menghasilkan keputusan-keputusan strategis dan fundamental bagi kemaslahatan umat, bagi keutuhan bangsa dan negara ini.

Munas Alim Ulama membicarakan masalah-masalah keagamaan menyangkut kehidupan umat dan bangsa. Sebagai forum bahtsul masail akbar, Munas Alim Ulama membagi pembahasan masalah-masalah keagamaan ke dalam tiga kategori : (1) *Bahtsul Masail ad-Diniyyah al-Waqi'iyah* (pembahasan masalah-masalah keagamaan aktual), (2) *Bahtsul Masail ad-Diniyyah al-Maudlu'iyah* (pembahasan masalah-masalah keagamaan tematik), dan (3) *Bahtsul Masail ad-Diniyyah al-Qonuniyyah* (pembahasan masalah-masalah keagamaan berkaitan dengan perundang-undangan).

Adapun Konbes NU lebih membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, mengaji perkembangan program, memutuskan Peraturan Organisasi (PO), serta menerbitkan rekomendasi. Oleh karena itu, dalam Konbes NU ini forum permusyawaratan dikerucutkan ke dalam tiga komisi pembahasan, yaitu Komisi Program, Komisi Organisasi, dan Komisi Rekomendasi.

Jika kepesertaan Munas Alim Ulama secara terbuka mengundang dan melibatkan para alim ulama, pengasuh pondok pesantren, dan para pakar, maka kepesertaan dalam forum Konbes NU sifatnya lebih tertutup. Peserta Konbes NU dalam hal ini terdiri hanya anggota pleno Pengurus Besar dan Pengurus Wilayah saja. Ini dikemukakan agar dipahami bagaimana NU dalam memberikan kontribusinya dan gagasan-gagasannya untuk bangsa dan negara, lebih fokus lagi terhadap nasionalisme yang ada di Indonesia.

Sebelum masuk pada pandangan Muhammadiyah dan Nahdha tul Ulama Konsep-konsep nasionalisme di Indonesia sesuai dengan perkembangan dan dinamika saat ini antara lain:

1) Negara Bangsa

Konsep negara bangsa adalah konsep tentang negara modern yaitu negara yang memiliki bangunan politik seperti batas teritorial, pemerintahan sah, pengakuan negara lain, kedaulatan ke dalam negaranya sendiri. Syarat adanya negara adalah terpenuhinya syarat-syarat pokok tersebut yang sekaligus sebagai modal sebuah bangsa menjadi negara. Menurut UUD 1945 Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.¹ Bentuk pemerintahan republik dipimpin oleh kepala pemerintahan yaitu presiden, yang dipilih melalui pemilihan umum. UUD 1945 memuat juga pasal-pasal tentang unsur-unsur kelengkapan Negara Indonesialainnya seperti badan legislatif, eksekutif, yudikatif, pemerintahan daerah dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan konsep negara bangsa.

2) Warga Negara

Warga negara menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini sesuai UUD 1945 pasal 26 ayat 2 yang berbunyi “Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”. Dirumuskan juga dalam UU No.12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 26 ayat 1 menyatakan “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”. Sesuai kedua rumusan tersebut, mereka yang termasuk dalam warga negara Indonesia semestinya memiliki kecintaan dan

1

rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

3) Dasar Negara Pancasila

Sehari setelah Indonesia merdeka terjadi perdebatan tentang Dasar Negara Indonesia merdeka. Perdebatan itu terjadi dalam sidang BPUPKI antara kelompok nasionalis Islami dan nasionalisme sekuler yang terjadi sebelum kemerdekaan. Pada akhirnya, Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 menjadi dasar negara Republik Indonesia hingga saat ini.

Pada prinsipnya nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa:

- a) Menempatkan persatuan–kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan.
- b) Menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan Bangsa dan Negara.
- c) Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia tidak rendah diri.
- d) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa.
- e) Menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia.
- f) Mengembangkan sikap tenggang rasa.
- g) Tidak semena-mena terhadap orang lain.
- h) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- i) Senantiasa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
- j) Berani membela kebenaran dan keadilan.

- k) Merasa bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia.²

Pembahasan nasionalisme dalam temuan penelitian ini akan melihat bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan nasionalisme menurut paham Muhammadiyah secara persyarikatan beserta tokohnya dan Nahdhatul Ulama secara oraganisatoris beserta tokohnya serta dihubungkan dengan persoalan kekinian. Persoalan kekinian yang dimaksud ada hubungannya dengan hambatan, tantangan dan kemajuan dari tumbuh berkembangnya nasionalisme di Indonesia.

B. Latar Belakang Keberadaan Nasionalisme Ulama Ormas Islam Indonesia

1. Pandangan Muhammadiyah tentang keberadaan Nasionalisme

Jika ditelusuri, terminologi nasionalisme yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa dalam rumusan Dasar Negara Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 memerlukan perumusan konsep lebih lanjut. Konsep nasionalisme Indonesia yang bersumber dari kedua landasan tersebut dikonkretkan menjadi bentuk dan struktur negara Indonesia yang berbentuk republik.

Menurut paparan Benni Setiawan dalam Nasionalisme Muhammadiyah, merujuk perkataan Muarif bahwa setidaknya terbagi menjadi tiga periode dalam proses nasionalisme Muhammadiyah yaitu pertama pada masa Kyai Ahmad Dahlan nasionalisme dimaknai sebagai konteks persatuan. Zaman kedua masa Kyai Ibrahim Nasionalisme berarti Indonesia

²Lihat, Sudarnoto Abdul Hakim, *Ki Bagus Hadikusumo, Biografi, Perjuangan dan Pemikiran* (Jakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, tt). Lihat juga; <https://errafaziraaini.wordpress.com>.

sedangkan terakhir pada zaman Kyai Mas Mansur penerjemahan nasionalisme adalah semangat patriotik.³

Muhammadiyah adalah organisasi Islam dapat dikatakan turut serta membangun fondasi negara Indonesia. Sebelum dan sesudah merdeka, Muhammadiyah dan umat Islam merupakan bagian integral dari bangsa yang telah berkiprah membangun Indonesia. Pernyataan ini disampaikan oleh Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah. Beliau dengan tegas melanjutkan:

“Kita sejak dulu sudah berkontribusi untuk negara ini. Misalnya salah seorang tokoh Muhammadiyah, Ki Ba goes Hadikoesoemo, berperan dalam perubahan bunyi sila pertama Pancasila. Sebagai seseorang, ia tidak menginginkan NKRI menjadi negara bersyariat Islam. Ia ingin Indonesia tetap berazaskan Pancasila yang menjadi pemersatu”. Menurut Haedar, pembentukan negara Indonesia selain menentukan cita-cita nasional, juga untuk menegaskan kepribadian bangsa sebagaimana tercermin dalam Pancasila.”⁴

Selanjutnya, penegasan Haedar Nashir bahwa paham nasionalisme serta segala bentuk pemikiran dan usaha yang dikembangkan dalam membangun Indonesia, haruslah berada dalam kerangka negara-bangsa dan diproyeksikan secara dinamis untuk terwujudnya cita-cita nasional yang luhur itu. “Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan perjanjian luhur dan konsensus nasional yang mengikat seluruh bangsa. Dalam hal ini juga, Muhammadiyah menjadikan Alquran sebagai

³Acep Zamzam Nur, Zuly Qodir, dkk, *Muhammadiyah Bicara Nasionalisme*, penyunting: Binhad Nurrohmat dan Moh. Shofan (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 133.

⁴Lihat website resmi Muhammadiyah. Kamis, 13 September 2018.

pedoman perekat dan pemersatu bangsa, yakni sebagaimana Surat Al-Hujurat ayat 13.”:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Lebih lanjut Haedar Nashir menegaskan bahwa nasionalisme bukanlah doktrin mati sebatas slogan cinta tanah air, tetapi harus dimaknai dan difungsikan sebagai energi positif untuk membangun Indonesia secara dinamis dan transformatif. “Cita-cita nasional dan falsafah bangsa yang ideal itu perlu ditransformasikan ke dalam seluruh sistem kehidupan nasional sehingga terwujud Indonesia sebagai bangsa dan negara yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat di hadapan bangsa-bangsa lain,”⁵

Selain itu, Haedar Nashir mengemukakan bahwa Muhammadiyah bersama dengan elemen umat Islam lainnya sejak awal telah berjuang dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Perjuangan yang dilakukan melalui segenap perjuangan, dan pengorbanan *jihad fi sabilillah*. beliau menyebutkan dalam merebut kemerdekaan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), selain KH Ahmad Dahlan, ada KI Ba goes,⁶ Kasman, Kahar Muzakkir, dan tak kalah pentingnya

⁵ <http://liputanislam.com/indonesiana/haedar-nashir-nasionalisme-bukan-hanya-slogan/>

⁶Khusus untuk tokoh Ki Bagus Hadikusumo, baca buku karya, Sudarnoto Abdul Hakim, *Ki Bagus Hadikusumo, Biografi, Perjuangan dan Pemikiran* (Jakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah,t.t).

adalah Jenderal Sudirman. Jika melihat para pejuang-pejuang tersebut Haedar Nashir mengatakan bahwa jiwa nasionalisme umat Islam tidak perlu diragukan. “Keindonesiaan, kebhinnekaan, NKRI, itu tidak terpisahkan pada diri umat Islam. Siapa yang meragukan keindonesiaan dan kebhinnekaan pada diri umat Islam, maka ia tidak paham sejarah,” demikian pene gasan Haedar Nashir.⁷

Kemudian modal besar dalam membangun dan memajukan bangsa menurut Haedar Nashir adalah kekuatan dan kebersamaan. “Kita sebagai umat Islam dan bagian dari masyarakat Indonesia harus mampu membangun kekuatan kolektif,” ujar Haedar. Beliau menyatakan bahwa nasionalisme itu bukan hanya sebatas slogan cinta tanah air yang mudah diucapkan. Menurutnya, nasionalisme harus dibuktikan dengan pemaknaan sebagai energi positif dalam membangun bangsa secara dinamis dan transformatif. “Nasionalisme bukanlah doktrin mati sebatas slogan cinta tanah air, tetapi harus dimaknai dan difungsikan sebagai energi positif untuk membangun Indonesia secara dinamis dan transformatif, dalam mewujudkan cita-cita nasional di tengah badai masalah dan tantangan zaman,” ujar Haedar di Yogyakarta.⁸

Haedar Nashir menegaskan, bahwa cita-cita nasional dan falsafah bangsa yang ideal itu, perlu ditransformasikan ke dalam seluruh sistem kehidupan nasional sehingga terwujud Indonesia sebagai bangsa dan negara yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat di hadapan bangsa-bangsa lain. Dalam bahasa Alquran (Q.S.Saba/34:15), cita-cita itu adalah untuk menuju “*Baladatun thayyibatun warabbun ghafur.*” Perhatikan Q.S.Saba/34:15:

⁷ <http://liputanislam.com/indonesiana/haedar-nashir-nasionalisme-bukan-hanya-slogan>.

⁸ Sebagaimana disiarkan oleh *suaramuhammadiyah.id.*, pada Jumat (11/8).

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ
وَأَشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ (15)

Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (Kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun".

Lebih Lanjut Haedar Nashir menegaskan bahwa paham nasionalisme serta segala bentuk pemikiran dan usaha yang dikembangkan dalam membangun Indonesia, haruslah berada dalam kerangka negara-bangsa dan diproyeksikan secara dinamis untuk terwujudnya cita-cita nasional yang luhur itu. Cita-cita dan kepribadian bangsa tercermin dalam Pancasila. Beliau juga mengingatkan agar negara mewaspadai semua bentuk penyelewengan. “Bukan hanya separatis me yang ingin memisahkan diri dari Indonesia, tetapi juga bentuk penyelewengan dalam mengurus negara. Di antaranya korupsi, kolusi, nepotisme, penjualan aset-aset negara, perusakan sumber daya alam dan lingkungan”.⁹Bahkan, perilaku pengingkaran terhadap cita-cita kemerdekaan bisa berupa penindasan terhadap rakyat, otoritanisme, pelanggaran hak asasi manusia, tunduk pada kekuasaan asing, serta berbagai tindakan yang merugikan hajat hidup bangsa dan negara. “Hal itu merupakan pengkhianatan terhadap cita-cita nasional,” tegas Haedar.

Pada kesempatan itu, beliau juga menegaskan peran para tokoh Muhammadiyah dalam kemerdekaan Indonesia. Diantaranya ialah Ki Bagoes Hadikoesoemo yang ikut

⁹ <http://liputanislam.com/indonesiana/haedar-nashir-nasionalisme-bukan-hanya-slogan/>

berperan dalam perubahan bunyi sila pertama Pancasila. Ki Bagus tidak memaksakan NKRI menjadi negara syariat, Indonesia tetap berazaskan Pancasila yang bisa mempersatukan semua. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan perjanjian luhur dan konsensus nasional yang mengikat seluruh komponen bangsa. “Muhammadiyah terlibat aktif dalam peletakan dan penentuan fondasi negara-bangsa,” ungkap Haedar.¹⁰

Pandangan Muhammadiyah berkenaan dengan dasar negara Indonesia yaitu pancasila, telah memberikan kontribusinya dengan membuat konsep; “Negara pancasila sebagai *Dar al-Ahdi wa al-Syahada*”, dan dikeluarkan dan diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta, cetakan pertamanya tahun 2015 telah dicetak ulang sampai cetakan ke-4 Juni 2017, buku ini diberi pengantar dan ditanda tangani oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr.H.haedar Mashir, M.Si dan Sekretaris Umum, Dr.H. Abdul Mu’ti, M.Ed. Bukunya hanya berisi 22 halaman, yang pembahasannya terdiri atas lima hal, yaitu:

- (1) Muqaddimah.
- (2) Pembentukan Negara pancasila.
- (3) Peran strategis Muhammadiyah.
- (4) Kedudukan Negara Pancasila.
- (5) Proyeksi ke Depan.¹¹

Dalam buku di atas ditegaskan bahwa: “Muhammadiyah sebagai kekuatan nasional sejak awal berdirinya pada tahun 1912 telah berjuang dalam pergerakan kemerdekaan. Melalui para tokohnya, Muhammadiyah juga terlibat aktif mendirikan

¹⁰<http://liputanislam.com/indonesiana/haedar-nashir-nasionalisme-bukan-hanya-slogan/>

¹¹Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Negara pancasila sebagai *Dar al-Ahdi wa al-Syahada*, Yogyakarta, cetakan ke-4 Juni 2017, h. v.

Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Muhammadiyah memiliki komitmen dan tanggungjawab tinggi untuk memajukan kehidupan bangsa dan negara. Para tokoh Muhammadiyah sejak era K.H. Ahmad Dahlan dan Nyai Walidah Dahlan hingga sesudahnya mengamalkan peran aktif dalam usaha-usaha kebangkitan nasional dan perjuangan kemerdekaan. Kiprah Muhammadiyah tersebut melekat dengan nilai dan pandangan Islam berkemajuan yang menjadikan komitmen cinta pada tanah air sebagai salah satu wujud keislaman.¹²

Selanjutnya, menurut Muhammadiyah, seluruh komponen nasional dan generasi penerus bangsa, termasuk umat Islam sebagai kekuatan mayoritas, wajib memahami keberadaan Negara Indonesia untuk dibangun menjadi negara-negara yang berkemajuan sesuai dengan tuntunan zaman. Mereka menduduki jabatan-jabatan publik berkewajiban menjalankan fungsi utama pemerintahan sesuai dengan jiwa, falsafah, pemikiran dan cita-cita nasional. Pengingkaran terhadap nilai-nilai luhur kebangsaan itu merupakan bentuk penyelewengan dan pengkhianatan atas idealisme kemerdekaan. Sebaliknya, setiap usaha untuk mewujudkan nilai dan cita-cita nasional itu merupakan bukti kesungguhan untuk membawa Indonesia sebagai bangsa dan negara yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat di tengah dinamika perkembangan zaman. Segenap kekuatan nasional harus memiliki tekad yang kuat dan bersatu untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Pancasila yang berdiri tegak di atas jiwa, pikiran, dan cita-cita nasional 1945 yang penting dan luhur itu.¹³

Secara prinsip, Muhammadiyah memandang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diprokla

¹² *Ibid.* h. 9.

¹³ *Ibid.* h. 8, juga hasil wawancara peneliti dengan Abdurrahman Ghazali, Jakarta, 30 Juli 2018.

masikan 17 Agustus 1945 adalah Negara Pancasila yang ditegakkan di atas falsafah kebangsaan yang luhur dan sejalan dengan ajaran Islam. Sila Ketuhanan Yang Mahas Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; secara esensi selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam. Negara Pancasila yang mengandung jiwa, pikiran, dan cita-cita luhur sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 itu dapat diaktualisasikan sebagai *Baladatul Thayyibatun wa Rabbun Ghafur* yang berprilaku maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat dalam naungan ridha Allah swt.¹⁴ Bahwa Negara Pancasila merupakan hasil konsensus nasional (*dar al-Ahdi*) dan tempat pembuktian atau kesaksian (*Dar al-Syahadah*) untuk menjadi negeri yang aman dan damai (*dar al-salam*).¹⁵

Lebih lanjut, Muhammadiyah menegaskan bahwa Negara Ideal yang dicita-citakan Islam adalah negara yang diberkahi Allah karena penduduknya beriman dan bertakwa (Q.S.al-A'raf/7:96), beribadah dan memakmurkannya (Q.S.al-Zariyah/51:5,6; (Hud/11:61) menjalankan fungsi kekhalifahan dan tidak membuat kerusakan di dalamnya (Q.S.al-Baqarah/2:11,30), memiliki relasi hubungan dengan Allah (*hablun min Allah*) dan dengan sesama (*hablun min al-nas*) yang harmonis (Q.S.Ali Imran/3:112), mengembangkan pergaulan antar komponen bangsa dan kemanusiaan yang setara dan berkualitas taqwa (Q.S.al-Hujarat/49:13), serta menjadi bangsa unggulan bermartabat (*khairu ummah*) (Q.S.Ali Imran/3:110).¹⁶ Teks Q.S.Ali Imran/3:110;

¹⁴ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Negara pancasila sebagai *Dar al-Ahdi wa al-Syahada*, Yogyakarta, cetakan ke-4 Juni 2017, h. 14.

¹⁵ *ibid.*

¹⁶ *Ibid.* h.14-15.

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ...

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah...

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia adalah ideologi negara yang mengikat seluruh rakyat dan komponen bangsa. Pancasila bukan agama, tetapi substansinya mengandung dan sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa Pancasila itu Islami karena substansi pada setiap silanya selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam Pancasila terkandung ciri keislaman dan keindonesiaan yang memadukan nilai-nilai ketuhanan dan keindonesiaan (*humanisme religius*), hubungan individu dan masyarakat, kerakyatan dan permusyawaratan, serta keadilan dan kemakmuran. Melalui proses integrasi keislaman dan keindonesiaan yang positif itu, umat Islam Indonesia sebagai kekuatan mayoritas dapat menjadi teladan yang baik (*uswah hasanah*) dalam mewujudkan cita-cita nasional yang sejalan dengan idealisasi *Baldatun wa Rabbun Ghafur*.

Kesimpulannya, Muhammadiyah berpandangan bahwa segenap umat Islam Indonesia harus berkomitmen menjadikan Negara Pancasila sebagai *Dar al-Syhadah* atau negara tempat bersaksi dan membuktikan diri dalam mengisi dan membangun kehidupan kebangsaan. Dalam Negara Pancasila sebagai *Dar al-Syhadah*, umat Islam harus siap bersaing untuk mengisi dan memajukan kehidupan bangsa dengan segenap kreasi dan inovasi yang terbaik. Dalam hal ini, Muhammadiyah sebagai komponen strategis umat dan bangsa memiliki peluang besar untuk mengamalkan etos *fastabiqul khairat* itu dan tampil sebagai kekuatan yang berada di garis

depan (*a leading force*) untuk mengisi dan memimpin kehidupan kebangsaan yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat sejajar dengan negara-negara lain yang telah maju dan berperadaban tinggi.

Hanya saja faktanya, menurut pandangan Muhammadiyah dalam kenyataan hidup berbangsa dan bernegara, nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan sehingga penyelenggaraan pemerintahan masih diwarnai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Perlu perjuangan yang panjang, usaha yang maksimal dan komitmen bersama semua komponen bangsa untuk terus mengokohkan eksistensi nasionalisme dalam bingkai NKRI. Jika semua komponen bangsa memiliki visi dan misi yang sama, maka nasionalisme akan terus kokoh dan kuat, bahkan akan menjadi kekuatan yang dahsyat untuk membangun negara dan bangsa Indonesia yang lebih maju, beradab, sejahtera dan berkeadilan.

2. Pandangan Nahdhatul Ulama tentang keberadaan Nasionalisme

Jika menelaah pandangan seorang intelektual *Andree Fiellard* dalam tulisannya yang disampaikan dalam konferensi Islam dan konstruksi atas sosial dan identitas, memberikan gambaran bahwa Nahdlatul Ulama' bukan semata-mata organisasi para Ulama' yang hanya berkiprah dalam pusran agama saja ia lahir di atas motifasi dan tantangan nyata dalam rangka mempertahankan kultur agama Islam ala *Ablussunnah Wal Jama'ah* dari rongrongan faham lain yang datang mengancam dan menentang organisasi para penjajah Belanda.¹⁷ Sejarah mencatat keberadaan sejarah NU menjadi salah satu *soko guru* kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia.

¹⁷ Lihat, *Materi dasar nahdlatul ulama'*, PW LP Ma'arif NU Jawa Tengah Th. 2002, h.17.

Selanjutnya, jika ditelusuri ketika nahdhatul Ulamaa (NU) terlibat dalam bingkai politik kebangsaan dan lebih kongkrit lagi ketika NU dalam politik praktis tahun 1952. Ia merupakan kumpulan multi dimensional yang menurut catatan seorang intelektual Belanda *Clifford Gertz*, partai-partai politik (santri Jawa) ³/₄ termasuk didalamnya NU ³/₄ lebih merupakan organisasi sosial, ukhuwah, dan keagamaan. Dalam kisarai ini visi kebangsaan NU tampak mengkristal dan keutuhannya tampak tidak terbantahkan, tercatat dalam setiap sejarah tampil sebagai pelopor yang memiliki semangat jiwa nasionalisme yang sangat tinggi.¹⁸

Nasionalisme bisa dimaknai sebagai rasa atau faham kebangsaan, yakni tentang faham etika keikutsertaan dalam pembangunan kesetiaan dan perasaan kebangsaan yang diharapkan mampu sebagai pangkal terhadap kemungkinan datangnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan bagi kelangsungan kehidupan suatu bangsa.

Menurut Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj periode 2015-2020, mengungkapkan dalam sejarah Indonesia, terjadi penyatuan antara elemen santri dan nasionalis. Oleh karenanya, santri-nasionalis bukan jargon politik semata. "Berkali-kali kaum santri dan nasionalis menyelamatkan Indonesia dari perpecahan," katanya saat menghadiri Haul Presiden pertama Soekarno (Bung Karno) ke-48 di Kota Blitar, Jawa Timur, Rabu (20/6) malam. Kiai Said mencontohkan kerjasama antara Bung Karno dan pendiri NU, KH Hasyim Asyari di masa pergerakan kemerdekaan. Bung Karno bertanya tentang hukum membela Tanah Air, dan dijawab KH Hasyim secara tegas sebagai *jihad fisisabilillah*. "Kerjasama Bung Karno dan Mbah Hasyim menunjukkan kepada kita semua bahwa

¹⁸*Ibid.*

menjadi Muslim juga bisa menjadi Indonesia pada saat yang bersamaan," ujarnya.¹⁹

Selanjutnya, nasionalisme Bung Karno juga lahir dari rahim keimanan. Itulah yang dalam bahasa Mbah Hasyim disebut sebagai *hubbul wathan minal iman*; cinta tanah air sebagian dari iman. "Agama dan nasionalisme bukan dua kutub berseberangan, keduanya saling menguatkan," demikian ungkapan Kiai Said. Beliau juga menjelaskan, kedatangannya pada haul Bung Karno dilakukan secara sengaja, karena hal itu bagian dari ibadah dan rasa cinta kepada tanah air Indonesia. Ia meminta kepada seluruh elemen masyarakat ter khusus Nadhiyin untuk mengikuti jiwa Soekarno dalam kecintaan kepada Indonesia. "Bung Karno mencintai Indonesia dengan pikiran dan tindakan yang konsisten dan sepenuh hati," kata Kiai Said yang pada kesempatan tersebut memimpin tahlil dan doa untuk Bung Karno. Kiai Said menambahkan, momen yang bisa dipetik pada haul Bung Karno sangat banyak. Di era media sosial yang dipenuhi dengan kebencian, permusuhan, dan adu domba, pemikiran dan tindakan Bung Karno sangat dibutuhkan. "Yaitu pemikiran yang tulus mencin tai Indonesia, tindakan yang membela keutuhan bangsa apa pun resikonya," papar pengasuh Pesantren Luhur Atsaqafah, Ciganjur, Jakarta Selatan ini.²⁰ Bagi Kiai Said, Indonesia beruntung memiliki tokoh sekelas Bung Karno. Keberadaan tokoh asli Jawa Timur ini membuat Indonesia terhindar dari perpecahan yang justru terjadi di negara-negara di Timur Tengah. "Bung Karno ini hebat karena mam pu menjahit nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas," ungkap Kiai Said.

Dengan demikian, rasa kebangsaan dan ketaatan kepada agama seperti yang dimiliki Bung Karno harus diteruskan oleh

¹⁹ <http://www.nu.or.id/post/read/92040/kiai-said-agama-dan-nasionalisme-saling-menguatkan>.

²⁰*Ibid.*

generasi masa kini dan yang akan datang. "Tugas kita tinggal meneruskan, memba ngun, mengisi kemerdekaan ini," tegasnya. Sementara itu, Ketua PBNU H Saifullah Yusuf mengatakan Jawa Timur adalah pondasi nasionalis dan Islam. Dari provinsi ini, lahir seorang tokoh besar dan Bapak Bangsa yakni Bung Karno, Putra Sang Fajar. "Dari Jatim pula tumbuh kesadaran pergerakan umat Islam, antara lain tercermin dari terbitnya Resolusi Jihad yang menggelorakan semangat melawan penjajahan," ungkap Gus Ipul. Menurutnya dua kekuatan itulah yang mesti terus dijalin kebersamaannya demi utuhnya bangsa Indonesia. "Dengan keutuhan bangsa, kita bisa membangun dan menyejahterakan rakyat dalam bangunan Indonesia Raya," pungkas Gus Ipul. Haul Bung Karno diisi dengan tahlil dan doa, serta tabur bunga di makam Bung Karno. Puluhan kiai sepuh juga terlihat dalam rangkaian haul, di antaranya Pengasuh Pondok Pesantren Ploso, Kediri KH Zainuddin Jazuli dan KH Nurul Huda Jazuli; Pengasuh Pesantren Al Amin Kediri, KH Anwar Iskandar; Wakil Rais Aam PBNU, KH Miftachul Ahyar; serta sejumlah kiai lainnya.²¹

Haul Bung Karno mengacu pada tanggal kewafatannya yakni 21 Juni 1970. Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada umur 69 tahun. Sukarno menjabat kursi Presiden pada periode 1945–1967. Bersama Mohammad Hatta, ia adalah Proklamator Kemerdekaan Indonesia, yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno pula yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.²²

Nahdhatul Ulama menegaskan bahwa dalam rangka kebang saan, sikap eklektik-kosmopolitan ini kemudian membuahkan kesi nambungan antara bangsa (*nation*) dan

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

negara (*state*). Dengan cara ini, nasionalisme kita akhirnya bersifat etno-simbolis: perpaduan antara kultur lama dengan kebaruan sistem negara modern. Salah satu pondasi utama kultur itu adalah kebangsaan Nusantara yang dirajut oleh Islam. Inilah yang dilakukan NU sehingga pada Mukhtamar ke-11 (1936), ia mensahkan wilayah Hindia-Belanda (Nusantara) sebagai *dar al-Islam* (negeri Islam). Artinya, NU telah membentuk “nasionalis me Islam” (*Islamic nationhood*), karena ketika Nusantara diakui sebagai “negeri Islam”, ia wajib dibela dari penjajahan.²³

Oleh karena itu, segenap argumentasi politik NU selalu berba sis Islam. Misalnya, pengesahan pemerintah RI sebagai *waliyyul amri al-dlaruri bi al-syaukah*, berangkat dari kebutuhan adanya *ulil amri* demi penerapan syariat Islam. Hal serupa terjadi pada penerimaan atas Pancasila. Keselarasan antara perlindungan hak warga negara dalam Pancasila dengan perlindungan hak dasar manusia (*kulliyatul kbams*) dalam *maqashid al-syari’ah*, membuahkkan kewajiban penempatan Islam sebagai tujuan kemasyarakatan (*social purpose*) ketika bangu nan masyarakat telah diatur oleh dasar negara. Dengan kata lain, ketika Pancasila menjadi “bangunan rumah”, Islam berperan sebagai “rumah tangga”. Dengan cara ini, Islam akhirnya bisa menjadi komple men: penyempurna pembangunan, melalui keikutsertaan dalam peneta pan dasar serta tujuan pembangunan. Fungsi strategis ini yang tidak dilihat orang, sebab dengan menerima Pancasila, NU bisa berperan dalam merumuskan tujuan pembangunan.²⁴

Dalam dirinya sendiri, Pancasila juga bersifat strategis. Sebab dengan keberadaan Ketuhanan Yang Maha Esa di

²³ <http://www.nu.or.id/post/read/42511/nu-dan-semangat-kebangsaan>, juga hasil wawancara peneliti dengan K.H. Abdul Manan A. Ghani, di Jakarta, 30 Juli 2018.

²⁴ *Ibid.*

dalam sila pertama, ia telah mencegah negara ini menjadi teokrasi dan sekularisasi. Jika *integrasi* (kesatuan agama-negara) dan *separasi* (pemisahan agama-negara) ini dijumpai oleh Pancasila, melalui pembentukan “negara berketuhanan”.

Dengan demikian, pada titik inilah NU memerankan dua fungsi mendasar kekinian, di republik ini. *Pertama*, kekuatan penyeimbang di antara berbagai ekstrim ideologi dan politik sebagai realisasi dari prinsip *tawasuth* dan *tawazun*. Penjagaan atas “negara ketuhanan” merupakan jalan tengah antara “negara agama” dan negara sekular. Dengan cara ini NU menjaga di pangayom kemajemukan bangsa berdasarkan keluasan pandangan Islam. *Kedua*, demokratisasi. Dengan meletakkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan negara, NU telah menggerakkan *demokrasi sebagai proses*, bukan *demokrasi sebagai institusi*. Mengapa? Karena ia tidak terjebak dalam *demokrasi prosedural* yang menempatkan negara sebagai tujuan politik. Melainkan demokrasi praksis-substantif yang berupaya mewujudkan nilai-nilai demokratis demi peningkatan kualitas hidup rakyat. Melalui pendasaran fiqh politik seperti ini, NU akan menjadi garda depan demokratisasi di negeri ini.²⁵NU tidak mempertentangkan antara Islam dan Nasionalisme. Islam ataupun nasionalisme harus saling sinergi untuk keberlangsungan agama, bangsa, dan negara Indonesia. Dengan adanya nasionalisme, umat Islam akan bersatu.

Berdasarkan fakta bahwa keberadaan berbagai organisasi kemasyarakatan dan agama seperti NU terbukti dapat meredam potensi konflik di negeri ini”²⁶ “Islam saja tanpa nasionalisme akan menjadi ekstrem, dan nasionalis saja tanpa ada landasan Islam akan kering,” demikian kata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH

²⁵ <http://www.nu.or.id/post/read/42511/nu-dan-semangat-kebangsaan>.

²⁶ <http://pcnucilacap.com/nu-tidak-mempertentangkan-islam-dan-nasionalisme>.

me.

Said Aqil Siroj.²⁷ Di negara Indonesia, *alhamdulillah*, keberadaan ulama-ulama NU dengan nasionalismenya mampu menjaga keutuhan NKRI,” tegas Kiai Said. Sebab nasionalisme, kata Kiai Said, konflik yang berakar pada perselisihan paham keagamaan di Indonesia bisa dengan cepat diredam. Penerimaan Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini ditetapkan pada Munas Alim Ulama NU di Situbondo (1983), Pancasila diterima sebagai dasar negara sedangkan Islam tetap dijaga sebagai aqidah. Antara aqidah beragama dan dasar bernegara tidak dibenturkan, sebab Pancasila yang memuat sila ketuhanan, merupakan bentuk pengamalan syariat Islam. Melalui proses integrasi Islam ke dalam nasionalisme ini, NU telah melerai ketegangan antara Islam sebagai “ideologi universal” dan Pancasila sebagai “ideologi nasional”, serta antara Islam sebagai “paham theokratis” dan NKRI sebagai “bangunan negara-bangsa”.²⁸

Menurut pandangan K.H.Said Aqil Siradj, beliau adalah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, periode 2015-2020, menjelaskan dalam suatu karya tulisnya tentang kebangsaan atau nasionalisme Indonesia sebagai berikut:

“Kebangsaan Indonesia merupakan anugerah Tuhan yang harus disyukuri dan dibina. Mengingkari negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah perjanjian luhur Pancasila dan UUD 1945 sama halnya mencampakkan pesan-pesan yang telah diwariskan Nabi saw. Karena itu, semua upaya eksklusivitas agama yang diproyeksikan untuk memudarkan perjanjian luhur bangsa tersebut sebenarnya bukan tindakan yang diridhoi-Nya dan kontra agama. Aktivitas semacam itu tidak lebih upaya mendagangkan agama untuk kepentingan sesaat yang hanya menguntungkan dirinya serta status quo.

²⁷ <http://kiai-said-islam-tanpa-nasionalisme-akan-ekstrem>

²⁸ <http://www.santridayah.com/2013/07/konsep-negara-menurut-nu>.

Pembelokkan misi mulia agama semacam ini sekaligus membuat cabang-cabang (musyrik) dalam meyakini tuhan. Inilah kerusakan dan dosa yang paling besar bagi anak Adam. Semoga bangsa Indonesia, selamat dari upaya-upaya penghancuran kebangsaan menuju terciptanya masyarakat adil dan makmur, dengan segera melengserkan para penyelenggara yang mengingkari kebangsaan Indonesia yang sejati.²⁹

Dari penjelasan K.H.Said Aqil Siradj di atas memberikan pesan bahwa nasionalisme itu memiliki akar keagamaan, yang dalam hal ini Islam, yang menjadi agama mayoritas bangsa Indonesia. Jika demikian, keberadaan nasionalisme menurut NU harus disokong sepenuh hati lahir batin, sebab dia merupakan suatu perjanjian luhur bangsa Indonesia. Penguatan dan dukungan terhadap Nasionalisme Indonesia, adalah dengan tetap memperjuangkan tegaknya 4 pilarnya, yaitu: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Senada dengan hal di atas, K.H.Abdul Manan A.Ghani,³⁰ mengungkapkan bahwa NU sudah menetapkan bahwa nasionalisme itu bukan saja harus didukung oleh bangsa Indonesia umumnya, dan warga Nahdhiyyin khususnya, bahkan menjadi kewajiban untuk semua komponen bangsa. NU, dengan latar belakang yang jelas berjuang untuk negara Indonesia bahkan sebelum kemerdekaan, sampai kini, salah satu bukti perjuangannya adanya resolusi jihad dalam mempertahankan NKRI di awal kemerdekaan, maka NU berketetapan bahwa keberadaan nasionalisme wajib dilestarikan, diperkuat dan diperkokoh oleh segenap komponen bangsa.

²⁹Said Aqil Siradj, *Islam Kebangsaan, Fiqih Demokratik Kaum Santri* (Jakarta : Pustaka Ciganjur, 1999), h. 19 5.

³⁰Wawancara peneliti dengan K.H.Abdul Manan A.Ghani, pada Senin, 30 Juli 2018, di Kantor PB. NU Jakarta. Beliau adalah salah seorang Ketua PB NU periode 2015-2020.

C. Ulama Ormas Islam Indonesia dalam Merespon Nasionalisme Lewat Pemahaman keagamaan

Jika disimak perjalanan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama, sejak zaman sebelum kemerdekaan Indonesia, tidak ada yang meragukannya berkenaan dengan nasionalismenya. Bahkan kedua ormas ini telah memiliki jasa dan kontribusi yang sangat besar terhadap berdirinya Negara Republik Indonesia. Kedua ormas ini telah ikut berjuang bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa untuk kemerdekaan RI.

Kedua ormas ini, pada prinsipnya memiliki perjuangan yang sama, yakni menegakkan nilai-nilai keagamaan, yakni Islam dan keindonesiaan sekaligus. Nilai-nilai agama Islam yang universal, yang dianut kedua ormas ini, hendak diwujudkan dalam negara RI, tanpa mempertentangkan antara negara nasional RI dengan pemahaman agama Islam. Sebab telah menjadi komitmen bersama dalam berbangsa dan bernegara untuk menjunjung tinggi 4 (empat) pilar nasionalisme Indonesia, yaitu: dasar negara Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. Berikut ini akan diuraikan bagai ana kedua ormas ini dalam merespon tentang nasionalisme lewat pemahaman agama.

1. Respon Muhammadiyah tentang Pandangan Agama terhadap Nasionalisme

Muhammadiyah memandang bahwa cita-cita nasional sebagai mana terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan kristali sasi dari jiwa perjuangan bangsa sebelum maupun sesudah kemerdekaan, yang sekaligus merupakan cita-cita Indonesia Berkemajuan. Konsep Indonesia berkemajuan memiliki semangat yang sama dengan ungkapan “memajukan kesejahteraan umum” yang mengandung nilai kebaikan,

keadilan, kemakmuran, dan keberadaaan. Pendeknya adalah kondisi yang lebih baik.³¹ Selanjutnya Muhammadiyah membe rikan penjelasan tentang arti dan makna berkemajuan.

Dapat dikatakan bahwa maksud dari berkemajuan adalah mengandung arti proses dan sekaligus tujuan yang bersifat ideal untuk mencapai kondisi unggul, berada di garis depan atau memimpin di semua bidang kehidupan-material dan spiritual, jasmani dan rohani, lahir dan batin. Berkemajuan menyiratkan adanya keberlangsungan, dan bahkan *progress*, sebagai perwujudan daari usaha yang terus menerus untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang bermakna (*sustainable deveolptment with meaning*).³²

Kaitannya dengan agama, dalam hal ini Islam, maka Muham madiyah menegaskan bahwa agama merupakan ajaran yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Agama sebagai sumber nilai utama yang fundamental berfungsi sebagai kekuatan transendental yang luhur dan mulia bagi kehidupan bangsa. Nilai-nilai intrinsik keagamaan telkah memberi inspirasi bagi para pendiri bangsa dan perumus cita-cita negara dalam mewujudkan kehidupan kebangsaan yang berbasis pada ajaran agama. Nilai-nilai agama bahkan tercermin dalam Pancasila sebagai ideologo negara.³³ Bahkan agama bukan hanya kumpulan tuntunan ritual ibadah dan doktrin moral yang terkandung dalam ajaran kitab suci, lebih darin itu, agama merupakan model perilaku yang

³¹Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Indonesia Berkemajuan, Rekonstruksi Kehidupan Bangsa an Yang Bermakna*, Jakarta: cet. Ke-5, 2017, h. 10.

³²*Ibid.* Muhammadiyah juga menegaskan bahwa Indonesia berkemajuan memiliki banyak dimensi: *Pertma*, berkemajuan dalam semangat, alam pikir, perilaku dan sednantiase berorientasi ke masa depan. *Kedua*, berkemajuan untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik dalam kehidupan material dan spiritual. *Ketiga*, berkemajuan untuk menjadi unggul di berbagai bidang dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain. Semangat inilah yang akan melkahirkan nasionalisme yang kuat bagi warganya.

³³*ilbid.* h. 45.

tercermin dalam tindakan nyata yang mendorong penganutnya memiliki watak jujur dan dipercaya, dinamis, kreatif dan kerkemajuan. Agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah yang Maha Pencipta (*habl min Allah*), tetapi juga mengatur dan memberi arah kehidupan dalam hubungan antar umat manusia (*habl min al-nas*) yang membentuk peradaban hidup yang utama.³⁴ Hal ini ada ditegaskan dalam Alquran surat Ali Imran/3:112:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدَّلَّةُ أَيْنَ مَا تُقْفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ
وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ...

Mereka diliputi kebinaaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kemiskinan/kesengsaraan..

Ayat di atas lebih menegaskan bahwa jika tidak berpegang teguh pada agama yang hubungannya (ibadah) kepada Allah (*habl min Allah*), serta hubungan atau perjanjian dengan manusia, yang merupakan norma atau hukum yang sudah disepakati sesama manusia, jika kedua hal ini dilanggar, maka sanksinya ada 3 hal, yaitu manusia tersebut akan diliputi kehinaan di mana saja ia berada, kedua, Allah akan murka, dan ketiga akan mendapat kesengsaraan. Jadi, esensinya mesti memiliki hubungan yang baik kepada Allah swt dan hubungan yang baik pula kepada sesama manusia.

Berdasarkan hal di atas, maka agama bagi kehidupan bangsa Indonesia dapat dijadikan sebagai sumber nilai kema-juan. Nilai-nilai agama dapat menumbuhkan etos keilmuan, orientasi pada perubahan, kesadaran akan masa depan yang lebih baik, pendayagunaan sumberdaya alam secara cerdas dan bertanggungjawab, inovasi atau pembaruan, kebersamaan

³⁴*Ibi.h.* 46

dan toleransi, disiplin hidup, kemandirian, serta hal-hal lain yang membawa pada kemajuan hidup bangsa. Nilai-nilai agama juga dapat mengembangkan relasi sosial antara laik-laki dan perempuan yang adil tanpa diskriminasi, serta hubungan antara umat manusia yang berkeadaban mulia. Dengan nilai-nilai agama itu bangsa Indonesia dapat menjalani kehidupan di abad modern yang membawa pada keselamatan dunia dan akhirat.³⁵

Jadi, bagi Muhammadiyah, Islam yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia merupakan agama yang mengandung ajaran-ajaran tentang kemajuan (*din al-hadharah*), yang berwatak progressif dan sesuai dengan alasan pikiran masyarakat moderen. Karenanya Islam dapat menjadi sumber nilai yang penting dan utama bagi usaha-usaha membangun kehidupan kebangsaan, atau nasionalisme, menuju Indonesia berkemajuan.

Muhammadiyah menawarkan dalam hal mengokohkan nasionalisme di Indonesia yang berkualitas dan berkemajuan lewat nilai-nilai agama salah satunya adalah mewujudkan kepemimpinan yang profetik. Kepemimpinan yang profetik adalah memiliki kualitas ruhaniah yang memadukan keseimbangan hubungan dengan Tuhan (Allah swt) dan dengan sesama umat manusia serta lingkungannya untuk membangun peradaban hidup yang utama. Setidaknya ada 7 kriteria yang mesti dimiliki dalam kepemimpinan profetik, yaitu:

- 1) Relijius, kata sejalan dengan tindakan dan bertanggung jawab.
- 2) Visi dan karakter kuat sebagai negarawan, yang mengutamakan kepentingan bangsa (nasionalis) dan negara ketimbang diri sendiri, partai politik, dan kroni.

³⁵ *ibi.*

- 3) Berani mengambil berbagai keputusan strategis dan memecahkan masalah-masalah krusial bangsa.
- 4) Mewujudkan *good governance*, tegas dalam melakukan pemberantasan korupsi, penegakkan hukum, serta penyematan aset dan kekayaan negara.
- 5) Menjaga kewibawaan dan kedaulatan nasional dari berbagai ancaman di dalam dan di luar negeri.
- 6) Melepaskan jabatan partai politik dan fungsi-fungsi lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan serta mengganggu jalannya pemerintahan dala memimpin bangsa dan negara.
- 7) Memiliki strategi perubahan yang membawa pada kemandirian bangsa.³⁶

Dari penjabaran karakter kepemimpinan profetik di atas, maka para pemimpin di berbagai sektor dan tingkatan mesti memiliki dan menjunjung tinggi kebenaran (*siddiq*), kejujuran dan bertanggung jawan (*amanah*), menyampaikan kebenaran secara transparan (*tabligh*), dan cerdas dalam mengelola aset negara (*fathanah*). Selanjutnya, para pemimpin mesti menunjukkan keteladanan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keteladanan elit menjadi kunci penting bagi tumbuhnya kepercayaan sebagai pusat identifikasi diri bagi rakyat, serta menjadi modal sosial dan ruhaniah yang berharga untuk kemajuan bangsa.

Muhammadiyah berkaitan dengan nasionalisme di Indonesia telah membuat keputusan khusus yakni pada Khittah Muhammadiyah tahun 2002, yaitu Khittah Muhammadiyah dalam Kehidupan Berbangsa dan bernegara. Muhammadiyah berpaandangan bahwa agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan meliputi akidah, ibadah akhlak dan *mu'amalah duniawiyah* yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan dalam kehidupan perseorangan maupun kolektif.

³⁶*Ibid.* h. 50.

Dengan mengemban misingerakan tersebut Muhammadiyah dapat mewujudkan atau mengaktualisasikan agama Islam menjadi *rahmatan lil 'alamin* dalam kehidupan di muka bumi ini. Muhammadiyah menegaskan bahwa berkiprah dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu pearwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan dakwah amar makruf nahi mungkar sebagaimana telah menjadi pamggilan sejarahnya sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia.³⁷

Selanjutnya Khittah Denpasar tahun 2002 atau Khittah Muhammadiyah dalam Berbangsa dan Bernegara yang bersifat lengkap itu berisi sembilan butir pernyataan pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Muhammadiyah meyakini bahwa politik dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam dalam urusan keduniawian (*al-umum ad-dunyawiyat*) yang harus selalu dimotivasi, dijiwai, dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur agama dan moral yang utama.
2. Muhammadiyah meyakini bahwa negara dan usaha-usaha membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui perjuangan politik maupun melalui pengembangan masyarakat, pada dasarnya merupakan wahana yang mutlak diperlukan untuk membangun kehidupan di mana nilai-nilai Ilahiah melandasi dan tumbuh subur bersamaan dengan tegaknya nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, perdamaian, ketertiban,

³⁷Haedar Nashir, *Kuliah Kemuhammadiyah* 2 (Jogyakarta: Suara Muhammadiyah, cet. Juli 2018), h. 115. Lihat juga, <https://zuriatigm.wordpress.com/2012/06/29/khittah-perjuangan-dalam-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara-khittah-denpasar-tahun-2002/>. Peran Muhammadiyah dalam kehidupan bangsa dan negara tersebut diwujudkan dalam langkah-langkah strategis dan taktis sesuai kepribadian, keyakinan dan cita-cita hidup, serta khittah perjuangannya sebagai acuan gerakan sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab dalam mewujudkan *baldaun thoyyibatun wa Fabbun ghafur*.

kebersamaan, dan keadaban untuk terwujudnya “*Baladatul Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*”.

3. Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan atau pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya masyarakat madani (*civil society*) yang kuat sebagaimana tujuan Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
4. Muhammadiyah mendorong secara kritis atas perjuangan politik yang bersifat praktis atau berorientasi pada kekuasaan (*real politics*) untuk dijalankan oleh partai-partai politik dan lembaga-lembaga formal kenegaraan dengan sebaik-baiknya menuju terciptanya sistem politik yang demokratis dan berkeadaban sesuai dengan cita-cita luhur bangsa dan negara.
5. Muhammadiyah senantiasa memainkan perannya sebagai wujud dari dakwah *amar ma'ruf nahi mun kar* dengan jalan mempengaruhi proses dan kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan cita-cita luhur bangsa. Muhammadiyah secara aktif menjadi kekuatan perekat bangsa dan berfungsi sebagai wahana pendidikan politik yang sehat menuju kehidupan nasional yang damai dan berkeadaban.
6. Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun. Muhammadiyah senantiasa mengembangkan sikap positif dalam memandang perjuangan politik dan menjalankan fungsi kritik sesuai dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* demi tegaknya sistem politik kenegaraan yang demokratis dan berkeadaban.
7. Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap anggota Persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai hati nurani masing-masing. Penggunaan hak pilih tersebut harus berupa

kan tanggungjawab sebagai warga negara yang dilaksanakan secara rasional dan kritis, sejalan dengan misi dan kepentingan Muhammadiyah, demi kemaslahatan bangsa dan negara.

8. Muhammadiyah meminta kepada segenap anggotanya yang aktif dalam politik untuk benar-benar melaksanakan tugas dan kegiatan politik secara sungguh-sungguh dengan mengedepankan tanggung jawab (*amanah*), akhlak mulia (*akhlak al-kari mah*), keteladanan (*uswah hasanah*), dan perdamaian (*islah*). Aktifitas politik tersebut harus sejalan dengan upaya memperjuangkan misi Persyarikatan dalam melaksanakan da'wah amar ma'ruf nahi munkar.
9. Muhammadiyah senantiasa bekerjasama dengan pihak atau golongan mana pun berdasarkan prinsip kebajikan dan kemaslahatan, menjauhi kemudharatan, dan bertujuan untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik, maju, demokratis dan berkeadaban.³⁸

Demikian pandangan Muhammadiyah tentang nasionalisme yang dikaitkan dengan agama. Kemudian, jika menelaah dalam sejarah maka Paparan Benni Setiawan dalam Nasionalisme Muhammadiyah, mengutip perkataan Muarif bahwa terbagi menjadi tiga periode dalam proses nasionalisme Muhammadiyah yaitu pertama pada masa Kyai Ahmad Dahlan nasionalisme dimaknai sebagai konteks persatuan. Zaman kedua masa Kyai Ibrahim Nasionalisme berarti Indonesia, sedangkan terakhir pada zaman Kyai Mas Mansur penerjemahan nasionalisme adalah semangat patriotik.³⁹

Selanjutnya dalam kehidupan kebangsaan Muhammadiyah sejak awal berjuang untuk pengintegrasian keislaman dan

³⁸ *Ibid.* h. 116-117.

³⁹ Acep Zamzam Nur, Zuly Qodir, dkk., *Muhammadiyah Bicara Nasionalisme* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 133.

keindonesi aan. Bahwa Muhammadiyah dan umat Islam merupakan bagian integral dari bangsa dan telah berkiprah dalam membangun Indonesia sejak pergerakan kebangkitan nasional hingga era kemerdekaan. Muhammadiyah terlibat aktif dalam peletakan dan penentuan fondasi negara-bangsa yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Muhammadiyah berkontribusi dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara politik Islam yang berwawasan kebangsaan di tengah pertarungan berbagai ideologi dunia. Sejak awal Muhammadiyah memiliki wawasan kebangsaan yang jelas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan konsensus nasional yang final dan mengikat seluruh komponen bangsa dengan menjadikan Muhammadiyah sebagai perekat dan pemersatu bangsa, sesuai dengan ayat Alquran Surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat di atas menjadi panduan Muhammadiyah dalam bermua malah kepada siapapun, tidak saja kepada sesama warga Muhammadiyah, sebangsa dan setanah air, bahkan pada masyarakat dunia untuk saling kenal mengenal. Karena pada prinsipnya manusia itu adalah bersaudara, yang dalam Islam dikenal dengan persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah basyariyah* atau *ukhuwah insaniyah*).

Oleh karena itu, menurut salah seorang tokoh Muhammadiyah Sumatera Utara Ustaz Irwansyahputra,⁴⁰ Muhammadiyah sudah teruji dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, kontribusinya dalam mewujudkan dan mengokohkan nilai-nilai nasionalisme, tak terbantahkan oleh siapapun yang berminat meneliti tentang Muhammadiyah. Lewat amal usaha Muhammadiyah dengan jalur pendidikan, Muhammadiyah menyelenggarakannya secara terbuka untuk bangsa Indonesia, tidak membedakan suku, ras dan agama. Sehingga terkadang sekolah-sekolah Muhammadiyah murid atau pelajarnya lebih banyak yang beragama non-Muslim ketimbang Muslim, hal ini dapat dilihat di propinsi paling ujung Indonesia, yakni Papua. Sikap keberagaman Muhammadiyah yang inklusif inilah membuat Muhammadiyah bisa diterima semua pihak termasuk non-Muslim. Jadi, paham agama Muhammadiyah sangat mendukung kokohnya nasionalisme bangsa Indonesia. Dengan kokohnya nasionalisme bangsa Indonesia diharapkan akan mewujudkan bangsa yang mandiri dalam segala hal, terutama dalam memenuhi kebutuhan primer rakyatnya, jadi kita tidak sangat tergantung dengan bangsa lain dalam hal pemenuhan kebutuhan primer.

Hal yang senada juga dikatakan oleh Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA,⁴¹ bahwa Muhammadiyah sangat kaya gagasan-gagasan yang segar untuk memajukan negara Indonesia dan menguatkan nasionalisme bangsanya. Hal terbukti dengan banyaknya amal usaha Muhammadiyah dalam berbarbagai bidang, dari mulai dari pendidikan telah terbangun ribuan TK, SD/MDI, SMP/MTs dan SMU/MA dan ratusan Perguru Tinggi, kesehatan dengan hadirnya rumah sakit Muhammadi

⁴⁰Wawancara peneliti dengan Drs. Irwansyahputra, MA, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, periode 2015-2020, pada Sabtu, 13 oktober 2018.

⁴¹Wawancara peneliti dengan Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA, beliau adalah Wakil Ketua Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yang embidangi Majelis Tarjih dan Tajdid, periode 2015-2020.

yah di setiap propinsi, panti asuhan, serta amal usaha di bidang ekonomi. Itu semua adalah dalam rangka membangun bangsa yang berkemajuan dan menmgokohkan nasionalisme. Dorongan dan motivasi dilakukan hal tersebut, tidak lain adalah dalam rangka mengamalkan ajaran Islam, karna Muhammadiyah didirikan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya berdasarkan Alquran dan *as-sunnah al-maqbulah*.

2. Respon Nahdhatul Ulama tentang Pandangan Agama terhadap Nasionalisme

Nahdhatul Ulama (NU) juga memiliki pandangan yang hampir sama dengan Muhammadiyah. Hanya saja NU, yang dalam berbagai gerakannya tentu sarat dengan kaum ulama, karena ormas ini awalnya adalah kumpulan para ulama atau kiyai, sehingga ketika ada sesuatu yang mesti diselesaikan maka para ulamanyapun akan kumpul untuk membicarakannya. Kaitannya dengan nasionalisme, NU telah mengawalinya dengan sikap heroiknya dalam rangka nasionalisme mempertahankan negara RI yang baru saja merdeka ingin dijajah kembali oleh Belanda. Belanda pada waktu itu membonceng tentara sekutu. Maka, K.H.Hasyim Asy'ari atas nama Pimpinan PB NU, pada tanggal 22 Oktober 1945 mendeklarasikan seruan *jihad fi sabilillah*, yang dikenal dengan Resolusi Jihad. Setidaknya ada 3 (tiga) poin penting dalam resolusi Jihad, yaitu (1) setiap Muslim wajib memerangi orang kafir yang merintangan kemerdekaan Indonesia. (2) pejuang yang mati dalam perang kemerdekaan layak disebut syuhada. (3) warga Indonesia yang memihak penjajah dianggap sebagai pemecah belah persatuan nasional sehingga harus dihukum mati.⁴²

⁴²Abdullah Ubaid dan Mohammad bakir (editor), *Nasionalisme dan Islam Nusantara* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2015), h. 8-9.

Untuk menjaga eksistensi sekaligus memelihara kesinambungan peradaban bangsa Indonesia, agama dan nasionalisme tidak boleh dipisahkan karena keduanya merupakan faktor kunci yang sangat vital, demikian kata seorang petinggi Nahdlatul Ulama (NU), K.H.Maman Abd. Ghani.⁴³ Lebih lanjut, beliau mengatakan “Apabila pemahaman bahwa agama dan nasionalisme merupakan satu hal yang tidak bisa dipisahkan sudah mengakar dalam suatu bangsa maka tidak akan ada perang maupun kekerasan atas nama apa pun”.⁴⁴

Nahdhatul Ulama telah berusaha menghilangkan ketegangan antara agama dan budaya, yang selanjutnya menjadikan perjuangan Islam menjadi substantif. Oleh karenanya syariat Islam diwujudkan dengan mengutamakan pada tujuan (*maqashid al-syari'ah*) dan prinsip dasarnya (*mabadi' al-syari'ah*). Esensi Inti nilainya terdapat pada kemaslahatan serta moderatisme (*wasathiyah*) yang memungkinkan NU mewujudkan cita bukan dari idealisme, melainkan realisme. maknanya, untuk mewujudkan tujuan syariah, kaum tradisional ini berangkat dari realitas, baik realitas budaya maupun kenegaraan Indonesia. Ini yang membentuk Islam Nusantara yang menjadi basis-struktur bagi supra-struktur Islam Indonesia.

Berdasarkan itu, maka wacana Islam Nusantara mengindikasikan proses kembali ke akar nasionalisme NU karena corak kebangsaan organisasi ini dibentuk oleh pendekatan dakwahnya yang bersifat sosio-kultural. "Yang kultural" ini berbasis pada corak keislaman Nusantara. Sebagaimana KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan bagus mendefinisikan corak sosio-kultural NU ini. Menurut

⁴³Wawancara dengan peneliti dengan K.H.Maman Abd. Ghani, Senin, 30 Agustus 2018, di kantor PB NU Jakarta.

⁴⁴ Wawancara dengan peneliti dengan K.H.Maman Abd. Ghani, Senin, 30 Agustus 2018, di kantor PB NU Jakarta.

beliau, gerakan NU bersifat sosial karena beliau menginginkan perubahan struktur sosial menuju masyarakat berkeadilan. Namun, berbeda dengan gerakan sosio-politik yang memakai strategi politik (pendirian Negara Islam), NU menggunakan strategi kultural melalui dua langkah. *Pertama*, titik tekan atas nilai-nilai budaya masyarakat. *Kedua*, menggunakan modal budaya masyarakat terutama komunitas, lembaga dan asosiasi kulturalnya. Hal ini dilakukan Gus Dur melalui gerakan pengembangan masyarakat berbasis pesantren dekade 1980. Dalam hal ini, pesantren adalah modal budaya masyarakat yang dijadikan basis pengembangan ekonomi berdasar nilai-nilai Islam yang berkembang di pesantren.

Nasionalisme NU memang dibentuk di dalam Mukhtar atau Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama. *Pertama*, pengakuan wilayah Nusantara sebagai *dar al-Islam* (wilayah Islam) pada Mukhtar ke-11 di Banjarmasin (1936). Ini *mafhum* diketahui, di mana NU menetapkan wilayah Nusantara yang saat itu dikuasai pemerintah kolonial Belanda, sebagai *dar al-Islam*. Pemaknaan *dar al-Islam* bukan sebagai negara Islam (*daulah Islamiyyah*), melainkan wilayah Islam, telah menumbuhkan nasionalisme karena NU menga kui Nusantara sebagai tanah kaum Muslim. Karena status keislaman ini, Hadhratus Syaikh Hasyim Asy'ari mengeluarkan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945. Membela tanah air dari penjajahan, *fardlu 'ain* hukumnya.

Kedua, afirmasi atas pembentukan negara-bangsa (*nation-state*) Indonesia, bukan negara Islam. Ini terjadi pada keterlibatan Kiai Wahid Hasyim pada Sidang BPUPKI-PPKI 1945. *Ketiga*, penahbisan Presiden Republik Indonesia (RI) sebagai pemimpin dalam keadaan darurat yang memiliki otoritas (*wahy al-amri al-dlaruri bi al-syaukah*) melalui Munas Alim Ulama di Cipanas (1954). Disebut darurat, karena presiden RI tidak sepenuhnya sah menurut fikih Sunni, sebab tidak memenuhi

syarat sebagai khalifah dunia Islam. Namun secara konstitusional, ia memiliki kekuasaan sehingga sah menerapkan syariah Islam, terutama penunjukan wali hakim dalam pernikahan Muslim. Melalui penahbisan ini, pemerintah RI sah secara *syar'i*. *Keempat*, pembelaan Demokrasi Pancasila sebagai pilihan otentik dibanding Demokrasi Terpimpin, liberal dan komunis pada Muktamar ke-24 di Bandung (1967). *Kelima*, penerimaan atas Pancasila pada Munas Alim Ulama di Situbondo (1983). Serta keenam, Maklumat Penyelamatan NKRI dan Pancasila dari fundamentalisme agama dan pasar pada Harlah ke-85 NU (2011).

Seluruh fase kebangsaan ini terhenti pada legitimasi Islam atas nasionalisme dalam rangka bentuk negara. Hal ini bisa dipahami sebab NU berkepentingan menjaga NKRI dari delegitimasi radikalisme Islam. Akan tetapi di masa ketika reformasi politik telah berjalan meninggalkan nasionalisme paska-kolonial; nasionalisme NU perlu diperbarui demi demokratisasi yang makin substantif. Untuk hal ini perlu dilakukan beberapa hal.

Pertama, pendalaman nasionalisme menuju apa yang Soekarno sebut sebagai sosio-nasionalisme. Dalam kerangka ini, nasionalisme bukan hanya pembelaan atas bangunan negara-bangsa. Melainkan perwujudan tujuan pendirian negara yang oleh Pancasila diarahkan menuju keadilan sosial. *Kedua*, transformasi pemikiran politik Sunni klasik, menuju politik NU yang berpijak pada konsep politik kontemporer. Ini sebenarnya potensial, sebab pendekatan *maqashid al-syari'ah* menempatkan politik sebagai *res publica* (kebaikan publik). Dengan potensi ini, pemikiran politik NU sejajar dengan teori republikanisme, yang membangkitkan kembali ontologi politik di tengah demokrasi prosedural manipulatif. Pada titik ini, Muktamar ke-33 tahun 2015, sebenarnya menawarkan warna baru dalam tradisi demokrasi melalui pemilihan Rais Aam

berdasarkan musyawarah dewan ulama tertinggi (*ahlul balli wal 'aqdi*). Ini dilakukan untuk menghindari politisasi yang terjadi dalam pemungutan suara (*voting*). Dengan demikian, NU telah mengawali transformasi demokrasi dari majoritarianisme kepada *syura* (musyawarah). Satu hal yang diidealkan oleh prinsip permusyawaratan Pancasila.

Kendatipun warna baru demokrasi di kalangan *nahdliyin* ini akan terhenti pada pemilihan pemimpin (*nashb al-imamah*), jika tidak dibarengi dengan pendalaman nasionalisme di atas. Dua agenda mendasar menanti. *Pertama*, penguatan etos kewarganegaraan, terutama di kalangan umat Islam. *Kedua*, radikalisme demokrasi dalam bentuk penguatan demokrasi partisipatoris menuju perwujudan *res publica*. Jika tidak, nasionalisme NU hanya terhenti di mimbar dakwah, namun abai dengan ketidakadilan struktural yang menjadi nasib keseharian negeri ini.

Berdasarkan pandangan Ketua Umum PB NU K.H. Said Aqil Siraj, beliau mengemukakan bahwa kiai-kiai pesantren di Indonesia telah berhasil membangun jembatan antara prinsip agama dan negara, berbeda dengan kondisi di Timur Tengah yang ia nilai tidak memiliki konsep titik temu antara agama dan negara, antara Islam dan prinsip kebangsaan. "Konflik yang terjadi di Timur Tengah tidak akan selesai jika belum ada titik temu antara prinsip agama dan prinsip negara," demikian beliau komentar, lulusan Universitas Ummul Qura, Makkah, Arab Saudi itu. Selanjutnya, beliau juga menegaskan, kesatuan antara agama dan nasionalisme di Indonesia telah menjadi perhatian bangsa asing yang ingin memecah bangsa Indonesia sejak dahulu "Kita masih ingat, kaum penjajah melakukan berbagai upaya untuk memisahkan antara Islam dan nasionalisme. Dan hal ini ingin dilakukan lagi oleh pihak-pihak yang tidak mau melihat bangsa kita kuat dan maju," katanya.

K.H.Said Aqil Siraj juga mengajak masyarakat Indonesia, khususnya yang bergama Islam, untuk meneladani pemikiran pendiri NU Hadratussyaikh, KH Hasyim Asyari, dalam memahami kaitan antara agama dan nasionalisme. Asyari percaya bahwa kesatuan antara agama dan nasionalisme merupakan satu fondasi kokoh untuk menghadapi berbagai macam tantangan bangsa seperti kebodohan, keterbelakangan, serta ancaman perpecahan bangsa. Mengutip pernyataan Asyari, K.H.Said Aqil Siraj mengemukakan bahwa menegakkan agama dan nasionalisme merupakan salah satu kewajiban bagi mereka yang merasa mempunyai iman sebagai seorang Muslim.⁴⁵

Menurut Pandangan NU, jika agama diartikan sebagai jalan hidup, sudah semestinya agama berperan dalam realitas kehidupan. Dalam konteks tersebut, realitas bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk menuntut seluruh elemen bangsa menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan. Di sinilah prinsip cinta tanah air harus diteguhkan. Perjuangan melawan dan mengusir penjajah ditegaskan Kiai Hasyim Asy'ari sebagai kewajiban agama atas seluruh rakyat Indonesia sebagai kaum beragama yang sedang terjajah.

Pandangan Kiai Hasyim Asy'ari tersebut tentu melihat masalah yang lebih luas, yakni kemerdekaan sebuah bangsa yang akan mengantarkan pada kemakmuran dan keadilan sosial. Tanpa didasari akan kesadaran membela tanah airnya, besar kemungkinan kolonialisme akan terus eksis di bumi pertiwi Indonesia.

Awalnya, ungkapan cinta tanah air yang dicetuskan Kiai Hasyim Asy'ari ini dikira hadits oleh sebagian orang, bahkan ulama-ulama di tanah hijaz (Mekkah dan Madinah), saking masyhurnya. Terlepas dari semua itu, apa yang dilakukan oleh

⁴⁵<https://tirto.id/nu-agama-dan-nasionalisme-adalah-kunci>.

Kiai Hasyim dan Asy'ari juga kontribusi ulama-ulama lain memberikan spirit nasionalisme tinggi. Tentu perjuangan ini harus diteruskan menyesuaikan dengan kondisi yang berbeda saat ini.

Cinta tanah air dapat diwujudkan melalui belajar tekun, menjaga kebersihan lingkungan, menghormati orang tua dan guru, menghargai sesama teman meskipun berbeda keyakinan, belajar agama kepada kiai atau ulama secara mendalam, dan berusaha agar keberadaannya mendatangkan manfaat untuk masyarakat, bangsa, dan negara.

Tanah air sebagaimana yang kita ketahui bersama adalah negeri tempat kelahiran. Ali bin Muhammad bin Ali Al-Jurjani (1984) mendefinisikan hal ini dengan istilah *al-wathan al-ashli* yaitu tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Al-Jurjani mengatakan, "*Al-wathan al-ashli adalah tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya.*"

Dari definisi ini, maka dapat dipahami bahwa tanah air bukan sekadar tempat kelahiran tetapi juga termasuk di dalamnya adalah tempat di mana kita menetap. Dapat dipahami pula bahwa mencintai tanah air adalah berarti mencintai tanah kelahiran dan tempat di mana kita tinggal.

Pada dasarnya, setiap manusia itu memiliki kecintaan kepada tanah airnya sehingga ia merasa nyaman menetap di dalamnya, selalu merindukannya ketika jauh darinya, mempertahankannya ketika diserang dan akan marah ketika tanah airnya dicela. Dengan demikian mencintai tanah air adalah sudah menjadi tabiat dasar manusia. Kesimpulannya adalah bahwa mencintai tanah air bukan hanya karena tabiat, tetapi juga lahir dari bentuk dari keimanan kita. Karenanya, jika kita mengaku diri sebagai orang yang beriman, maka mencintai Indonesia sebagai tanah air yang jelas-jelas

penduduknya mayoritas Muslim merupakan keniscayaan. Inilah makna penting pernyataan *hubbul wathan minal iman*.

Konsekuensi, jika ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang berupaya merongrong keutuhan NKRI, maka kita wajib untuk menentangnya sebagai bentuk keimanan kita. Tentunya dalam hal ini harus dengan cara-cara yang dibenarkan menurut aturan yang ada karena kita hidup dalam sebuah negara yang terikat dengan aturan yang dibuat oleh negara. Cintailah negeri kita dengan terus merawat dan menjaganya dari setiap upaya yang dapat menghancurkannya.

Perlu dipahami juga bahwa cinta tanah air mempunyai makna, Indonesia terdiri dari 700 suku lebih yang mempunyai tradisi, budaya, dan bahasa yang sangat beragam. Langkah kita sebagai seorang pelajar hendaknya berusaha mengetahui dan memahami kemajemukan Indonesia. Menjaga dan merawat Indonesia yang beragam ini merupakan bentuk cinta tanah air yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW.

Untuk mempertegas pandangan cinta tanah air dalam Islam, ulama muda asal Lampung KH Ahmad Ishomuddin (2018) mengungkapkan beberapa dalil tentang cinta tanah air dalam perspektif ajaran Islam:

Pertama, cinta tanah air dalam al-Qur'an Q.S.An-Nisa'/4 : 66, Allah berfirman,

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ اخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَنبِيْثًا (66)

" Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka: "Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu", niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka.

Dan sesungguhnya kalau mereka melaksana kan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka), "

Menurut para ahli tafsir, khususnya dalam *Tafsir al-Kabir*, al-Imam Fakhr Al-Din al-Razi menafsirkan ayat di atas, "*Allah menjadikan meninggalkan kampung halaman setara dengan bunuh diri.*" Pernyataan al-Razi di atas menjelaskan bahwa meninggalkan tanah air bagi orang-orang yang berakal adalah perkara yang sangat sulit dan berat, sama sebagaimana sakitnya bunuh diri. Jadi, cinta tanah air merupakan fitrah yang terhunjam sangat dalam pada jiwa manusia.

Kedua, cinta tanah air perhatikan matan dalam hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ حَمِيدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ إِلَى جُدْرَاتِ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ نَاقَتَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا.

(Ahmad-12162):Telah menceritakan kepada kami Ibrahim telah menceritakan kepada kami al-Harits bin 'Umair dari Humaid, at-thowil dari Anas, Nabi Shallallahu'alaihi wa Sallam jika tiba dari suatu perjalanan dan melihat ke dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat untanya dan jika diatas kendaraannya, ditarik-tariknya, karena begitu cintanya kepada Madinah. H.R.Ahmad.

Penjelasan ulama pen-syarah-nya, sebagaimana yang dikomen tari dalam *Fath al-Bari*, oleh al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan, "Hadis atas menunjukkan keutamaan kota Madinah dan disyariatkan nya cinta tanah air." Hal yang sama juga dikemukakan dalam kitab '*Umdat al-Qariy* oleh Badr al-Din al-'Aini.

Ketiga, cinta tanah air menurut para ahli fiqih. Bahwa hikmah berhaji dan pahalanya yang besar karena mendidik jiwa menjadi lebih baik dengan meninggalkan tanah air dan keluar dari kebiasaannya. Dalam kitab *al-Dakbirah*, al-Qarafi menyatakan, "*Manfaat haji adalah mendidik diri dengan meninggalkan tanah air.*" *Keempat*, cinta tanah air menurut para wali. Orang-orang yang saleh senantiasa mencintai tanah air. Dalam kitab *Hiyat al-Anliya'*, Abu Nu'aim meriwayatkan dengan sanadnya kepada pimpinan kaum zuhud dan ahli ibadah, Ibrahim bin Adham, ia berkata, "*Saya tidak pernah merasakan penderitaan yang lebih berat daripada meninggalkan tanah air.*"

Berdasarkan beberapa dalil di atas, maka setiap orang beragama selain berkewajiban untuk mencintai agama yang dianutnya--dengan cara memahami dan mengamalkannya dengan sebenar-benarnya--juga berkewajiban untuk mencintai tanah airnya. Karena mencintai tanah air itu tidak bertentangan dengan agama dan bahkan merupakan bagian dari ajaran agama yang wajib diamalkan. Orang yang beragamanya benar dan cinta terhadap tanah airnya akan selalu memerhatikan keamanan tanah air, tempat hidupnya, kampung halamannya. Ia tidak akan membuat kegaduhan demi kegaduhan, tidak menebar kebencian dan saling permusuhan di antara setiap orang dan setiap suku serta para pemilik identitas berbeda yang menempati setiap jengkal tanah airnya.

Orang yang mencintai tanah air karena perintah agamanya bahkan sanggup mengorbankan harta benda atau apa saja. Bahkan mengorbankan nyawanya untuk kepentingan mempertahankan tanah airnya dari setiap ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Cukuplah kiranya kita belajar kepada bangsa-bangsa lain yang penduduk negerinya berpecah belah, saling menumpahkan darah, saling bunuh dan masing-masing mereka berjuang atas nama agama yang sama, namun mereka tidak peduli kepada nasib tanah airnya. Itu

semuanya terjadi karena kecintaan mereka pada agama yang tidak diiringi dengan kecintaan kepada tanah air yang juga merupakan tuntutan agamanya.

Peneliti ingin mengemukakan doa cinta tanah air yang dimohonkan oleh Nabi Ibrahim as, yaitu:

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

"Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian."

dalam firman Allah swt, QS.Al-Baqarah/ ayat 126:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ
آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى
عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (126)

"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa:(Rabbij'al hâdżâ baladan âminan warzuq ahlahû minats tsamarâti man âmana minhum billâhi wal yaumil âkhir.) "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

D. Nasionalisme Ulama Ormas Islam Indonesia dan sikapnya terhadap persoalan Kekinian di Indonesia

Fakta di Indonesia ada dua raksasa ormas Islam, di lingkungan gerakan-gerakan Islam di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU) memimpin kesadaran ber

bangsa melalui jaringan pendidikan yang mereka buat. Walaupun Muhammadiyah merintis pendidikan yang 'lebih banyak' mengacu kepada hal-hal duniawi, seperti penguasaan pengetahuan umum, dan NU mengacu kepada pengetahuan agama, namun keduanya sangat dipengaruhi oleh apa yang berkembang di lingkungan gerakan nasionalis. Nasionalisme dalam arti menolak penjajahan, berarti juga pencarian jati diri sejarah masa lampau negeri sendiri. Dua ormas ini memiliki metode masing-masing dalam menanggapi nasionalis dan persoalan kekinian yang berkembang di Indonesia akhir-akhir ini.

Jika dipetakan persoalan kekinian di Indonesia, yang boleh jadi bisa merusak tatanan nasionalisme yang sudah kokoh dibangun oleh para ulama, pejuang dan pahlawan serta semua komponen bangsa Indonesia, di antaranya:

1. Berkenaan dengan masalah penista agama.
2. Pencabutan izin ormas HTI oleh Pemerintah.
3. Paham liberal dan radikal
4. Kesenjangan sosial-ekonomi
5. Dinamika global dan trans-nasional.

Persoalan kekinian di atas ini merupakan persoalan yang mesti diberikan solusi dan sekaligus diantisipasi agar tidak menjadi masalah besar pada bangsa Indonesia yang saat ini menuju pada era mengejar ketertinggalan dari negara-negara yang sudah maju.

1. Sikap Muhammadiyah tentang Persoalan Kekinian yang Merusak Nilai-nilai Nasionalisme di Indonesia

Menurut pandangan Muhammadiyah, Indonesia sebagai negara bangsa menghadapi masalah, ancaman dan tantangan

yang semakin berat di tengah pusaran yang sarat lalu lintas kepentingan ekonomi, politik dan budaya yang progresif dan kompleks. Pada saat yang sama Republik ini niscaya tegak dengan jiwa, pikiran, dan cita-cita nasional untuk tetap kuat sebagai negara yang bersatu, maju, adil, makmur, bermanfaat, dan berdaulat. Kedaulatan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus menjadi komitmen utama pemerintah dan seluruh komponen bangsa.⁴⁶

Oleh karena itu, Haedar Nashir, yang saat ini (periode 2015-2020) Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menyarankan kepada Pemerintah dan bangsa Indonesia harus tegas dan berani membuang setiap benalu, rayap, dan penyakit yang membikin ulah dan tindakan pengrusakan (*fasad fi al-ardh*) dalam wujud apapun. Indonesia tidak boleh dikuasai oleh kekuatan-kekuatan oligarki yang menjadikan negeri ini jatuh miskin, pecah belah, dan hancur. Sungguh terlalu mahal harganya Indonesia yang dimerdekakan dan dibangun dengan darah dan pengorbanan para pejuang serta pendiri bangsa jika disandera, digadaikan, serta dikuasai oleh tangan-tangan kotor dan rakus ketika Indonesia memerlukan pengorbanan mereka cuci tangan dan menyelamatkan diri layaknya para penjarah negeri.⁴⁷

Salah satu persoalan kekinian yang terjadi di Indonesia adalah tentang kasus penistaan agama, khususnya yang terjadi di Jakarta, yang menyebabkan pelakunya Basuki Tjahaya Purnama atau lebih dikenal dengan Ahok harus berhadapan dengan hukum lalu dengan proses dan perjalanan yang berliku dan panjang akhirnya divonis dan masuk penjara, kasus ini telah menasional dan panas, penuh kegaduhan di kalangan komponen bangsa.

⁴⁶Haedar Mashir, *Kuliah Kemuhammadiyah 2* (Jogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), h.205.

⁴⁷*Ibid.* h. 206.

Jika menelusuri kasus penistaan agama ini, paada prinsipnya tidak tunggal, karena rakyat Indonesia, bahkan umat Islam sudah sangat cerdas dalam menyikapi semua persoalan yang dihadapi bangsa. Kasus ini demikian menarik perhatian semua pihak, karena sarat dengan kontroversi. Ahok, demikian nama ini dikenal yang pada saat itu sebagai Gubernur menggantikan Jokowi, yang naik menjadoi Presiden RI ke-7. Pada saat Ahok dijadikan terangka, semestinya kemendagri menonaktifkannya, namun tidak dilakukan, sehingga menimbulkan prasangka di kalangan masyarakat Indonesia, seolah ada tangan-tangan kuat di belakangnya, masih dalam kasus Ahok juga berkembang antara BPK dan KPK tentang dugaan penyimpangan yang dilakukan Ahok dan dibuktikan dengan temuan BPK terhadap Sumber Waras, terakhir dengan reklamasi sejumlah pulau di sekitar DKI Jakarta, yang juga bermasalah.

Haedar Nashir, mengulas dalam bukunya, tentang kasus Ahok ini, beliau mengemukakan:

“Kenapa sdan adakah kekuatan-kekuatan raksasa tak terlihat di balik kasus ini sehingga proses penganganannya menjadi tarik ulur dan berliku, padahal untuk kasus yang serupa sebelumnya demikian mudah dan langsung memperoleh proses hukum yang cepat dan kemudian divonis bersalah. Publik digiring untuk penasaran bahwa banyak pihak seakan harus mempertaruhkan segalanya, bahkan negara dan bangsa pun menjadi gunjang-ganjing karenanya, yang menunjukkan isyarat terdapat tangan-tangan tak tampak yang sarfat kepentingan di balik kasus yang kontroversi ini.”⁴⁸

Lebih lanjut, Haedar Nashir, mengingatkan akan kasus yang pernah terjadi ini, yang pada dasarnya sangat sederhana

⁴⁸*Ibi.h.* 207.

namun dibuat rumit karena diduga sarat dengan kepentingan. Oleh karenanya, beliau mengingatkan, agar semua komponen bangsa dan tentunya terutama para elite di negeri ini tersadar kan qalbunya yang jernih tentang bahaya perilaku manusia yang karena sikapnya yang sekehendaknya dan sarat keserakahan bagi masa depan bangsa. Beliau menyandarkan ungkapan nya dengan dalail Q.S.al-Isra'/17:16.

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاَهَا تَدْمِيرًا (16)

Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancurnya.

Muhammadiyah berharap, semoga bangsa Indonesia dijauhkan dari pelbagai azab yang didatangkan oleh Allah swt, akibat kesalahan atau kesewenang-wenangan dalam memenej negara. Oleh karenanya, seluruh elite dan warga bangsa perlu bermuhasabah diri sekaligus berani membebaskan diri dari sandera orang-orang yang dapat menyebar kerusakan di negeri ini. Sungguh diperlukan jiwa besar dan kenegarawanan seluruh elite dan warga bangsa untuk terbebaskan dari sandera politik yang satu ini demi keselamatan dan kemajuan bangsa ke depan. Manakala sekali bermain-main dengan hukum politik, moral dan kekuasaan meski boleh jadi untuk sementara berbuah kemenangan, namun pada akhirnya berhadapan dengan hisab Tuhan, Allah swt bahwa kebaikan akan berbuah kebaikan, sebaliknya keburukan akan menemukan tempatnya sendiri. Ingatlah bahwa Allah swt tidak pernah tidur dan kekuasaannya berada di atas segalanya.⁴⁹

⁴⁹Ibid. h.208.

Pandangan Muhammadiyah, yang diwakili oleh Haedar Nashir ini, memberikan pelajaran yang demikian penting agar bangsa Indonesia menyadari bahwa hukum Tuhan, akan berlaku secara otomatis. Bagi umat Islam tentang betapa banyak kerusakan di laut maupun di daratan akibat ulah tangan manusia, sebagai informasi Alquran pada, Q.S.ar-Rum/30:41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41)

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

Selanjutnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir selalu mengingatkan bahwa gerakan radikalisme di Indonesia merupakan ancaman yang dapat hadir kapan saja, dalam bentuk apapun dan dengan model yang berbeda-beda. Tujuannya merusak semangat kebangsaan atau nasionalisme yang sudah lama terbangun di bumi Indonesia. Jadi, "Radikalisme bukanlah milik sekelompok agama tertentu saja. Radikalisme itu bisa diperankan oleh kelompok manapun, dari latar belakang agama, sosial dan budaya manapun," tegas Haedar saat memberikan materi dalam seminar Pemikiran Perguruan Tinggi untuk Kebangsaan di Kampus Universitas Mercu Buana (UMB).⁵⁰

Sebagaimana dikutip dari laman republika.co.id pada Selasa, (10/12) menurut Haedar, gerakan radikalisme adalah perlawanan yang mengarah pada kerusakan, sedangkan kerusakan merupakan perlawanan terhadap sebuah peradaban. Ia menambahkan, para pelaku radikalisme akan mengemas segala

⁵⁰Haedar Mashir, *Kuliah Kemuhammadiyah 2* (Jogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), h. 205.

bentuk upaya dalam berbagai isu. Dengan harapan, lanjut Haedar, tujuan kehidupan yang diharapkan kelompok radikalisme itu terwujud. “Sebagai bangsa Indonesia terdapat landasan fundamental yang sudah terbangun melalui ideologi Pancasila. Maka ideologi itulah yang menyatukan semangat kebangsaan dan harus diterima secara penuh oleh semua elemen bangsa Indonesia,” tegasnya. Benih radikalisme, sambung dia, merupakan upaya mengganti ideologi Pancasila. Menurutnya, hal itu sama saja ingin mengubah negara Indonesia dengan ideologi lain. Sudah pasti tidak sesuai dengan tuntutan Indonesia yang memiliki keragaman budaya, sosial, suku dan bahasa. Ketua umum PP Muhammadiyah itu berharap agar perguruan tinggi mampu terus menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah bernegara. Karena tanpa Pancasila, maka masa depan Indonesia akan tercerai berai. Hal itu berarti menghapus Indonesia sebagai sebuah negara.

Berdasarkan pandangan Haedar di atas, jelas persoalan kekinian di Indonesia, khususnya tentang paham radikalisme yang merusak tatanan bangsa dan nasionalisme mestinya diminimalisir keberadaannya di Indonesia dengan mengajarkan Islam yang sebenarnya melalui jalur pendidikan, yang dalam hal ini tentu lebih fokus pada perguruan tinggi.

Namun, Irwansyahputra MA, tokoh Muhammadiyah Sumatera Utara ini memandang sedikit berbeda demikian pula Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA,⁵¹ mereka berdua berpendapat bahwa radikalisme itu perlu disepakati terlebih dahulu defenisi dari radikalisme. Padahal, radikalisme yang asal katanya radi berasal dari radix, yang artinya akar, jadi orang yang berpaham radikalisme maksudnya pemahamannya itu betul-betul mengakar atau fundamen dari apa yang dipahaminya. Jika yang dimaksud fundamen Islam itu doktrinya atau sumbernya yaitu Alquran

⁵¹Wawancara peneliti dengan Irwansyahputra, MA dan Prof.Dr.Nawir Yuslem, MA , Sabtu, 13 Oktober 2018.

dan al-Hadis, ini tidak ada masalah. Namun, kalau radikalisme itu bermaksud ideologi, sehingga ingin mengganti ideologi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila ingin diganti dengan khilafah yang menurutnya berdasarkan ajaran Islam, tentu ini yang masalah. Sebab Pancasila menurut Muhammad sudah menjadi komitmen bersama bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara.

Jadi, bagi umat Islam, komitmen terhadap Negara Pancasila dapat dimaknai sebagai manifestasi pengamalan ajaran agamanya untuk menepati perjanjian dan kesepakatan. Dan perjanjian dengan orang non-Muslim itu sama mengikatnya dengan yang Muslim. Karena sama-sama terikat dalam Negara Perjanjian dan Negara Kesepakatan (*darul 'abdi*) itulah, maka umat Islam Indonesia bisa memposisikan warga non-Muslim sebagai saudara. Memposisikan non-Muslim sebagai satu saudara dalam kemanusiaan bisa kita temukan rujukannya dalam kutipan terkenal 'Ali bin Abu Thalib: "Dia yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudara dalam kemanusiaan." Sedangkan menempatkan mereka sebagai saudara sebangsa mungkin bisa mengacu pada Piagam Madinah, perjanjian yang dilakukan Nabi dan umat Islam dengan kaum Nasrani, Yahudi, dan Majusi Madinah untuk mempertahankan kota mereka dari agresi kaum kafir Quraisy. Dalam salah satu klausul Piagam Madinah disebutkan, "Kaum Yahudi dari Bani 'Araf adalah satu umat dengan kaum Muslim. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka." Menarik bahwa Nabi menyebut kabilah Yahudi yang turut dalam Piagam Madinah sebagai "satu umat dengan kaum muslim." Dengan begitu, Piagam Madinah menjadi titik temu yang menyatukan kaum Muslim dan Yahudi Madinah dalam persaudaraan keumatan, sebagaimana Pancasila menjadi titik temu yang menyatukan warga Muslim dan non-Muslim dalam persaudaraan kebangsaan

Oleh karena itu, Persaudaraan kebangsaan (*ukhuwah wathaniyah*) antara Muslim dan non-Muslim dengan sendirinya tak memberi ruang bagi penyebutan “kafir” terhadap sesama anak bangsa yang tak seagama. Pengkafiran semacam ini membawa konotasi bahwa warga non-Muslim adalah orang luar, yang layak untuk diwaspadai dan diperlakukan secara beda, atau bahkan “musuh” yang perlu dibenci dan dimusuhi. Padahal NKRI tidak dirancang untuk memperlakukan non-Muslim sebagai *kafir dzimmi*, apalagi *kafir harbi*, melainkan warga negara yang setara. Baik yang Muslim maupun yang non-Muslim sama-sama menjadi pemilik yang sah republik kita, republik yang dalam meminjam bahasa Sukarno disebut sebagai “negara semua untuk semua,” di mana egoisme agama tak mendapat tempat. Karena itulah, dalam bingkai NKRI tak boleh ada sebutan “kafir.” Kata kafir adalah terminologi jika mengkaji dalam kajian keislaman menurut doktrin Islam, alquran dan al-Hadis.

2. Sikap Nahdhatul Ulama tentang Persoalan Kekinian yang Merusak Nilai-nilai Nasionalisme di Indonesia

Fakta menyatakan bahwa kontribusi NU terhadap Islam dan Negara tidak perlu dipertanyakan lagi. Sejak negara ini berada dalam cengkraman penjajah Belanda, Nahdlatul Ulama (NU) berada dalam barisan terdepan dalam menggemakan semangat juang dan menghim pun kekuatan guna berjuang melawan penjajahan. Tentu, guna untuk menjaga agama dan nasionalisme dari gempuran ideologi asing.

Sehingga tidak heran, jika kemudian lahir apa yang disebut “resolusi jihad”. Dimana resolusi ini menjadi pelecut semangat dan kekuatan kaum santri dalam mengusir penjajah dari tanah air. NU memegang teguh prinsip kesetaraan,

keadilan dan mengancam setiap bentuk penjajahan dalam beragam bentuknya.⁵²

Selain ikut berjuang merebut kemerdekaan, NU juga konsisten menjaga dan merawat kemerdekaan yang sudah sejak lama diimpikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan harga mati bagi NU, sebagai salah satu bukti, bahwa NU mencintai tanah airnya, sebagaimana ia mencintai agamanya. Lebih lanjut, Nisful Khairi, salah seorang tokoh NU Sumatera Utara, mengemukakan bahwa Menjaga Islam dalam bingkai “Islam Nusantara” dan menjaga tanah air dalam bingkai “Negara Kesatuan Republik Indonesia” (NKRI) merupakan dua komitmen NU yang sampai hari ini masih dipegang teguh sebagai ijihad perjuangan NU. Persoalan keummatan dan kebangsaan, bagi NU adalah dua entitas tak terpisahkan. Menjaga Islam berarti harus menjaga NKRI, sebaliknya, menjaga NKRI harus juga menjaga Islam (baca: Islam Nusantara).⁵³

Hal yang senada tokoh NU Sumatera Utara lainnya, yakni Prof. Dr. Katimin, Mag,⁵⁴ menjelaskan, bahwa menjaga Islam dalam bingkai “Islam Nusantara” dan menjaga tanah air dalam bingkai “Negara Kesatuan Republik Indonesia” (NKRI) merupakan dua komitmen NU yang sampai hari ini masih dipegang teguh sebagai ijihad perjuangan NU. Persoalan keummatan dan kebangsaan, bagi NU adalah dua entitas tak terpisahkan. Menjaga Islam berarti harus menjaga NKRI,

⁵²Wawancara dengan Dr. Nisful Khairi, MA, Senin, 15 Oktober 2018. Beliau adalah salah seorang tokoh NU di Sumatera Utara, selain dosen UIN SU, jabatannya sekarang adalah Ketua Ikatan Sarjana Nahdhatul Ulama Sumatera Utara.

⁵³Wawancara dengan Dr. Nisful Khairi, MA, Senin, 15 Oktober 2018..

⁵⁴Wawancara dengan Prof.Dr. Katimin, M.Ag. pada Hari Selasa, 16 Oktober 2018, di Fakultas Ushuluudin dan Studi isl;am UIN SU. Beliau adalah pengurus NU Wilayah Sumatera Utara, beliau juga Dekan FUSI UIN SU Medan.

sebaliknya, menjaga NKRI harus juga menjaga Islam (baca: Islam Nusantara).

Konsekuensinya, NU harus tegas dan berani melawan radikalisme Islam dan ideologi asing yang pada dekade mutakhir mulai menunjukkan eksistensinya di negeri ini. Sebagaimana kita mafhum, radikalisme Islam (baca: kekerasan atas nama Islam) marak terjadi di negeri ini. Terbukti, hujatan bahkan tindak kekerasan atas nama agama terhadap kelompok yang berbeda acapkali terjadi belakangan ini. Misalnya, penyerangan terhadap para pemuka agama dan tempat-tempat ibadah.

Radikalisme yang lahir dari intoleransi, kian hari kian mengkhawatirkan dan menjadi momok yang menakutkan bagi terwujudnya Indonesia yang rukun dan damai. Dewasa ini, agama (baca: Islam) acapkali dijadikan alat legitimasi untuk melegalkan tindakan-tindakan kekerasan dan amoral lainnya. Islam lebih sering ditampilkan dengan wajah yang garang dan menakutkan, daripada wajahnya yang indah dan mendamaikan.

Tidak hanya radikalisme Islam, ideologi asing, sebut saja ideologi "*khilafah*" yang lahir dari rahim Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), kian hari kian gencar dikampanyekan oleh para *hizbiyyin* sebagai satu-satunya ideologi yang abash dan halal diterapkan di dunia, khususnya di Indonesia.

HTI sangat mengecam diterapkannya sistem demokrasi di Indonesia. Karena tujuan politik yang ingin dicapai oleh mereka adalah politik Islam *kaffah*, yaitu menerapkan syariat Islam secara utuh. Tidak hanya penerapan syariat Islam yang menjadi konsern perjuangan mereka, tetapi penegakan pemerintahan *khilafah* di negara-negara yang mereka sebut sebagai negara Islam, termasuk Indonesia.

Bagi HTI, demokrasi merupakan sistem kafir yang harus segera ditinggalkan oleh Indonesia. Karena ia merupakan produk barat. Dengan berlandaskan pendapat Taqiyuddin An-Nabani (pendiri Hizbut Tahrir), HTI berpendapat, bahwa kemunduran umat Islam disebabkan menjadikan Barat sebagai kiblat dari segala sistem kehidupan. Karena pokok persoalannya adalah barat, maka dia menyerukan kepada umat Islam dunia untuk meninggalkan sistem barat dan segera kembali kepada Islam sebagai dasar gerakannya.

Prof. Dr. Katimin, lebih lanjut mengemukakan bahwa Atas kegigihan melawan radikalisme Islam dan *Khilafah*, lantas kemudian NU dihujani banyak panah fitnah. Ia dituduh antek barat, pembela kaum kafir, liberal, penjilat, pragmatis, mata duitan, kejam terhadap sesama Islam dan santun terhadap non-Muslim dan fitnah-fitnah lainnya. Tapi sudah lah tidak usah dipikirkan, fitnah-fitnah itu sengaja mereka lancarkan untuk melemahkan perjuangan NU dan menggerus kepercayaan ummat terhadap NU. Bisalah, begitulah konsekuensi perjuangan. Maka dari itu, kita sebagai warga NU tidak boleh takut membelanya dari kelompok-kelompok yang tidak suka terhadap perjuangannya. Karena membela NU juga berarti membela ulama. Sedangkan ulama itu *waratsatul anbiya'*. Membela NU juga berarti membela agama dan negara. Atas nama agama dan negara, mari kita perangi radikalisme dan khilafah.

Menurut Pandangan NU, jika menelaah dalam sejarah Islam, radikalisme bersumber dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah doktrin dan ideologi, faktor eksternal adalah imperialisme atau persepsi imperialisme dan ketidakadilan yang merundung umat Islam. Narasi ini akan menggali sumber internal radikalisme dengan melacak akar doktrinnya pada paham salafi yang berkembang di Timur Tengah sejak abad ke-12 M dan mengeras menjadi ajaran *salafi-*

jihadi pada abad ke-20 M. Pengaruh ideologi salafi dan salafi-jihadi meluas hingga ke Indonesia dan menjadi tantangan terhadap kemajemukan dan kelangsungan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) secara internal, radikalisme bermula dari doktrin kesempurnaan dan keserba-mencakupannya Islam (شمولية الاسلام). Islam sempurna, karena itu tidak perlu ditambah dan dikurangi. Ajarannya mencakup semua, karena itu tidak perlu mencari tuntunan dari luar Islam. Contoh terbaik dari kesempurnaan Islam adalah praktik kehidupan generasi *salafus shâlih*. Mereka adalah tiga generasi terbaik dalam rentang tiga abad sejak zaman Nabi dan Sahabat, Tâbi'în, hingga Tâbiu't Tâbi'în. Sahabat adalah mereka yang bertemu Nabi dan mengakui risalahnya. Tâbi'în adalah mereka yang tidak bertemu Nabi tetapi bertemu Sahabat. Tâbiu't Tâbi'în adalah mereka yang tidak bertemu Nabi dan Sahabat tetapi bertemu dengan Tâbi'în. Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةَ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَانُوا يَضْرِبُونَنا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ.

(al-Bukhari-2458):Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari 'Ubaidah dari 'Abdullah ra. dari Nabi saw. bersabda: "Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang hidup pada zamanku (generasiku) kemudian orang-orang setelah mereka kemudian orang-orang setelah mereka. Kemudian akan datang sebuah kaum yang per saksian seorang dari mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului persaksiannya". Ibrahim berkata; "Dahulu, mereka (para sahabat) mengajarkan kami tentang bersaksi dan memegang janji (Mereka memukul kami bila melanggar perjanjian dan persaksian)".H.R.al-Bukhari.

Dengan terlibatnya para santri, ulama dan kiai dalam gerakan Nasional, menunjukkan bahwa hubungan antara agama (Islam) dan paham kebangsaan di Indonesia sudah selesai dan final. Bagi umat Islam Indonesia, nasionalisme adalah cerminan dari ajaran Islam dan menjadi sarana untuk mengamalkan ajaran Islam. Sedangkan agama adalah sumber inspirasi dari nasionalisme (KH Saifuddin Zuhri, 1965). Spirit inilah yang dirumuskan KH Hasyim Asy'ari dalam statemen yang sangat terkenal, *hubbul wathan minal iman* (cinta tanah air sebagian dari iman).

Sikap dan pemahaman seperti inilah yang membuat umat Islam Indonesia bisa menerima NKRI sebagai bentuk negara dan Pancasila sebagai dasar negara setelah melalui perdebatan panjang yang melibatkan pemikiran Islam dari berbagai disiplin ilmu, terutama fiqih. Dengan demikian, mempertanyakan kembali hubungan agama dan negara apalagi menggugat bentuk dan dasar negara atas nama agama sudah tidak relevan lagi, seperti memutar balik arah jarum jam. Selain itu hal ini juga akan memancing perdebatan sia-sia yang bisa menghambat kemajuan bahkan bisa mengancam integritas bangsa

Ada kondisi memprihatinkan terkait dengan semangat nasionalisme bangsa Indonesia saat ini. Maraknya gerakan internasionalisme dalam bentuk liberalisme-kapitalisme di satu sisi dan fundamentalisme-puritanisme agama di sisi lain telah menggerus kesadaran nasionalisme warga bangsa Indonesia.

Akibat paham internasionalisme yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi, hari ini kita melihat terjadi gerakan transformasi kesadaran dari citizenship menjadi nitizenship. Kewargaan yang dibatasi oleh identitas kenegaraan menjadi kewargaan lintas negara dan lintas geografis.

Fakta di kalangan masyarakat ini menunjukkan bahwa saat ini telah terjadi anomali sosial di kalangan bangsa Indonesia. Pada masa lalu tekanan bangsa lain mampu menciptakan kesadaran kebersamaan dalam perbedaan sehingga tumbuh harga diri sebagai bangsa. Bangsa Nusantara yang beragam menggali dan menyatukan potensi sosial dan kultural yang ada untuk menghadapi tekanan dari luar. Kini tekanan dari bangsa lain justru mengancam kebersamaan dan persatuan. Ikrar sebagai bangsa dicampakkan, martabat bangsa diabaikan.

Boleh dikatakan, bahwa orang-orang pada masa lalu memiliki kesadaran kreatif menggali potensi diri untuk membangun kekuatan sendiri melawan kekuatan luar. Orang yang hidup saat ini justru hanyut dan larut dalam gerakan transnasional dengan mencampakkan potensi diri sebagai bangsa. Mereka bangga menjadi pemulung ide dan pengais sampah peradaban bangsa lain sambil mencaci maki peradaban bangsa sendiri. Mereka menggunakan pemikiran dan budaya luar untuk menghancurkan dan melemahkan budaya dan khazanah pemikiran bangsa sendiri. Lahirnya sikap ini, sebab minimnya pemahaman terhadap sejarah bangsa sendiri dan miskinnya kesadaran terhadap tradisi dan budaya sendiri. Sejarah adalah referensi hidup bagi setiap bangsa. Suatu generasi yang tidak memiliki pemahaman terhadap sejarahnya sendiri ini bagaikan buih di atas gelombang lautan, sehingga mudah diombang-ambingkan keadaan dan dibohongi bangsa lain. Mereka menelan mentah-mentah setiap informasi dan pemikiran yang diberikan, tanpa *reserve* dan sikap kritis karena mereka tidak memiliki pemahaman sejarah yang bisa menjadi referensi hidup untuk mengkritisi setiap informasi dan pemikiran yang diterima dari bangsa lain.

Pada prinsipnya, tradisi adalah jangkar yang membuat suatu bangsa memiliki karakter yang kokoh dan kuat sehingga tidak mudah hanyut dalam pusaran arus gelombang budaya

dan pemikiran bangsa lain. Oleh kafenya, setiap bangsa yang tidak memiliki tradisi atau tidak paham terhadap budaya masyarakatnya, maka akan mudah hanyut dalam arus kebudayaan bangsa lain. Jika sudah demikian jelaslah bahwa bangsa tersebut akan keropos karena tidak memiliki kekuatan kultural dan sumber inspirasi untuk menghadapi gempuran budaya.

Berdasarkan hal di atas, maka perlu ada solusi. Maka salah satu solusinya melihat sejarah pada masa lalu, yakni lihat bagaimana para pendiri bangsa ini bisa bertahan dan berjuang untuk nasionalisme bangsa Indonesia. Mereka tidak mudah hanyut dan larut dalam pemikiran bangsa lain. Mereka itu dapat disebutkan antara lain, Ki Hadjar Dewantara, Dr Soetomo, Moh. Hatta, A.A. Maramis, Sosro Kartono dan lain-lain semua belajar ke Eropa. Tetapi mereka tidak hanyut dalam budaya Eropa. Demikian juga para ulama Nusantara seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syech Abdusshomad al-Palimbani, Syekh Arsyad al-Banjari, Syekh Khatib al-Minangkabawi, Ha dratussyekh Muhammad Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, semua belajar ke Arab. Tapi mereka semua tidak hanyut dalam budaya Arab. Sekalipun hidup dan berada di negara lain, para leluhur itu tetap bisa memilah mana ajaran mana pemikiran dan budaya. Ini terjadi karena mereka memiliki pemahaman sejarah dan akar tradisi yang kuat yang bisa dijadikan referensi dan pijakan dalam membangun pemikiran dan menentukan sikap Hal yang sama juga terjadi pada bangsa-bangsa lain, terutama bangsa Eropa, Amerika, Jepang, China yang tetap kokoh dan tegak spirit kebangsaannya sekalipun berada dalam pusaran arus modernisme dan globalisasi. Mereka tetap bangga dan menjaga martabat bangsanya meski telah menjadi bagian dari warga bangsa dunia maya (netizen). Ini karena mereka memiliki pemahaman yang baik terhadap sejarahnya sendiri dan tradisi yang mereka miliki.

Oleh karena vitalnya peran dan posisi sejarah dan tradisi suatu bangsa inilah maka strategi utama untuk bisa menguasai bangsa tersebut adalah dengan menghancurkan tradisi dan sejarahnya agar bangsa tersebut kehilangan jejak dan akar-akar sosialnya. Jika sudah demikian bangsa tersebut akan mudah dikuasai atau dihancurkan. Inilah yang sedang terjadi di negeri Indonesia hingga semangat kebangsaan bangsa ini semakin hari semakin rapuh dan luluh. Bahkan di tengah kepungan arus ideologi dunia dan pusaran arus budaya global yang telah menggerogoti semangat kebangsaan sehingga melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka perlu adanya penguatan pemahaman sejarah dan akar-akar tradisi bangsa Indonesia yang beragam.

Hal ini bukan dimaksudkan untuk membanggakan diri yang bisa membuat bangsa ini terjebak dalam sikap narsis. Pemahaman sejarah dimaksudkan sebagai penggalian nilai yang dalam setiap penggalan sejarah bangsa untuk dijadikan referensi hidup agar bisa bersikap kritis terhadap keadaan dan pemikiran dari bangsa lain.

Konsep bernegara kita sudah ideal dalam konteks merangkul kemajemukan masyarakat. Sebagaimana ditegaskan dalam keputusan NU di Situbondo, Pancasila merupakan dasar ideal untuk menjembatani dan mengakomodasi apa yang disebut sebagai kebinekaan," jelas K.H.Maman Abd. Ghani. Terkait dengan tantangan dan semangat nasionalisme kaum muda saat ini, Helmy menegaskan pentingnya mentransformasikan pesan-pesan nasionalisme dalam bentuk yang kreatif. Ia mencontohkan pesan dan kampanye melalui media sosial. "Jumlah pengguna media sosial di Indonesia sudah cukup banyak. Maka perlu ditekankan dan dipikirkan untuk membuat gerakan dan formulasi kampanye pesan-pesan nasionalisme melalui sarana-sarana yang disebut sebagai media

sosial. Ini sangat penting sebagai bentuk respon perkembangan zaman," ujar K.H.Maman.⁵⁵

Menurut pandangan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menegaskan, Islam Nusantara yang digagas NU dibangun di atas infrastruktur budaya. Puncaknya dari gagasan Islam Nusantara adalah menempatkan agama yang dibangun di atas nasionalisme atau agama dibangun di atas tanah air. Bahkan, menurut beliau, barangsiapa yang tidak punya tanah air, maka tidak akan punya sejarah. Barangsiapa yang tak punya sejarah. Barangsiapa yang tidak punya sejarah, pasti akan dilupakan. Lebih lanjut beliau mengemukakan, bahwa "Mengapa Fir'aun masih diceritakan Al-Qur'an? Karena punya tanah air. Mengapa Sriwijaya, Majapahit masih didongengkan? Karena punya tanah air," kata Kiai yang pernah nyantri di Kempek, Lirboyo, Krapyak dan Ummul Qurra Arab Saudi tersebut

Dengan kata lain, menurut pengasuh Pondok Pesantren Al-Tsaqofah, Ciganjur, menegaskan bahwa yang dilakukan Rasulullah bertekad kuat untuk hijrah ke Madinah. Karena, ia ingin memiliki tanah air. Dari tanah air itulah akan memulai sejarah. Kemudian beliau juga menegaskan, "Oleh karena itu *hubbul wathan minal iman*, tafsirannya saya pertegas, nasionalisme bagian dari iman. Kurang nasionalis, kurang imannya. Anda Muslim, harus nasionalis." Karena, kata beliau, nasionalisme para pendiri NU seperti Hadratussyekh KH Hasyim Asy'ari adalah nasionalisme religius, bukan sekuler dan liberal. Nasionalisme orang NU adalah tumbuh dari hati yang beriman. "Maka, ormas-ormas yang mengganggu keutuhan NKRI, harus diusir." Di dalam Alquran dijelaskan, "Wahai Muhammad, orang-orang yang bikin gaduh di kota Madinah, bikin rusuh, bikin tidak nyaman, bikin perpecahan di kota

⁵⁵Wawancara peneliti dengan K.H.Maman Abd. Ghanmi, Senin, 30 Agustus 2018, di PB NU Jakarta.

Madinah, usir dia. Jangan biarkan di hidup bersama kamu.”
“Ideologinya kita usir, orangnya, masuk NU,” katanya.⁵⁶

Menurut pandangan NU, bahwa sebagian besar gerakan ekstremisme di Indonesia dalam dekade terakhir ini adalah berasal dari gerakan organisasi Islam trans-nasional yang melibatkan berbagai negara dalam jejaring yang luas dan strategis. Misi mereka hanya satu, ingin menampilkan dunia dan hukum-hukum sosial dengan hukum Tuhan, di tengah kemajuan modernisme yang mereka anggap mengancam dan berbahaya. Islam sebagai agama yang selama ini menjadi korban dari keganasan ekstremisme yang mengatasnamakan hukum Tuhan, begitu dirugikan dan banyak pandangan tentang Islam menjadi semakin sempit. Hal ini tentu saja merupakan sebuah pereduksian terhadap ajaran Islam yang begitu mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan toleransi.

Selanjutnya, NU menegaskan bahwa kaum ekstremis, paling getol dalam memaknai ayat-ayat perang sebagai sebuah instrumen yang mereka anggap dapat melahirkan nilai-nilai instrumental dalam menghadapi tantangan zaman. Padahal, apa yang mereka lakukan adalah tak lebih dari kecenderungan barbarisme yang diliputi oleh rasa kebencian dan penuh dendam. Liberalisme dan sekularisme memang bukanlah jalan terakhir, orang-orang di zaman modern sekarang mencoba memproyeksikan seluruh potensi sistem untuk mencapai suatu kemakmuran, kemerdekaan, dan yang lebih penting adalah tercapainya hak-hak asasi manusia secara universal di mana setiap orang berhak untuk memegang prinsip sesuai dengan koridor individualisme yang dimiliki. Sejak negara Indonesia didirikan, para *funding father* telah sepakat bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berbasis pada demokrasi. Dalam Pancasila sila pertama disebutkan “Ketuhanan Yang Maha

⁵⁶<http://www.nu.or.id/post/read/79515/kiiai-said-nasionalisme-bagian-da-ri-iman->

Esa”, sila ini mengindikasikan bahwa Indonesia tidak akan pernah berdiri atas nama agama tertentu, semua agama (yang telah diresmikan) dapat hidup subur dan berdampingan satu sama lain. NU telah sepakat, bahkan sejak negara ini berdiri, bahwa Islam tidak akan pernah menjadi dasar negara, arti filosofis yang paling mendasar dari sila pertama adalah bahwa negara dan Pancasila sebagai ideologi, menjamin rakyatnya untuk beragama, berkeyakinan dan memiliki prinsip yang teguh terhadap nilai-nilai transendental. Nilai-nilai inilah yang kemudian menciptakan suasana harmoni, kesejukan dan kedamaian bagi sesama. Sikap toleran sebenarnya telah mengakar kuat dalam psikologi bangsa Indonesia, gerakan ekstremisme trans-nasional hanyalah bentuk dari kegagalan cara berfikir dalam beragama yang justru akan merusak agama dari dalam.

Menurut pandangan tokoh NU, hal ini bisa dilihat beberapa kasus pengeboman di Indonesia dalam dua dekade terakhir yang dilakukan oleh kelompok Islam tertentu, cara beragama mereka tidak khas Indonesia, mereka tidak memiliki sikap nasionalisme dan cinta tanah air, mereka hanya berpikir bahwa sesuatu yang tidak “Islami” layak untuk dibumi hanguskan. Meski begitu, perlu disadari bahwa gerakan ekstremisme di Indonesia sebenarnya telah tumbuh begitu subur, seperti pepatah “hilang satu tumbuh seribu” dan “patah tumbuh hilang berganti”. Penumpasan terhadap gerakan ekstremisme tidak lantas membuatnya hilang begitu saja, ia seringkali muncul lagi secara tidak terduga, cepat dan pemerintah melalui aparatusnya sering kecolongan dalam menelusuri embrio-embrio baru dari kelahiran ekstremisme ini. Dapat dipahami bahwa sebenarnya gerakan ekstremisme ini tidak bisa dibayangkan sebagai suatu tindak kekerasan atas nama agama yang dilakukan oleh kelompok atau pelaku tertentu. Ekstremisme lebih merupakan sebuah gerakan ideologis, sebetulnya keyakinan terhadap nalar ketuhanan yang

diproyeksikan untuk merubah semua tatanan menjadi sejalan dengan kehendak Tuhan. Sebagai ideologi, ekstremisme lebih tepat disebut sebagai sistem, sebuah sistem yang datang dari langit. Mereka menolak misalnya, seluruh sistem partikular yang lahir di bumi. Itu artinya bahwa hukum positif, sekularisme, demokrasi, dan modernisme yang lahir dari pergolakan umat manusia sepanjang sejarah dan menemukan momentum puncaknya di era kontemporer ini, oleh kelompok ekstremis dianggap menyalahi kodrat Ilahi. Dengan demikian, sistem ideologis gerakan ekstremisme ini begitu sulit untuk ditumpas.⁵⁷

Selanjutnya NU memandang dalam konteks Indonesia, gerakan ekstremis ini sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah atas banyaknya fenomena ketidakadilan, ketimpangan sosial dan korupsi yang begitu akut. Mereka percaya bahwa dengan menerapkan sistem syari'at Islam, Indonesia akan terselamatkan dari kondisi-kondisi akut ini. Namun demikian, karena cara beragama mereka begitu sempit dan tidak bisa melihat betapa beragam dan pluralnya masyarakat di Indonesia, pada akhirnya mereka justru terjebak pada problem epistemologis, khususnya dalam menghadapi kompleksitas masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Menurut pandangan NU, penanggulangan terhadap gerakan ekstremisme ini memang tidak mudah dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Kekuatan ideologis, haruslah dilawan dengan kekuatan ideologis. Pancasila sebagai ideologi paripurna yang dapat menyatukan seluruh keragaman dan perbedaan haruslah menjadi gerda depan bagi ternamanya nilai-nilai nasionalisme yang kuat.

Tidaklah cukup jika menumpas gerakan ekstremisme ini hanya dengan membunuh atau menumpasnya dengan cara-

⁵⁷Wawancara peneliti dengan Prof. Dr. Katimin, M.Ag, di kantor FUSI UIN SU Medan, Selasa, 16 Oktober 2018.

cara menghilangkan atau membungihanguskan, karena mereka akan terus hidup dan ini lagi-lagi bukan soal pelaku siapa dan di mana. Jadi kekuatan ideologis seperti Pancasila haruslah lebih dikedepankan. Pemerintah sebagai otoritas tertinggi yang memiliki tanggungjawab dalam stabilitas negara, harus benar-benar bisa memastikan rakyatnya tidak terjerumus dalam ekstremisme. Seringkali gerakan ini tumbuh subur di lingkungan pendidikan dan tempat-tempat ibadah serta majelis Ilmu. Para perekrutnya biasanya mencari anak-anak muda yang masih pada taraf pencarian terhadap jati diri, itulah kenapa lembaga pendidikan dan tempat ibadah begitu subur menjadi tempat perekrutan. Pemerintah juga harus terus sigap terhadap seluruh kondisi yang ada, misalnya, lebih melakukan penjagaan ketat terhadap universitas, masjid, dan tentu saja setiap figur publik seperti dai-dai harus dipastikan bahwa pemahaman mereka tidak keluar dari koridor nasionalisme.

Selanjutnya NU menjelaskan bahwa Adanya faham *takfiri* (mengafirkan), *tabdi'* (membidahkan), *tasyri'* (mensyirikkan) merupakan bentuk pemahaman Islam konservatif, kaku, dan doktriner. Menurut Saifullah Ma'shum,⁵⁸ adanya paham seperti itu awalnya dibawa oleh para alumnus dari Arab Saudi yang pulang ke Indonesia. kilmaksnyanya, terkadang paham ini, terutama dari Yaman dan Aghanistan, mereka melakukan tindakan keji berupa merusak sampai *ngebom*. Padahal, teror dalam Islam bukan termasuk jihad dan ajaran Islam penuh kedamaian. Agama tak sekadar urusan doktrin ideologis. Agama harus dipahami sebagai realitas sosial. Maka perbuatan sehari-hari tak boleh kaku karena harus sesuai konteks, lingkungan, budaya dan kebutuhan zaman. Orang berpaham kaku dan konservatif cenderung inferior dengan bangsanya sendiri karena tak memiliki spirit nasionalisme.

⁵⁸Wawancara peneliti dengan K.H.Saifullah Ma'shum, Selasa, 31 juli 2018, di PB. NU Jakarta.

Lebih lanjut Saifullah Ma'shum, mengemukakan mereka berpaham 'yang lain salah kecuali aku'. Seolah-olah surga sudah 'dikapling' dan yang tak sepaham tempatnya di neraka. Jika demikian, wajar jika ada aksi terorisme. Cara dakwah mereka pun 'memukul' bukan merangkul. Doktrin jihad harusnya memajukan justeru menjadi 'jahat'. Dari sini, tradisi dan kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai kedamaian, toleransi dan persaudaraan menjadi bagian menggerakkan dan mengutamakan nasionalisme. Jika masyarakat semuanya nasionalis, tak mungkin ada pengeboman karena mereka cinta tanah air.

Selanjutnya, kuatnya nasionalisme menjadi syarat terwujudnya bangsa besar. Nasionalisme dan religiusitas bisa separel. Kita memiliki imperium ideologi bangsa berupa Pancasila. Ditambah pilar Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945. Semua itu sudah final karena dulu sebelum perumusan Pancasila, KH Hasyim Asyari pendiri NU melakukan puasa berbulan-bulan meminta petunjuk pada Allah. Hasilnya, ketika Bung Karno bertanya pada Mbah Hasyim, nasionalisme yang ditambahi dengan niat ibadah dan bacaan *basmalah* sudah islami. Nasionalisme dengan doktrin *hubbul wathan minal iman* (cinta tanah air sebagian dari iman) harus digerakkan dengan sikap superior. Mulai dari nasionalisme budaya, kewarganegaraan, etnik, romantik, sampai nasionalisme religius/agama. Jika ini dipegang kuat, maka tak mungkin ada terorisme. Jadi menurut NU, penguatan nasionalisme ini bisa dilakukan lembaga pendidikan, Madrasah Ibtidaiyah (MI)/ Sekolah dasar (SD)-Madrasah Tsanawiyah (MTs)/ Sekolah Menengah Pertama (SMP)-Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA) sampai perguruan tinggi dan komunitas budaya yang bermuara pada karakter toleran dan humanis. Spirit transnasional yang mencetak generasi antitradisi dan antinasionalisme harus diputus lewat pembudayaan dan literasi toleransi.

Fenomena sosial yang tidak dapat dipungkiri pada masa sekarang ini adalah lunturnya nilai-nilai kebangsaan dan moral di kalangan generasi muda. Fenomena ini dapat dimafhumi eksistensi integritas nasional seperti pengaruh negatif globalisasi dan westernisasi yang merasuk ke sendi-sendi kehidupan bangsa yang masih sangat rapuh. Pada saat goncangan terhadap integritas bangsa sedang mendera, komponen bangsa termasuk generasi muda lebih disibukkan oleh hal-hal yang praktis dan bersifat sesaat. Nilai-nilai luhur budaya bangsa yang diwariskan oleh para founding father telah tercerabut dari akarnya. Generasi muda lupa akan jati diri dan eksistensinya sebagai penerus cita-cita kemerdekaan. Padahal, indikator kemerdekaan perlu dibangun dengan nilai-nilai kebangsaan yang kokoh, semangat nasionalisme, patriotisme, kecakapan religius, kolektivisme, dan fondasi nilai budaya yang luhur.

Namun, fenomena mengatakan lain yaitu bahwa bangsa kita lebih didominasi paham individualisme yang mengabaikan prinsip-prinsip kolektivisme. Akibatnya, permasalahan sosial dan kultur banyak bermunculan di sana-sini. Identitas bangsa "diperjualbelikan" untuk kepentingan individu atau golongan. Tidak peduli apakah negara dirugikan atau tidak, yang penting dirinya untung dan kelompoknya menang. Kondisi bangsa yang dilanda *ahistoris* ini juga terlihat pada perilaku sosial kalangan pelajar.

Lunturnya nilai-nilai kebangsaan, kepribadian, kecakapan religius, kesadaran sejarah, nasionalisme, tawuran antar pelajar, kurangnya kedisiplinan, sikap individualistik, kecenderungan "memberhalalkan" segala cara untuk mencapai kemenangan, dan perilaku asosial lain sudah menjadi permasalahan bangsa yang sangat serius. Primordialisme, individualisme, dan bahkan separatisme, benar-benar telah mengancam integritas bangsa. Kebanyakan dari anak bangsa tidak mau tahu bahwa bangsa ini terlahir melalui perjalanan sejarah yang

panjang, berkat kerja keras para pejuang bangsa, pengorbanan tanpa batas para *founding father* dan tumpahan darah para pahlawan untuk sebuah kemerdekaan. Nilai-nilai kebangsaan dan moral di kalangan peserta didik benar-benar telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan.

Oleh karena itu NU memandang penting diingat, Islam terlibat dalam pergumulan sejarah politik bangsa. Nasionalisme tidak serta merta lahir tanpa campur tangan agama. Laffan (2003), sejarawan Islam terkemuka, menemukan bahwa Islam memiliki kontribusi besar dalam sejarah panjang nasionalisme di Indonesia. Muslim Indonesia menjadi aktor penting yang mendorong terbentuknya Indonesia menjadi negara-bangsa (*nation-state*) atas jasa para kaum reformis Muslim yang berani mengubah wawasan kebangsaan dari wacana “ummah” menjadi “bangsa” dan menggeser diskursus *Al-Jawi* menjadi tanah air dan bangsa dalam arti modern dewasa ini. Konsekuensinya, membela bangsa adalah bagian dari panggilan epifani ilahi yang harus dijunjung tinggi.

Peran kaum Muslim tidak berhenti, Nahdlatul Ulama (1926) menjadi soko guru bangsa. NU pada muktamar di Banjarmasin (1935) bersikap tegas bahwa negara tidak perlu menjalankan syari’at Islam. Syari’at Islam hanya wajib dijalankan oleh masyarakat. Artinya, agama tidak mesti diformalkan di ruang publik karena Indonesia secara kodrati majemuk dalam suku, tradisi, etnis, bahkan agama.

Oleh karenanya, relasi agama dan budaya kerap dibahaskan oleh Gus Dur dengan “pribumisasi Islam”. Amal jariyah NU untuk bangsa tidak pernah surut, dan hal tersebut dibuktikan pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo, Jawa Timur, praktis NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal (kembali ke khittah 1926).

Dengan demikian, umat beragama diuji dengan dengan dua tantangan besar. **Pertama**, faktor internal dari sikap intoleran sebagian kelompok yang acapkali saling mengkafirkan (*takfiriyah*) dan berujung pada kekerasan. Sikap intoleran telah merobek tenun kebangsaan yang diperjuangkan sejak dahulu. Nasionalisme yang dalam khittahnya dibangun untuk perekat sosial, kini terkoyak kembali oleh kesadaran yang didasarkan pada primordialisme. Nilai-nilai primordialisme yang dijangkarkan pada agama, suku, ras, dan etnis menjadi benalu bagi demokratisasi yang tengah melaju pada tahap konsolidasi. Pada titik ini, intoleransi telah masuk dalam sendi-sendi pendidikan. Studi teranyar yang dilakukan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang “Guru Agama, Toleransi, dan Isu-isu Kehidupan Keagamaan Kontemporer di Indonesia” yang dirilis pada Desember 2016 lalu, menemukan bahwa aspirasi guru agama terhadap penerapan syari’at Islam cukup tinggi. Guru agama yang setuju terhadap pemerintah berdasarkan syari’at Islam mencapai 78%, dukungan terhadap organisasi yang memperjuangkan syari’at Islam mencapai 77%, sedangkan guru agama yang tidak setuju dengan Pancasila dan UUD 1945 sejalan dengan syari’at Islam mencapai 18%. Masalah kepemimpinan, sekitar 89% guru agama tidak setuju kepala daerah yang non-Muslim. Ketika guru agama ditanya apakah mereka bersedia menampung warga Syi’ah dan Ahmadiyah, sekitar 80% tidak setuju. Guru agama yang tidak setuju pendirian rumah ibadah agama lain di wilayah mereka mencapai 81% dan sekitar 78% mereka tidak setuju non-Muslim mengajar di sekolah Islam.

Ternyata bahwa terdapat urgensi untuk mendorong reformasi Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah agar tidak hanya memiliki misi keagamaan (*religious mission*) yang diharapkan mampu membentuk Muslim yang taat, melainkan juga harus turut serta menginjeksikan nilai-nilai kebangsaan agar

terwujudnya warga negara yang baik dan menghormati nilai-nilai keindonesiaan, termasuk pluralitas (keberagaman).

Kedua, ideologi transnasional dengan dalih kembali pada kemurnian Islam: al-Qur'an dan Hadis, namun justru menjadikan tindakan teror yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan sebagai nafas pergerakannya. Kita bisa bercermin pada Nigeria dengan kasus Boko Haram, Somalia, dengan kelompok islamis al-Shabab sebagai dalangnya, dan ISIS di Timur Tengah. Oleh karenanya, jika negara lemah dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, tidak tertutup kemungkinan Indonesia akan menjadi “negara gagal” (*failed states*) akibat kehancuran persatuan bangsa.

Dalam hal ini, amal usaha NU dan amal usaha Muhammadiyah dalam merawat nilai-nilai keindonesiaan sangatlah dibutuhkan. Sebab dua organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia ini diharapkan akan terus mengawal kokohnya nasionalisme di Indonesia untuk menghadang dari berbagai paham yang datang dari dalam maupun luar yang dapat merusak nilai-nilai nasionalisme.

DAFTAR REFERFENSI

- Addin*, Jurnal, Vol. 10, No. 1, Februari 2016
- Ajzen, I, dan M. Fishbein. 1970. *The prediction of behavior from attitudinal and normative variable. Journal of Experimental Social Psychology* 6 (4).
- Amar, Faozan, dkk, 2018, *Darul Abdi Wasy-Syahadah*, Jakarta: Al-Wasat Publishing House.
- Badudu, JS; dkk. 1984, *Morfologi Bahasa Indonesia (Lisan)*. Depdikbud RI
- Barnard, Chesters I., 1938. *The functions of the executive*. Cambridge: Harvard University Press.
- Baso, Ahmad, 2015, *Islam Nusantara Ijtihad Jenius dan Ijma' Ulama Indonesia*, jilid 1, Jakarta: Pustaka Abid.
- Baso, Ahmad, 2015, *Islam Nusantara Ijtihad Jenius dan Ijma' Ulama Indonesia*, jilid 2, Jakarta: Pustaka Abid.
- Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/BAPPE NAS, 2016. *Laporan Koordinasi Strategis Penyusunan Rencana Aksi Strategi (Stranas) Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa Dalam Rangka Memperkuat Persatuan Dan Kesatuan Bangsa*, Djambatan.
- Emzir, 2013. *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta, Rajawali Pers
- Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan Volume 4 Nomor 1, 2016.
Gema Insani Press.
- Greeno, J.G. 1978. *Natures of Problem Solving Abilities*. Dalam W.K. Estes (ed) *Handbook of Learning and Cognitive Processes. Volume 5. Human Information Processing*; New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publisher.
- Harry C.Triandis.1971. *Attitude and Attitude Change*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Hsubky, Badruddin, 1995. *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman*, Jakarta:

- <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/nur-endah-januarti-ma/mkmasosbud05pendekatan-masalah-sosial-budaya.pdf>
- <https://id.wiktionary.org/wiki/kekinian>
- Huwaydi, Fahmi, 1996, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani, Isu-isu Besar politik Islam*, Bandung : Mizan.
- Ilmu Sastra, jurnal Vol. 6 No.1, Mei 2011.
- JAAI, jurnal. Vol. 18 No.2, Desember 2014
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Kebangkitan Dunia Islam Global*, Jurnal Ilmu Agama, Vol. 15, No.2, 2014. Palembang: IAIN Raden Fatah.
- Koentjaraningrat. 2009. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta:
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Kurniawati, Mustari SIP., MPA, 2016. *Nasionalisme*, Materi Diklat Prajabatan Golongan II Lembaga Administrasi Negara, 17-10-2016.
- La Ode, M.D., *Trilogi Pribumisme, Resolusi Konflik Pribumi dengan Non Probumi di Berbagai Belahan Dunia*, Jakarta: Komunitas Ilmu Pertahanan Indonesia (KIPI), 2018.
- Lincoln dan Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry*. California: Beverly Hills.
- Manullang, M. 2002. *Dasar-dasar Manajemen*. Cetakan 16. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Miftahuddin, M. Hum., Dkk., 2012. *Laporan Penelitian Payung: Peran Organisasi Islam : Dari Perjuangan Menuju Kemerdekaan Sampai Masa Perang Kemerdekaan (1936-1949)*, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah FISIP – UNY.
- Miles, MB, dan Huberman, AM. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Miqot, jurnal. Vol. XXXVI No. 1 Januari-Juni 2012.
- Moleong, Lexy J., 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

- Mooney, Alan C Reiley. 1974. *The principles of organization*. New York, London: Harper & Brothers.
- Mugiyono 2014. *Rasi Nasionalisme dan Islam serta Pengaruhnya terhadap*
- Mustahofa Haroen, *Meneguhkan Islam Nusantara, Biografi Pemikiran dan Kiprah Ke bangsaan Pprof. Dr. K.H.Said Aqil Siroj, MA*, Jakarta : PT. Khairu Jalisin Kitabun (Khalista), 2015.
- Nashir, Haedar, 2018. *Kuliah Kemuhammadiyah* jilid 1, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Nashir, Haedar, 2018. *Kuliah Kemuhammadiyah* jilid 2, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Nasution, S, 1988. *Metode Penelitian Naturalistik*, Bandung: Tarsito.
- Noeng Muhadjir, 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakesarasin.
- Oentoro, Jimmy, 2010. *Indonesia Satu, Indonesia Beda, Indonesia Bisa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Patilima, Hamid, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta
- Penelitian Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Negara Pancasila sebagai Dar Al-'Abdi Wa Al-Syaha dah*, Jakarta : 2017.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Indonesia Berkemajuan Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan Yang Bermakna*, Jakarta :cet. Ke-5, April 2017.
- Region (Junal) Volume I. No. 3. September 2009
- Said, M Mas'ud. 2010. *Kajian Model Internalisasi Ideologi Kebangsaan di Daerah Perbatasan*, 2010, Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas, Malang: UMM.
- Siradj, Said Aqiel, 1999, *Islam Kebangsaan Fiqih Demokratik Kaum Santri*, Jakarta: Fatma Press.
- Siradj, Said Aqiel, 2015, *Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara Menuju Masyarakat Mutamaddin*, LTN NU.

- Sudarnoto Abdul Hakim, *Ki Bagus Hadikusumo, Biografi, Perjuangan dan Pemikiran*, Jakarta : Pimpinan Pusat Muhammadiyah, tt.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*
- Suharyat, Yayat, *Hubungan Antara Sikap, Minat dan Perilaku Manusia*, Bekasi: UNISBA, 2009.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Ubaid, Abdullah dan Mohammad Bakir (editor), *Nasionalisme Islam Nusantara*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2015.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Zamzam Nur, Zuly Qodir, dkk, Acep., *NUhammadiah Bicara Nasionalisme*, Ar-Ruzz Media, cet. Ke-1, 2001.